

FORUM DISKUSI **DENPASAR 12**

SAMA-SAMA TEGAK BERDIRI

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.
Wakil Ketua MPR RI

FORUM DISKUSI **DENPASAR 12** SAMA-SAMA TEGAK BERDIRI

SAMA-SAMA TEGAK BERDIRI

Penggagas:

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.

Cetakan Agustus 2024

UU 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Tim Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.:

Arief Adi Wibowo, S.Si., M.T.

Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.

Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si.

Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M.

Luthfi Assyaukanie, Ph.D.

Sadyo Kristiarto, S.P.

Anggiasari Puji Aryatie, S.S.

Dr. Irwansyah, S.Sos., M.A.

Dr. Radityo Fajar Arianto, S.E., M.B.A.

Sekapur Sirih

BUKU ini masih berkaitan dengan beratnya tekanan ekonomi yang dialami bangsa ini akibat pandemi covid-19 dan upaya mencari jalan keluarnya.

Bab I berisi pandangan mantan Menteri Perdagangan Enggartias Lukita, Presiden ASEAN International Advocacy Shanti Shamdasani, Founder CORE Dr. Hendri Saparini, Direktur Eksekutif Indef Dr. Berly Martawardaya, Ketua Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis LPPM, Universitas Negeri Jakarta Dianta Sebayang, Ph.D, anggota Dewan Redaksi Media Group Suryopratomo, dan Ketua Komisi Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia Dr. Azrul Tanjung. Diskusi ditutup dengan *closing statement* oleh Direktur Pemberitaan *Media Indonesia* Usman Kansong.

Bab II berisi pandangan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Fauzi Amro, M.Si., Direktur Sparklabs Incubation Universitas Pelita Harapan Dr. Radityo Fajar Arianto, M.B.A., Deputy Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rarden Kurleni Ukar, M.Sc., Ketua Komite Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia Drh. Dedi Kusmanagandu, M.B.A., Ketua Korbid Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem Dr. Suyoto, M.Si., Direktur Penyakit Menular WHO South East Asia Regional Office (SEARO) 2018-2020 Prof. Dr.Tjandra Yoga Aditama, dan Founder, CEO & Bureau Chief Mobiliari Group Millie S.Lukito.

Bab III berisi pandangan Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM

Tubagus Fiki Satari, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung, S.E., M.A., CEO & Co Founder INAmikro/JAKmikro Debbie Tampubolon, Ketua Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis LPPM Universitas Negeri Jakarta Dr. Dianta Sebayang M.E., pengusaha furnitur Jepara Imam Rahman, S.E., M.B.A., *entrepreneur* industri fesyen Niluh Djelantik, dan Digital Creative Agency Sugarad.id, Solo, Anton Sang Bambu.

Bab IV berisi pandangan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Keuangan periode 2013-2014 Muhammad Chatib Basri, Founder dan Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dr. Hendri Saparini, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Arya David Sumual, ekonom dari Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Dr. Dianta Sebayang, serta wartawan ekonomi dan Direktur Utama Harian *Disway* Tomy C. Gutomo.

Bab V berisi pandangan pelaku usaha pertanian Wayan Supadno, pelaku usaha digital Zahra Damariva, Presiden Komunitas Tangan di Atas (TDA) 2019-2021 yang juga pemilik Malang Strudel Donny Kris Puriyono, Tri Mumpuni dari Institute Bisnis dan Ekonomi Krakyatan (Ibeka), dan Direktur Sparklabs Incubation Universitas Pelita Harapan Dr. Radityo Fajar Arianto, M.B.A..

Bab VI berisi pandangan Plt Sekretaris Utama Kepala Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy, Guru Besar Sosiologi Pembangunan Universitas Padjadjaran Muhammad Fadhil Nurdin, Sesditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI IGK Astawa, Chief Content Officer *vidio.com* Tina Arwin, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ratih Mezasari Singkaru, dan wartawan *Media Indonesia* Raja Suhud.

Perbincangan di dalam Forum Diskusi Denpasar 12 tersebut dirangkum menjadi buku ini oleh Kleden Suban, Gantyo Koespradono, dan Hilarius U. Gani. Seperti buku-buku yang telah diterbitkan, buku ini pun diperiksa secara kolektif melalui *zooming* yang melibatkan ketiga penulis dan dikoordinasikan oleh Ade Siregar.

Forum Diskusi Denpasar 12 terselenggara secara teratur berkelanjutan setiap Rabu berkat kerja tim yang solid. Topik diskusi, pembicara, dan pembahas ditentukan Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M., bersama Arief Adi Wibowo, S.Si, M.T., Dr. Radityo Fajar Arianto, M.B.A, serta Staf Khusus Wakil Ketua MPR Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., dan Drs. Muchtar Lutfhi Muty, M.Si, serta Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M., Luthfi Assyaukanie, Ph.D., Sadyo Kristiarto, S.P., Anggiasari Puji Aryatie, S.S. dan Dr. Irwan-syah, S.Sos., M.A..

Adapun teknis pelaksanaan Forum Diskusi Denpasar 12 secara virtual ditangani Tim Tenaga Ahli DPR, yaitu Shohibul Uman, S.E., Alma Costa, S.S., M.A., dan Affan Akbar Harahap, S.Sos. Tim Tenaga Ahli DPR adalah tim Lestari Moerdijat dalam kedudukannya sebagai anggota DPR RI.

Tim tenaga ahli lainnya, Naila Fitria, S.Si., Lia Eldest Sihotang, S.IP, M.A., dan Ahmad Nur Saeful, S.Pd. bertugas melakukan riset untuk keperluan diskusi serta menghubungi pembicara dan pembahas sesuai otoritas ataupun kompetensi masing-masing.

Forum Diskusi Denpasar 12 berlangsung mulai pukul 14.00 WIB, didahului menyanyikan lagu *Indonesia Raya*, lalu dibuka dengan sam-

butan Lestari Moerdijat. Bergantung pada topik, diskusi dipimpin moderator Arimbi Heroepoetri, atau Luthfi Mutty, atau Luthfi Assyaukanie, atau Anggiasari Puji Aryatie, S.S., atau Dr. Radityo Fajar Arianto, M.B.A., atau Dr. Irwansyah. Saur Hutabarat menutup diskusi dengan opini singkat.

Perancang sampul dan penata letak buku ini ialah Briyanbodo Hendro. Buku ini pun mendapat sentuhan editor bahasa Adang Iskandar agar bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap terjaga dan terpelihara. ■

Pentingnya Aksi Kolektif

SUKA atau tidak suka, kiranya kita harus mengakui bahwa ketika diskusi yang dihimpun dalam buku ini diselenggarakan, resesi sudah di depan mata. Dampak pandemi covid-19 membuat kita berada di satu titik yang tidak bisa kita hindarkan, yakni tekanan dan kontraksi ekonomi yang begitu tajam. Bukan hanya masalah Indonesia, tetapi juga masalah global.

Setiap negara tidak punya pilihan selain memikirkan diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Apa resep kita menghadapi resesi ekonomi yang telah berada di depan mata? Inilah pertanyaan pokok yang hendak dijawab di dalam serangkaian Forum Diskusi Denpasar 12 yang kemudian dihimpun di dalam buku ini.

Jawaban pokok atas pertanyaan pokok itu ialah kita harus bersama-sama tegak berdiri. Inilah mentalitas yang diperlukan anak bangsa ini dalam menghadapi berbagai keadaan yang paling sulit sekalipun.

Sektor UMKM, misalnya. Sektor ini diharapkan bahkan diyakini menjadi salah satu mesin yang berperan sebagai pendorong pemulihan ekonomi nasional. Usaha mikro mampu menyerap 107,2 juta tenaga kerja. Sebuah jumlah yang amat besar, yakni 89% dari total tenaga kerja.

Pandemi covid-19 menyebabkan omzet 50% UMKM turun sampai gulung tikar, 80% kehabisan tabungan, dan 42% akan bertahan hanya 3 bulan bila tidak ada intervensi pemerintah berupa bantuan langsung tunai.

Kita mengapresiasi pemerintah mengambil kebijakan yang tepat,

antara lain berupa belanja pemerintah untuk UMKM yang targetnya mencapai Rp442,43 triliun.

Tentu krisis yang mendera UMKM tak dapat diselesaikan hanya oleh bantuan dana pemerintah. Kita harus pula memacu konsumsi domestik yang diproduksi UMKM. Untuk itu, kita perlu meningkatkan daya beli masyarakat. Singkatnya, kunci kebangkitan UMKM ialah aksi kolektif.

Di dalam berbagai diskusi, aksi kolektif itu diekspresikan melalui berbagai kata kunci, seperti kolaborasi, sinergi, dan kerja sama. Saya yakin, dengan aksi kolektif, sama-sama tegak berdiri di berbagai sektor kehidupan, kita dapat melalui pandemi ini dengan lebih cepat. Ketika pengantar ini ditulis, alhamdulillah, kita sebagai bangsa telah kembali hidup normal.

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber, pembicara, dan penanggap yang telah menyumbangkan buah pikirannya.

Jakarta, 10 Agustus 2023



Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.

Wakil Ketua MPR RI

Terbayangkan dan Terpikirkan

FAKTOR utama berhentinya pandemi menjadi endemi ialah pencapaian vaksinasi di suatu negara. Di dalam perkara ini kita termasuk negara yang tercepat.

Dipandang dari segi kecepatan pemerintah menyediakan dana, kesiapan pemerintah membeli vaksin, ketangkasan tenaga kesehatan, serta kesediaan mayoritas warga divaksinasi, kiranya tidak berlebihan pula untuk mengatakan bahwa kita bangsa rasional.

Di masa pandemi itu juga tampak rasionalitas warga di dalam menegakkan protokol kesehatan. Benar sempat terjadi kasus ada warga yang memaksa membuka jenazah saudaranya korban korona sebelum dimakamkan--contoh irasionalitas, tetapi perilaku demikian hilang begitu saja. Kok bisa?

Sedemikian dahsyatnya serangan korona yang mematikan itu membuat manusia siapa pun dia kiranya terpaksa bersedia menerima kenyataan hidup bersama virus. Protokol kesehatan dan vaksin itu tiada lain adalah 'senjata' untuk manusia 'aman' hidup bersama virus.

Pada mulanya akhir pandemi korona tak terbayangkan. Sampai kemudian yang 'tak terbayangkan' itu berubah menjadi perkara 'yang terpikirkan'. Vaksin temuan hasil pikiran manusia itu diterima oleh manusia yang berpikir untuk disuntikkan ke dalam 'dirinya', membuat ujung pandemi menjadi 'dapat terbayangkan'.

Ke dalam 'dirinya', bukan sekadar ke dalam 'tubuhnya'. Saya

pikir di sinilah kunci utama keberhasilan vaksinasi. Yaitu, anak manusia yang sayang akan nyawanya itu membuka dirinya untuk menerima ‘hidup bersama’ dengan sebuah kemajuan temuan ilmu pengetahuan.

Sebuah hidup bersama yang pendek, 6 bulan. Inilah umur efektivitas vaksin. Akan tetapi, inilah hidup yang penuh pengharapan. Ada yang ditunggu, yang diharapkan, 6 bulan berikutnya, vaksinasi kedua. Orang plong hidup normal ketika mendapat *booster*.

Di masa pandemi itu rupanya semakin penting hidup yang berpengharapan. Inilah pengharapan berkat keterbukaan pikiran. Bagi yang beriman, tentu disertai keyakinan bahwa Sang Khalik Langit dan Bumi telah campur tangan.

Meminjam pandangan George Soros dalam bukunya, *Open Society*, yang terjadi kiranya ialah pertemuan ‘*thinking and reality*’. Pandemi membuat orang ‘terkurung’ secara fisik, bahkan berbagai negara melaksanakan kebijakan *lockdown*. Namun, di dalam diri yang terkurung itu hidup pikiran yang terbuka berhadapan dengan realitas virus yang mematikan.

Boleh jadi si korona yang kejam itu sesungguhnya yang memaksa, mau tidak mau, manusia yang pikirannya tertutup dan dirinya ‘terkurung’ harus menjadi terbuka pikirannya. Terbayanglah hal yang semula tiada terpikirkan menjadi kenyataan yakni berujungnya pandemi.

Ketika pandemi berlalu, terasa benar makna dan nikmatnya kenormalan yang tanpa predikat, entah lama entah baru. Normal, ya normal.

Di luar yang normal hanya tiga: Upnormal (gerai jualan bermacam masakan Indomie); atau abnormal (sebaiknya masuk RS jiwa); atau Anomali (gerai ngopi).

Jakarta, 10 Agustus 2023



Saur Hutabarat
Wartawan Senior

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih

7

Pentingnya Aksi Kolektif

13

Terbayangkan dan Terpikirkan

17

MERAMU RESEP MENGHADAPI ANCAMAN RESESI EKONOMI

24

1. Latar Belakang: Kontraksi Ada di Mana-Mana
2. Tatkala Resesi di Depan Mata
3. Dorong Konsumsi Domestik
4. Tak Ada Negara yang Berpengalaman
5. Banyak Negara Berhati-hati Berinvestasi
6. Memaklumi Pertumbuhan Ekonomi Negatif
7. Bukan Tanda-Tanda Kiamat
8. Jangan Membayangkan yang Suram-Suram
9. Jangan Pesimistis, Samakan Persepsi

KESIAPAN SEKTOR EKONOMI PASCAPANDEMI

78

1. Latar Belakang: Saat Kasus Positif Covid-19 Cenderung Menurun
2. 'Kita Berada dalam Situasi Luar Biasa'
3. Aktivitas agar Ekonomi tidak Mati
4. UMKM dan Game Changer Pemulihan Ekonomi
5. Skenario Membangkitkan Industri Pariwisata yang Lumpuh
6. Mempertahankan dan Meningkatkan Potensi Keturunan Kakek Ayam
7. Memperpendek Time Delay
8. Pulihkan Ekonomi, Digitalisasi Bisa Tembus Rp2.000 Triliun

KEBANGKITAN UMKM PASCAPANDEMI

134

1. Latar Belakang: Tulang Punggung yang Lumpuh
2. Memulihkan Pilar
3. Mendorong Naik Kelas
4. Keberpihakan Pemerintah

MENATAP EKONOMI INDONESIA 2022

170

1. Latar Belakang: Ekonomi Digital Meningkat Pesat
2. Krisis Global Menjadi Ruang Pembelajaran
3. Perlu Kolaborasi Membangun UMKM
4. Vaksinasi Menjadi Kunci Pemulihan
5. Mengoptimalkan Ekonomi Domestik
6. Perbedaan Kebijakan Memicu Inflasi
7. Pandai Menangkap Peluang Bisnis

HAMBATAN UKM DAN TANTANGAN KEBANGKITAN EKONOMI RAKYAT PASCAPANDEMI

210

1. Latar Belakang: Butuh Inovasi dan Adaptasi
2. Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi
3. Lingkaran Masalah
4. Tantangan Digitalisasi UMKM
5. Manajemen Profesional
6. Pembangunan SDM Digital

VI

MEMBUMIKAN BANGGA PRODUK INDONESIA

248

1. Latar Belakang: Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri
2. Bangga Buatan Indonesia Wujud Kedaulatan Bangsa
3. Merumuskan Kebijakan Ekspor-Impor
4. Modal Sosial untuk Membangun Partisipasi Baru
5. Menjadi Gerakan Bersama yang Utuh
6. Memberdayakan Industri Kreatif
7. Sentilan dari Kepala Negara

Catatan Moderator

288

Biodata Tim Ahli

294



**Meramu Resep
Menghadapi Ancaman
Resesi Ekonomi**

1 Latar Belakang: Kontraksi Ada di Mana-Mana

GUNCANGAN ekonomi yang disebabkan oleh pandemi covid-19 mengarah pada resesi global. Berbagai kebijakan yang diambil untuk menekan penyebaran covid-19, seperti penutupan aktivitas bisnis/perkantoran/sekolah hingga kuncitara (*lockdown*), menyebabkan penurunan tingkat konsumsi dan investasi secara drastis.

Meskipun tercatat lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan ASEAN, misalnya Singapura yang berkontraksi -12,6% dan Malaysia -8,4%, secara nasional pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -5,3%.

Beberapa indikator industri, seperti anjloknya penjualan mo-



Pekerja di saat jam pulang kantor di kawasan Sudirman, Jakarta, Jumat (25/9/2020). Pandemi covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasional mengalami kontraksi sebesar -5,3%.

bil hingga 89,4% (y-o-y) dan sepeda motor yang turun sampai 79,7% (y-o-y), menunjukkan adanya tekanan yang hebat pada sektor industri sekaligus memperlihatkan pelemahan daya beli masyarakat.

Kontraksi konsumsi rumah tangga secara agregat sebesar -5,51%, turun dari 2,83% di kuartal pertama. Mayoritas komponen dalam konsumsi rumah tangga juga mengalami kontraksi, seperti makanan/minuman -3,94%, transportasi dan komunikasi -12,06%, dan restoran/hotel -17%.

Di sisi lain, realisasi konsumsi pemerintah pun berkontraksi -6,9% jika dibandingkan dengan di periode yang sama tahun lalu. Kontraksi ini terutama karena adanya perubahan kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) 2020, yakni pejabat negara setara eselon I dan II tidak menerima THR.

Penundaan dan pembatalan kegiatan-kegiatan karena tidak memungkinkan dilakukan selama pandemi menyebabkan kinerja ekspor barang dan jasa juga menunjukkan kontraksi cukup tajam, -11,66%. Ekspor jasa pun berkontraksi seiring dengan turunnya jumlah kunjungan wisatawan selama pandemi.

Realitas itulah yang kemudian menjadikan kita seolah-olah sedang dibayang-bayangi resesi yang demikian menakutkan dan menginspirasi Forum Denpasar 12 untuk menggelar diskusi bertajuk Meramu Resep Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi. ■



Hampir semua pemerintahan di banyak negara berlutut bagaimana menjaga kelangsungan hidup warga di negaranya agar tetap terjaga dan bertahan.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 **Tatkala Resesi di Depan Mata**

SAAT membuka diskusi, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengakui bahwa pandemi covid-19 bukan hanya masalah Indonesia, tetapi juga masalah global.

Ia melanjutkan, kita tahu persis bahwa kita sudah berada pada satu titik yang tidak bisa lagi kita hindarkan, yakni munculnya tekanan dan kontraksi ekonomi yang begitu tajam.

Situasi tersebut, menurut perempuan yang akrab disapa Rerie itu, akan membawa Indonesia pada kondisi yang tidak mudah. “Mau tidak mau, diakui atau tidak, apa pun itu, kita harus mengatakan bahwa resesi sudah di depan mata.”

Situasi dan kondisi yang kita rasakan beberapa bulan belakangan ini sudah semakin nyata. Di depan mata, berbagai

masalah yang berhubungan dengan persoalan sosial sudah kita hadapi. Sekarang kita menghadapi resesi.

Forum Diskusi Denpasar 12, disebut Rerie, bahkan sudah membahas mengenai masalah kesehatan mental sebagai akibat atau efek dari pandemi covid-19.

Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada masalah ekonomi, tetapi juga berimbas ke masalah-masalah lain. Manakala kita berdiskusi mengenai kesehatan mental, termasuk saat kita berbicara tentang ketahanan ekonomi, ujung-ujungnya mau tidak mau yang harus kita hadapi ialah bagaimana kita sebagai sebuah bangsa dapat mempertahankan diri.

Saat ini semua bangsa di dunia fokus memikirkan diri masing-masing menghadapi covid-19. Hampir semua pemerintahan di banyak negara berkulat bagaimana menjaga kelangsungan hidup warga di negaranya agar tetap terjaga dan bertahan.

Saat diskusi ini diselenggarakan, kita memang sudah mendengar kabar gembira bahwa ada negara yang telah menemukan vaksin virus korona. “Tapi kapan vaksin itu bisa digunakan, masih belum bisa dijawab secara pasti,” kata Rerie.

Ketika dihadapkan pada kenyataan itu, maka ancaman khususnya yang menimpa sektor ekonomi akan berdampak pada seluruh tatanan masyarakat. Ini bakal menjadi kenyataan.

Data menunjukkan bahwa beberapa bulan ke depan pertumbuhan ekonomi akan minus. Kontraksi di sektor industri dan perdagangan sudah terasa dan menyumbangkan catatan terhadap

penurunan pendapatan.

Menurut Rerie, pertumbuhan di semua sektor juga melambat. Bisa dikatakan tidak terjadi pertumbuhan sama sekali, bahkan minus, dan diprediksi bakal lebih mengkhawatirkan.

Proyeksi awal dan harapan, pandemi covid-19 tidak sampai memicu pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, ternyata yang terjadi kebalikannya. Banyak perusahaan yang terpaksa mem-PHK karyawan.

Rerie mengatakan, beberapa bulan yang lalu, kita optimistis bahwa sektor informal masih bisa hidup dan mewarnai gerak perekonomian serta terus mengalami pertumbuhan.

Benar, memang terjadi pertumbuhan, tetapi tidak signifikan, dan dari hari ke hari pertumbuhannya cenderung semakin melambat. “Catatan-catatan inilah yang saya rasa perlu kita sikapi dan kita diskusikan, kemudian kita cari jalan keluarnya bersama-sama,” kata Rerie.

Dengan begitu, Rerie berharap sisa paruh waktu yang tinggal lima bulan ke depan sampai dengan akhir 2020 bisa dilalui dengan aman. Paling tidak, kita masih bisa berada pada posisi yang tidak terlalu berbahaya. ■



Kebiasaan makan daging masyarakat kita harus diubah dengan memperbanyak makan ikan. Apalagi sebagai negara kelautan, produk ikan kita berlimpah.”

Enggartiaso Lukita

Menteri Perdagangan RI periode 2016-2019

3 Dorong Konsumsi Domestik

TATKALA covid-19 merebak dan WHO menyatakan sebagai pandemi, kenyataannya, menurut mantan Menteri Perdagangan Enggartiaso Lukita, tidak ada satu pun pengalaman yang bisa dijadikan acuan bagaimana kita harus melangkah.

Pasalnya, kata Enggartiaso, “Kalau kita mengacu pada resesi yang paling dalam, kita semua belum lahir, sehingga tidak ada satu pun negara di dunia ini yang siap menghadapi pandemi yang dahsyat seperti sekarang ini.”

Yang tampak di depan mata ialah bahwa seluruh negara di dunia kini sudah bersiap-siap dan bahkan masuk ke dalam resesi karena kondisi itu memang hampir melanda semua negara.

Pada 1997-1998 dan 2008, resesi memang pernah mengham-

piri banyak negara. Akan tetapi, menurut Enggartiasto, situasinya berbeda dengan kondisi sekarang. Saat ini, di waktu yang bersamaan, *supply* dan *demand* terpukul sekaligus.

Rumus yang berlaku secara umum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara saat terjadi krisis ialah menarik investasi sebanyak mungkin dan mendorong ekspor. Persoalannya, kata Enggartiasto, untuk menarik investasi, apalagi yang besar-besaran masuk ke Indonesia, tidaklah mudah. “Bahkan hampir tidak mungkin,” tegasnya.

Jika harus mendorong ekspor, masih menurut Enggartiasto, ceruk pasar dalam suasana seperti saat ini juga kecil sekali. Itu juga dirasakan di banyak negara.

Apakah sama sekali tidak ada peluang ekspor di masa pandemi? Tentu ada. Beberapa komoditas unggulan kita, terutama yang bersumber dari alam, masih bisa kita ekspor. Andalan kita memang hanya itu.

Langkah yang tetap harus dilakukan dan dipertahankan ialah pemerintah mesti terus mendorong konsumsi domestik kita. Ini yang masih bisa diharapkan. Menurut Enggartiasto, Pilkada Serentak 2020 di sejumlah daerah bisa dimanfaatkan sehingga uang yang beredar bisa membantu untuk memaksimalkan belanja.

Jika kita bersepakat mendorong konsumsi domestik, kata Enggartiasto, ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Pertama, apa yang akan dibelanjakan? Kedua, siapa pelakunya? Ketiga, dari mana dananya?

Apa yang dibelanjakan atau dibeli? Pastinya ialah bahan pokok sehari-hari. Dari mana dananya? Enggartiasto mengatakan kita bersyukur karena ada gaji ke-13 pada Agustus 2020. Ada pula bantuan sosial (BLT: bantuan langsung tunai).

Diakui, terkait dengan BLT, kita memang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, terutama menyangkut data dan ketepatan siapa yang layak dan berhak menerima BLT.

Dari bahan pokok yang dikonsumsi masyarakat, menurut Enggartiasto, sektor pertanian akan tumbuh. Demikian pula sektor perikanan. Kalau program itu berjalan dengan baik, kedua sektor tersebut akan menggairahkan tingkat konsumsi kita. Sayangnya, konsumsi ikan di Indonesia belum merata.

Daerah-daerah yang kaya, kata Enggartiasto, masyarakatnya lebih banyak mengonsumsi daging. Makan daging dianggap sebagai kemewahan.

Kebiasaan makan daging masyarakat kita harus diubah dengan memperbanyak makan ikan. Apalagi sebagai negara kelautan, produk ikan kita berlimpah. Kita juga negara kepulauan. “Ini harusnya bisa mendorong agar kita banyak mengonsumsi ikan. Makan ikan itu sehat,” ujar Enggartiasto.

Selain itu, kita harus mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri, terutama yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM. “Ini harus kita dorong untuk dibeli. Tanpa kita harus melarang atau menyatakan setop impor,” tambahnya.

Lalu, siapa pelakunya? Enggartiasto mengatakan, pelakunya



MIBARY FATHAHILAH

Petugas bank mengurus pencairan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bagi sopir angkot dan tukang ojek pangkalan di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat, Jumat (15/5/2020). BLT diberikan kepada masyarakat yang terdampak dan merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mendorong konsumsi domestik.

ialah masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Kelompok masyarakat itulah yang kita harapkan mengonsumsi bahan pokok sebab masyarakat menengah ke atas masih pelit dalam berbelanja. Mereka hanya belanja seperlunya.

Memberikan contoh, Enggartiasto mengatakan, cadangan keuangan di perbankan meningkat. Dana pihak ketiga di perbankan tumbuh secara positif. Kelas menengah atas berprinsip

lebih baik uang lebihnya diarahkan ke sana.

Selain itu, banyak warga kelas menengah yang bermain emas karena emas dianggap sebagai cadangan yang bagus buat mereka. Persoalannya, menurut Enggartiasto, jual-beli emas ini tidak mendorong perputaran ekonomi.

Investasi memang masih dimungkinkan walaupun terdapat kecenderungan dunia usaha sekarang berprinsip lebih baik defensif daripada ofensif. Mereka lebih berorientasi melakukan restrukturisasi keuangan sambil melihat proyeksi ke depan, apa yang akan terjadi.

Terkait dengan sumber dana, Enggartiasto memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang telah menyiapkan berbagai stimulus pendanaan untuk warga masyarakat yang tidak mampu sebagai dampak pandemi covid-19. “Secara realistis kita memang tidak mungkin melakukan *lockdown*. Tidak mungkin kita mengerem total karena jika ini yang kita lakukan akan menjadi bencana,” katanya.

Namun, harus diakui, menurut Enggartiasto, pada implementasinya belum semua yang direncanakan berjalan dengan baik. Masih tertatih-tatih. Ada yang tertinggal. Harap dimaklumi, dalam situasi seperti ini, tidak semuanya siap.

Terkait dengan sumber dana dari APBD atau APBN, seharusnya diperiksa dengan cermat penggunaannya. Dana APBD tidak boleh hanya disimpan di deposito. Jika itu yang terjadi, pengelola atau pihak yang menggunakannya harus diberikan sanksi, misal-

nya tidak memberikan bunga.

Enggartiasto mengatakan bahwa proyek-proyek APBN dan APBD adalah proyek fisik. Harusnya kita dorong ke padat karya. Kita harus berani ubah meskipun ada konsekuensinya, yakni *cost*-nya lebih tinggi dan waktu penyelesaiannya lebih lambat.

Namun, demi keselamatan bersama, keputusan itu harus diambil. “Saya mengagumi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang membuat kebijakan lebih kurang Rp10,5 triliun direlokasikan untuk proyek-proyek padat karya. Menurut saya, ini lebih sehat daripada sekadar memberikan BLT,” tutur Enggartiasto.

Demikian pula dengan dana desa, juga dana pendidikan sebesar 20% yang tidak terserap, seyogianya digunakan untuk pembangunan fisik sekolah dan perbaikan sarana-prasarana sehingga ekonomi di daerah ikut bergerak.

Bank-bank pemerintah berjanji akan menyiapkan kredit sebesar Rp90 triliun untuk menggeliatkan perekonomian yang melibatkan usaha swasta. Menurut Enggartiasto, pertanyaannya ialah bagaimana penggunaan dana-dana yang totalnya sebesar itu. Apakah benar-benar disalurkan untuk kredit baru atau dana dipakai untuk merestrukturisasi kredit-kredit lama?

“Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan para anggota DPR yang terhormat dari Komisi XI, Komisi VI, mohon dipantau dana Rp90 triliun yang dijanjikan itu digunakan untuk apa saja? Seharusnya bukan untuk kredit lama, tapi untuk kredit baru

yang produktif melibatkan tenaga kerja dan pembangunan fisik,” imbuh Enggartiasto.

Dia menyarankan investasi yang berasal dari dalam negeri di masa pandemi sebaiknya dibebaskan dari pajak selama lima tahun. Berbagai perizinan harus dipermudah. Jangan diperlama.

Soal praktik perizinan itu, Enggartiasto berseloroh, “Kalau kita ingin membangun hotel, jika pakai ‘doa’, sembilan bulan ‘doa’-nya terkabul. Kalau tanpa ‘doa’, bisa lebih dari satu tahun.”

Enggartiasto mencatat pemerintah sudah banyak menandatangani berbagai perjanjian perdagangan antarnegara. Jangan hanya mitra dagang dari negara lain saja yang memanfaatkan. “Para pengusaha kita harus memanfaatkannya. Jangan biarkan para pengusaha berjalan sendiri. Pemerintah dan pengusaha secara rinci harus memanfaatkan peluang ini dan lakukan upaya untuk peningkatan ekspor,” tukas Enggartiasto. ■



Dalam suasana seperti itu, banyak pemerintahan di sejumlah negara yang akhirnya melakukan *internal approach*. Kepentingan domestik lebih diutamakan.”

Shanti Shamdasani

Presiden ASEAN International Advocacy

4 Tak Ada Negara yang Berpengalaman

MENGHADAPI pandemi covid-19 yang entah kapan akan berakhir, Presiden ASEAN International Advocacy, Shanti Shamdasani, berpendapat langkah ‘gas dan rem’ yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah tepat.

Padahal, menurut Shanti, merebaknya covid-19 yang diikuti dengan situasi dan kondisi seperti saat ini praktis tidak pernah dialami oleh negara apa pun dan di mana pun. Ini fenomena baru yang mengejutkan siapa pun.

Krisis ekonomi memang pernah menimpa negara-negara di dunia, tetapi saat itu lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia masih memiliki dana cadangan dalam jumlah yang cukup untuk *lending*.

Tapi sekarang, kalau yang meminta utang serentak dan ra-

mai-ramai, kata Shanti, kita bisa bayangkan bagaimana IMF dan Bank Dunia bisa melakukan itu.

Beruntung dalam situasi seperti ini, menurut Shanti, Indonesia masih punya prospek. “Saya melihat kita punya prospek sangat besar jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lain. Kita memiliki sumber daya alam. *Population and youth capacity* kita masih bagus, masih masuk dalam rasio yang sehat.”

Shanti mengungkapkan, banyak negara yang *wait and see*, melihat apa yang akan terjadi. Dalam suasana seperti itu, banyak pemerintahan di sejumlah negara yang akhirnya melakukan *internal approach*. Kepentingan domestik lebih diutamakan. Maklum, banyak negara yang belum mengenal secara persis dampak ekonomi dari pandemi covid-19 nantinya akan seperti apa.

“Akhirnya langkah-langkah yang diambil oleh investor atau pembuat kebijakan masih 50:50 atau masih *wait and see*,” kata Shanti seraya menambahkan, kalau kita lihat *world bond performance* Indonesia pada kuartal pertama 2020 (terakhir 13 Agustus 2020) mulai meningkat, tidak terlalu buruk.

Kenyataan itu, kata Shanti, menunjukkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi pandemi covid-19 sudah tepat.

Langkah berikutnya, kata Shanti, ialah bagaimana melakukan *economy approach*-nya sekarang, apalagi kita menghadapi kemungkinan adanya pertumbuhan ekonomi -5,32%. “Kita harus bisa memilih jalan mana yang harus kita lewati dan memiliki *risk*



Proyek pembangunan jalur *elevated* Kereta Cepat Jakarta-Bandung (kiri) dari atas Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (12/12/2019). Saat pandemi covid-19, proyek-proyek pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan oleh pemerintah karena banyak menyerap tenaga kerja, selain tetap memberikan stimulus-stimulus kepada para pelaku UMKM.

yang lebih kecil. Di mana dan ke mana pun kita pergi, *risk* pasti ada. Jadi sekarang kita harus memilih jalan dengan *minimum risk*, *not with risk* yang besar.”

Agar kita tetap eksis, menurut Shanti, proyek-proyek pempa-

ngunan yang sudah direncanakan sebaiknya tetap dilanjutkan, tetapi dengan memberikan stimulus-stimulus kepada pelaku UMKM. Pemerintah juga harus menggerakkan proyek-proyek yang menyerap banyak tenaga kerja.

Persoalannya, untuk melanjutkan proyek-proyek itu, sumber dananya dari mana? “Kalau saya lihat dengan *bond* yang sudah kita *issued with performance* sebesar 6,8% memang sudah oke, tapi tidak cukup,” kata Shanti.

Ia kemudian menyarankan sesuatu yang tidak populer. “Saya ingin mengatakan sebuah pemikiran bahwa sepertinya sudah saatnya Indonesia melakukan pencetakan uang. Karena, kalau tidak dilakukan seperti ini, dikhawatirkan dana stimulus yang disiapkan sebesar Rp7 triliun tidak sampai ke bawah,” kata Shanti.

Pandemi covid-19 memang membuat para pelaku usaha panik. Shanti mengungkapkan punya klien *owner* sebuah hotel. Dia mengaku tidak bisa tidur nyenyak selama tiga minggu karena kamar hotelnya kosong. “Ia tidak tahu bagaimana masa depan bisnis hotelnya meskipun saya sudah beri beberapa *advice* untuk mengubah hotelnya menjadi sebuah sarana lain yang ada *market-nya*,” ujar Shanti.

Shanti mengakui dampak dari mencetak uang akan meningkatkan inflasi. “Tapi kita sudah terlatih untuk *manage* inflasi. Tapi kita tidak terlatih untuk *manage* dampak dari pertumbuhan ekonomi -5% dan kemungkinan akan turun lagi. Jadi kembali lagi ke pernyataan saya, *we have to choose the level risk.*” ■

“

Apabila kita masih makan tiga kali sehari, masih bisa jajan, ekonomi kita masih akan tumbuh dan punya kekuatan yang cukup.”

Hendri Saparini
Founder CORE Indonesia

5 Banyak Negara Berhati-hati Berinvestasi

FOUNDER CORE Indonesia Hendri Saparini tidak bisa memungkiri realitas bahwa ketidakpastian global sekarang ini semakin menguat. Karena itu, setiap negara akan lebih *inward looking* sebab mereka tidak tahu apakah memungkinkan melakukan *foreign direct investment* (FDI).

Selama ini negara yang FDI-nya sangat tinggi ialah Jepang. Jika dibandingkan dengan di negara-negara lain, kasus covid-19 di Jepang tidak terlalu tinggi. Kendati begitu, Jepang tetap sangat berhati-hati melakukan FDI karena mereka pun lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan internalnya.

Bila kenyataannya seperti itu, lalu apa yang paling penting dilakukan dalam menghadapi covid-19? Stimulus ekonomi apa yang paling dibutuhkan saat ini? Stimulus apa lagi yang harus dilakukan untuk menghentikan dampak covid-19?

Hendri Saparini mengatakan, kita tidak akan bisa melakukan apa pun sebelum kita dapat menghentikan atau setidaknya mengurangi penyebaran covid-19.

Ia menyebut Vietnam dan Korea Selatan yang berhasil menekan laju penyebaran covid-19. Ternyata, mereka tidak melakukan apa pun, termasuk memberikan stimulus ekonomi.

Dari kedua negara itu, kita dapat belajar bahwa yang utama harus dilakukan ialah bagaimana menghentikan penyebaran covid-19 semaksimal mungkin dan menjaga kebutuhan dasar masyarakat.

Setelah kasus covid-19 di dua negara itu mulai menurun dan melandai, ungkap Hendri, barulah mereka melakukan stimulus di bidang ekonomi. Beberapa negara yang melakukan itu ternyata dianggap berhasil.

Benar, di Vietnam mulai Juni 2020 ada gelombang kedua covid-19, tapi hanya terjadi di satu provinsi. Vietnam berhasil mengelola kasus ini dengan baik sehingga ekonominya terus tumbuh. Mereka bahkan memprediksi pertumbuhan ekonominya pada 2020 di kisaran 4,5%-5,2%. Artinya ada harapan yang cukup untuk menjaga pertumbuhan ekonomi negaranya di tengah-tengah pandemi covid-19.

Menurut Hendri, dalam merespons pandemi covid-19 terkait dengan kebijakan yang akan diambil, yang penting ialah *timing* dan fokusnya. “Harus secepat mungkin dan fokus ke sasaran.”

Jika melihat data yang selama ini disampaikan pemerintah,

kata Hendri, jumlah kasus covid-19 belum sampai di puncaknya sebab angka-angka tersebut muncul lantaran kita sekarang ini melakukan tes lebih cepat.

Hendri melanjutkan, karena kita belum sampai puncak, tentu saja tidak mudah mengharapkan investasi besar dari luar untuk menopang perekonomian kita. Bahkan untuk mendatangkan wisatawan pun, para turis pun pasti akan bertanya-tanya, apakah Indonesia aman.

Menyinggung anggaran stimulus, Hendri menengarai banyak dana yang belum didistribusikan secara cepat, padahal kunci sukses program ini ialah kecepatan. “Saya melihat implementasi BLT masih sangat lambat. Jadi program-program yang mestinya dipercepat belum berhasil,” kata Hendri.

Ia menambahkan, itulah yang menyebabkan banyak orang sudah tidak sabar jika harus terus tinggal di rumah karena tidak ada yang bisa menjamin akan mendapatkan apa.

Lalu, siapa yang salah? Hendri mengatakan. kita tidak bisa menyalahkan siapa. Dalam kasus covid-19, kita tidak bisa bicara salah dan benar. “Kita harus belajar dari banyak negara bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah yang paling mendasar.”

Dari banyak negara, tambahnya, kita melihat banyak warga negaranya yang *happy* setelah pemerintah memberikan stimulus, termasuk kepada para pelaku usaha seperti memberikan keringanan pajak. Di Korea Selatan, pemerintahnya bahkan memberikan kemudahan modal kepada pelaku UMKM.

Kebijakan itu diambil dengan harapan apa yang dilakukan UMKM terus bergulir dan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) dan kemudian menggerakkan industri besar. Pemerintah Korea Selatan juga memberikan berbagai kemudahan kepada industri-industri besar. Secara tidak langsung, ini sebenarnya juga mengurangi ongkos terhadap biaya produksi mereka.

Dampak covid-19 memang dirasakan oleh siapa pun, terutama dunia usaha. Secara makro, menurut Hendri, Indonesia mengalami pertumbuhan negatif, tapi bukan yang terdalam kalau dibandingkan dengan negara-negara lain.

“Saya pikir, ini tidak perlu kita diskusikan karena semua negara mengalaminya. Dalam situasi covid-19, ini wajar. Yang penting kita punya peluang untuk mengoptimalkan perekonomian kita sehingga pertumbuhan negatifnya tidak semakin dalam,” ujar Hendri.

Disebutkan, kita memiliki struktur ekonomi yang berbeda dari negara-negara lain. Ia menunjuk Singapura yang pertumbuhannya -13%. Bagi Singapura, ini sesuatu yang wajar karena mereka tidak punya *market* domestik dalam jumlah besar. Mereka tergantung dari orang luar.

Ekonomi Indonesia, menurut Hendri, adalah ekonomi tradisional karena sampai sekarang konsumsi rumah tangganya masih sekitar 58%. “Jadi apabila kita masih makan tiga kali sehari, masih bisa jajan, ekonomi kita masih akan tumbuh dan punya kekuatan yang cukup.”

Ke depan, Hendri mengingatkan, selain harus melanjutkan BLT, pemerintah juga harus menyiapkan program-program yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja. Pasalnya, banyak warga masyarakat yang daya belinya sudah menurun.

Untuk bantuan sosial, pemerintah menyiapkan anggaran yang sangat besar, Rp700 triliun. Pertanyaannya, kata Hendri, berapa triliun dari dana itu yang akan menjadi *active market* bagi produk-produk dalam negeri.

Komite yang dibentuk Presiden Jokowi harus bisa memastikan bahwa uang yang tidak sedikit itu bisa pula mendorong ekonomi domestik. Hendri menyarankan paket sembako yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebaiknya juga berisi produk-produk lokal, jangan hanya produk bahan makanan dari pabrikan besar. Bisa diganti dengan bahan makanan olahan UMKM yang ada di daerah. “Sehingga stimulus yang sudah didanai oleh pemerintah dengan dana yang tidak murah tadi memberikan *multiplier effect* lebih baik bagi ekonomi kita,” pungkas Hendri. ■



Kita arahkan mereka untuk mengenal ekonomi digital dan berjualan secara *online* karena selama pandemi covid-19 tidak bisa berjualan lagi seperti biasanya.”

Berly Martawardaya
Direktur Eksekutif Indef

6 Memaklumi Pertumbuhan Ekonomi Negatif

NAMUN, bagi Berly Martawardaya, Direktur Eksekutif Indef yang juga dosen Universitas Indonesia, menurunnya pertumbuhan ekonomi tidak perlu dikhawatirkan

“Walaupun ekonomi mengalami penurunan, itu tidak terlalu mengkhawatirkan karena kasusnya adalah pandemi covid-19. Kalau pandeminya lewat, pasti akan naik lagi,” kata Berly.

Berly justru khawatir kalau pemerintah terlalu mengkhawatirkan resesi sehingga mengakibatkan respons yang tidak diharapkan. Kita pernah mengalami pertumbuhan -13%, tapi kita bisa *survive*. Tapi kalau respons kita salah terhadap fenomena covid-19, akan berdampak buruk pada sektor kesehatan karena ini menyangkut nyawa. Jika ini yang terjadi maka dampaknya ke ekonomi akan lebih buruk.

Dalam situasi seperti ini, seperti yang juga dialami negara-

negara lain, menurut Berly, wajar jika pertumbuhan ekonomi negatif. Yang perlu dilakukan kalau memang kita mengalami krisis ialah krisisnya seperti apa sehingga kita juga bisa mengambil langkah seperti apa memulihkannya.

Kasus covid-19 di Indonesia masih terus bergerak naik. Berly menjelaskan, jika ini menjadi krisis, kita harus bandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya, yaitu krismon (krisis moneter) yang melanda Asia pada 1998. Indonesia termasuk parah karena dibarengi dengan masalah internal terkait dengan sosial politik.

Lalu ada Sub-prime Global 2008-2009 yang sumber penyebabnya eksternal dari negara Amerika dan Eropa. Adapun yang sekarang ialah pandemi covid-19 yang sumbernya dari internal dan eksternal.

Berly mengatakan kurang setuju jika upaya untuk melakukan *recovery* dengan cara *pro-growth* dan *pro-job*. “Saya mengusulkan lebih baik pemerintah melakukan pendekatan secara *pro-poor*. Saya bukannya anti kepada *growth*. Saya juga tidak anti terhadap *pro-job*. Sebaiknya kita fokus dulu ke *pro-poor*.”

Sampai 2022, menurut Berly, yang penting kita bisa *survive* dulu. Ya, bertahan. Konkretnya, buat apa ekonomi kita tumbuh kalau kita tidak pro terhadap rakyat miskin.

Pemerintah harus fokus ke masyarakat miskin dan rentan akibat terdampak pandemi covid-19. Lalu fokus ke *lower middle income* dan kemudian ke pekerja yang *high risk* termasuk yang bekerja di sektor informal.

Kita arahkan mereka untuk mengenal ekonomi digital dan berjualan secara *online* karena selama pandemi covid-19 tidak bisa berjualan lagi seperti biasanya. “Kebetulan *e-commerce* kita sudah lumayan aktif. Jadi doronglah UKM-UKM yang masih tradisional untuk masuk ke *digital market*,” kata Berly.

Terhadap mereka yang selama ini bekerja dengan risiko tinggi terinfeksi covid-19, tambah Berly, memang tidak bisa dipaksa harus bekerja. Tidak bisa tidak harus dirumahkan dulu dan di-*support* dengan bansos untuk beberapa bulan ke depan. “Sambil menunggu, kita dorong hingga *skill*-nya meningkat dalam hal digitalisasi dan transformasi ekonomi.”

Agar bansos tepat sasaran, Berly menyarankan, data penerima bantuan sosial harus diperbarui. Jika datanya tidak akurat, bantuan sebanyak apa pun akan menjadi sia-sia. “Pada tahun ini pemerintah sebaiknya fokus meng-*update* data sehingga ke depan pembagian bansos sudah dengan data yang akurat.” ■



Kita harus memperkuat kosumsinya, juga industrinya. UMKM harus diberikan semangat, bukan hanya diberikan modal. Yang penting dagangannya laku dan tetap bisa bekerja.”

Dianta Sebayang

Ketua Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis LPPM,
Universitas Negeri Jakarta

7

Bukan Tanda-Tanda Kiamat

RESESI memang menjadi bayang-bayang yang menakutkan jika pandemi covid-19 terus berkepanjangan. Pasalnya, menurut Dianta Sebayang, Ketua Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis LPPM, Universitas Negeri Jakarta, kita saat ini masih berada di era covid-19 gelombang pertama, padahal masih ada gelombang-gelombang berikutnya.

Dianta Sebayang mengatakan, belakangan kita kerap mendengar bahwa kita saat ini telah melewati gelombang pertama. Padahal, kenyataannya, belum ada satu negara pun yang melewati gelombang pertama. “Seluruh dunia masih berada di wilayah gelombang pertama,” tegasnya.

Covid-19 telah menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada satu wilayah pun yang bisa selamat dari wabah itu jika yang lain tidak selamat. Tiongkok disebut telah selamat dari covid, ternyata be-

lakangan negara itu disambangi covid ‘impor’.

Pasien covid-19 di dunia kini sudah tembus angka 20 juta. Di Indonesia, pemerintah sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengeliminasi penyebaran virus tersebut. Namun, bahwa kita harus siap-siap masuk dalam *new normal* untuk menghadapi covid-19 sudah disuarakan.

Banyak negara di dunia pernah mengalami resesi. Akan tetapi, Dianta mengingatkan, “Kita jangan terlalu khawatir dengan resesi sebab pada 1932 dunia pernah dilanda resesi dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara rata-rata -17,6%.”

Pada tahun 1945, di saat Perang Dunia II, resesi bahkan menyebabkan pertumbuhan -15,4%. “Jadi kalau sekarang ini resesi dunia menyebabkan pertumbuhan ekonomi -6,2%, ini bukan tanda-tanda kiamat. Ini adalah kondisi yang pada akhirnya, suka tidak suka, harus kita terima,” kata Dianta.

Dianta menjelaskan, struktur dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia berdasarkan lapangan usaha ialah di sektor pertanian dan perdagangan. Kedua sektor itu menyumbang sekitar 17% untuk PDB Indonesia.

Dikaitkan dengan ketenagakerjaan, berdasarkan data 2020, sebanyak 61,76% penduduk Indonesia bekerja di sektor-sektor tersebut. Berdasarkan data terbaru dari BPS, ternyata 38,81% penduduk Indonesia bekerja di sektor yang tidak mengalami penurunan pertumbuhan.

Akan tetapi, di sisi lain ada sekitar 62% penduduk yang beker-



MI/ADAM DWI

Warga mengunjungi Taman Margasatwa Ragunan yang mulai beroperasi di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi, di Jakarta, Sabtu (20/6/2020). Warga bisa mengunjungi Ragunan dengan membeli tiket secara *online* atau menunjukkan KTP Jakarta pada jam operasional pukul 08.00-13.00 WIB dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Penerapan PSBB transisi sedikit banyak mulai menggerakkan roda perekonomian setelah para pelaku industri pariwisata dan UMKM benar-benar dibatasi oleh kebijakan yang diberlakukan sebelumnya.

ja di sektor-sektor lain yang berpotensi mengalami penurunan pertumbuhan. Dalam situasi pandemi covid-19, kata Dianta, “Jangan-jangan ada yang terkena PHK, dan ini menjadi tantangan buat kita semua.”

Dianta mengingatkan, yang perlu menjadi perhatian ialah

UMKM sebab mayoritas unit usaha di Indonesia sesungguhnya bukan usaha besar yang cuma 0,1%, melainkan usaha mikro, kecil, dan menengah (99,9%). Dari yang 99,9%, sekitar 98,68% ialah usaha mikro. Yang paling banyak menyerap angkatan kerja ialah usaha mikro (89%), sedangkan usaha besar hanya 3%.

Jadi, dunia usaha yang menyerap tenaga kerja itu yang harus kita jaga. Dianta mengatakan, memberikan bansos dalam situasi seperti saat ini memang baik. “Tetapi saya yakin, kalau penerima bansos diberikan pilihan antara bekerja atau diberi makan, mereka pasti akan memilih untuk memiliki pekerjaan tetap dan pada akhirnya bisa lebih berdaya.”

Dianta mengungkapkan, omzet pelaku UMKM tidak kecil, per tahun bisa mencapai Rp300 juta. Oleh sebab itu, dalam situasi seperti ini, UMKM harus diprioritaskan untuk diselamatkan. Pada 1998, UMKM terbukti telah menyelamatkan perekonomian Indonesia.

Penerapan PSBB, menurut Dianta, jauh lebih baik daripada *lockdown* total. Dalam bulan puasa, banyak pelaku UMKM terutama mikro yang berjualan makanan kecil untuk konsumsi buka puasa atau sahur. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jika mereka sama sekali tidak boleh beraktivitas dan hanya tinggal di rumah tanpa kegiatan sama sekali.

Pemberlakuan PSBB disebut Dianta sebagai keputusan yang bijak sehingga para pedagang kecil masih bisa menjalankan usaha meskipun omzet menurun. Ekonomi dan kesehatan harus ber-

jalan beriringan.

Dianta mengungkapkan, 56% masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal. Kalau mereka mengurung diri di rumah selama tiga bulan, lalu siapa yang akan memberi makan kepada mereka karena tidak ada pemasukan sama sekali.

Ia tak memungkiri, pandemi covid-19 yang diikuti dengan berbagai kebijakan seperti PSBB memang membuat sebagian besar warga masyarakat kehilangan pekerjaan atau pendapatan.

Namun, dalam suasana seperti itu, banyak anggota masyarakat yang kemudian sadar akan kesehatan dengan bersepeda. Jual beli sepeda pun laris. Dianta meragukan apakah resesi menghampiri Indonesia?

“Indonesia katanya di ambang resesi, tapi masyarakat memborong sepeda Brompton. Ini membuktikan sesungguhnya masyarakat kita masih memiliki kemampuan untuk membelanjakan uangnya,” kata Dianta.

Ke depan, menurut Dianta, kita memang harus melakukan transformasi. Saat ini adalah kesempatan untuk melakukan itu. Kita perlu dorong agar para pelaku UMKM berjualan secara *online*.

Dianta menambahkan, kita perlu mencontoh Zara yang punya 1.200 toko, yang sekitar 10% dari tokonya di dunia akan ditutup. Yang menarik, para karyawan Zara tidak dipecat, tetapi dialihkan sebagai staf pemasaran produk melalui penjualan daring.

Hasilnya? Zara mengalami laju pertumbuhan positif. Data



MIADAM DWI

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bersama anggota Komunitas Perempuan Tangguh Indonesia (PTI) dan peserta Pelatihan Wirausaha Berbasis Kuliner, saat penutupan pelatihan tersebut di Jakarta, Sabtu (5/9/2020). Pemerintah perlu memberikan perhatian kepada UMKM sebab mayoritas unit usaha di Indonesia sesungguhnya bukan usaha besar yang cuma 0,1%, melainkan usaha mikro, kecil, dan menengah (99,9%).

dari Alvara, ternyata masyarakat kita (70%) sudah berbelanja secara *online* meskipun sebagian besar masih coba-coba.

Dianta mengatakan, potensi belanja secara *online* masyarakat Indonesia masih tinggi. Dia memperkirakan fenomena ini akan

berlanjut selamanya.

Dianta menyatakan sependapat dengan Enggartiasto bahwa kita harus fokus pada perekonomian domestik. “Kita harus memperkuat kosumsinya, juga industrinya. UMKM harus diberikan semangat, bukan hanya diberikan modal. Yang penting dagangannya laku dan tetap bisa bekerja. Faktanya selama ini mereka tidak memiliki ketergantungan kepada siapa pun, harus tetap mandiri,” ungkap Dianta. ■



Ingat, 60%
pertumbuhan ekonomi
Indonesia ditopang
oleh konsumsi. Oleh
sebab itu, yang harus
diperbaiki ialah
konsumsi.”

Suryopratomo
Wartawan Senior

8 Jangan Membayangkan yang Suram-Suram

WARTAWAN senior anggota Dewan Redaksi Media Group Suryopratomo yang akrab disapa Tommy selaku penanggung diskusi berpendapat, yang perlu dipikirkan sekarang ialah bagaimana menghindarkan pertumbuhan ekonomi kita negatif pada kuartal ketiga 2020.

Hal itu perlu dilakukan, sebab menurut Tommy, pada kuartal pertama terjadi perlambatan, sedangkan di kuartal kedua kita mengalami kontraksi.

Tommy menjelaskan, ada dua pendekatan (teori) mengenai resesi. Pertama, sebuah negara masuk dalam resesi jika terjadi kontraksi dua kuartal berturut-turut. Kedua, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan memunculkan kontraksi tiga kuartal berturut-turut.

Inggris, menurut Tommy, menggunakan kriteria yang perta-



M/BARY FATAHILAH

Petugas memindahkan dan menata logistik bantuan sosial (bansos) untuk didistribusikan kepada warga di Kantor Pos Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin (27/4/2020). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bansos senilai Rp500 ribu berupa sembako dan uang tunai Rp150 ribu bagi warga yang berpenghasilan rendah dan termasuk miskin baru akibat pandemi covid-19, khususnya di zona merah persebaran yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi. Sayangnya, bantuan sembako menjadi tidak efektif karena tidak menggerakkan ekonomi di daerah lantaran semua didatangkan dari pusat.

ma. Terkait dengan situasi covid-19, Presiden Joko Widodo hanya mengingatkan jangan sampai pada kuartal ketiga 2020 terjadi kontraksi lagi. Yang perlu dipikirkan, kata Tommy, ialah bagaimana mencari resep agar tidak terjadi kontraksi pada kuartal ketiga?

Tommy berpandangan, ekonomi dengan segala dinamikanya hanya persepsi. Kalau persepsi kita mengatakan bahwa masa

depan kita akan *gloomy* (muram) maka ekonomi kita pasti akan *gloomy*. Tetapi sebaliknya, kalau ke depan kita menggambarkan ekonomi kita akan diwarnai dengan optimisme maka masyarakat dalam sebuah negara akan bergerak mengisi setiap *opportunity* (peluang) yang ada di depan.

Yang menjadi masalah sekarang ini, kata Tommy, ada persepsi yang menyebut covid-19 akan membawa kesuraman. Ada yang menyebut dalam waktu dekat jumlah orang yang terpapar covid-19 akan mencapai 2,5 juta orang. Bahkan ada ahli epidemiologi yang mengatakan 250 ribu orang Indonesia akan meninggal, bergeletakan di jalan.

“Menurut saya, ini adalah persepsi yang sama sekali tidak membantu kita untuk mencari jalan keluar dari situasi seperti sekarang ini. Apalagi media di sini juga menganggap apa yang diberitakan oleh media asing sebagai sesuatu yang paling benar. Sama sekali tidak memberikan gambaran bahwa di depan itu ada *opportunity*,” ujar Tommy.

Kalau kita ingin keluar dari situasi resesi, menurut Tommy, sebaiknya kita tidak membangun persepsi negatif. “Ini menurut saya salah satu resep yang mesti kita bangun. Apa *opportunity* Indonesia ke depan agar kita bisa keluar dari krisis? Inilah yang harus terus-menerus kita sampaikan. Apa kelebihan-kelebihan yang kita miliki?”

Tommy menambahkan, pertumbuhan adalah agregat dari konsumsi, ditambah dengan belanja pemerintah, ditambah in-

vestasi, ditambah ekspor, dikurangi impor.

Sekarang yang menjadi persoalan di Indonesia, imbuh Tommy, kalau kita mau dorong kontraksi kita yang -5,32% tereliminasi, kita harus bisa tumbuh minimal 5,32% supaya kemudian ekonomi kita berada di titik 0.

Lalu, di mana potensi dan kekuatan Indonesia? Ingat, 60% pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi. Oleh sebab itu, yang harus diperbaiki ialah konsumsi.

Langkah yang dilakukan pemerintah untuk memberikan BLT, disebut Tommy, sebagai langkah yang paling utama untuk menghindari terjadinya penurunan konsumsi. “Sekarang yang harus kita jaga ialah bagaimana agar BLT tepat sasaran.”

Tommy mengkritik pada mulanya BLT diberikan dalam bentuk sembako. Ia menyebut bantuan sembako ini tidak menggerakkan ekonomi di daerah karena semua didatangkan dari pusat. “Ke depan, BLT sebaiknya diberikan dalam bentuk uang tunai. Biar kan masyarakat memakai uang tunai itu untuk berbelanja. Yang harus dijaga, jangan dibelikan untuk barang-barang impor. Harus untuk membeli barang produksi dalam negeri.”

Tommy menjelaskan, dalam situasi seperti saat ini, jangan berharap ada investasi dalam arti orang mau menanamkan modal di Indonesia. Ya, jangan berharap dalam tiga tahun ke depan orang akan berinvestasi.

Yang harus dijaga ialah bagaimana agar ekonomi kita bisa terus bergerak? Produksi bisa terus berjalan. Tommy menegaskan,

kita harus kawal agar ekspor dipermudah. Impor bahan baku, impor bahan penolong juga dipermudah.

Yang harus pula kita awasi, kata Tommy, ialah pelaksanaan BLT dan bagaimana agar dunia usaha tetap memproduksi barang dan jasa sehingga orang masih punya pekerjaan.

Pun, yang tidak kalah penting, menurut Tommy, ialah belanja pemerintah. Bayangkan, sekarang ini ada Rp1.800 triliun dana pemerintah yang tidak bisa dipakai. Dana stimulus yang disiapkan Rp690 triliun juga belum sepenuhnya terpakai. “Bayangkan jika Rp1.800 triliun itu dipakai, ini akan menggerakkan ekonomi yang sangat luar biasa. *Multiplier effect*-nya akan sangat luar biasa.”

Kita memang dibayang-bayangi resesi. Meski demikian, tegas Tommy, resesi bukan kiamat. Yang kita perlukan ialah bagaimana membangun persepsi masyarakat bahwa ini bukan kiamat. “Kalau kita menggambarkan terus bahwa situasi saat ini membuat kita tidak berdaya maka kita akan tidak berdaya, dan ujung-ujungnya kita akan ambruk.” ■



Pandemi covid-19
 sesungguhnya
 merupakan peringatan
 kepada kita untuk
 mengubah cara hidup
 kita, termasuk cara
 hidup sebagai *homo
 economicus* atau *homo
 faber*.”

Usman Kansong

Ketua Dewan Redaksi Media Group

9 Jangan Pesimistis, Samakan Persepsi

SENADA dengan Suryopratomo, Ketua Komisi Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia, Azrul Tanjung, mengatakan bahwa kita jangan pesimistis menghadapi situasi yang kini tengah dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia.

“Kita harus menyamakan persepsi bahwa apa yang kita hadapi saat ini bisa kita lalui. Pasti ada jalan yang bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi atau potensi yang dimiliki oleh bangsa ini,” kata Azrul.

Ia menjelaskan, kita memiliki keunggulan komparatif yang bisa dijadikan sebagai alternatif solusi dalam menghadapi ancaman resesi. “Saya kira kondisi yang kita hadapi sekarang tidak separah resesi dunia yang terjadi pada 1930. Faktanya sekarang, banyak hal yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain, tapi kita memilikinya.”

Azrul juga mengingatkan bahwa kita jangan larut dalam isu-isu politik dan SARA yang sekarang ini terus bergulir dan membuat kita tidak bisa berpikir sehat. “Kita juga jangan terjebak bahwa ekonomi kita terselamatkan karena UMKM kita terlalu besar,” katanya.

Berbeda dengan para pembicara sebelumnya, Azrul mengatakan, persepsi terhadap UMKM sebagai penyelamat ekonomi harus kita geser. UMKM kita, posisi yang paling besar ialah usaha mikro. “Usaha mikro bukan pilihan para pelaku ekonomi,” ujarnya.

Menurut Azrul, posisi pelaku usaha kita sekarang ini bentuknya seperti piramid, yang paling besar (usaha mikro) berada di paling bawah. Yang perlu kita upayakan ke depan ialah melakukan penguatan-penguatan pada usaha mikro sehingga bentuknya tidak lagi piramid, tapi belah ketupat.

Azrul mengatakan, Indonesia punya keunggulan ketimbang negara-negara lain, terutama di sektor pertanian. Ke depan, selayaknya sektor itu kita perkuat. Apalagi sektor pertanian menampung banyak tenaga kerja, sekitar 27,33%.

Azrul mengungkapkan, ia pernah mendampingi teman-temannya di Desa Pelaga, Bali. Mereka memiliki kebun kopi yang bagus, tapi sayangnya tidak memiliki nilai komersial yang tinggi. Pasalnya, selama ini mereka menjual hasil kebun saat kopi masih berada di atas pohon.

“Kita bisa bayangkan berapa harganya kalau mereka menjual

kopi yang masih ada di pohon? Ironisnya ini dilakukan sudah berpuluh-puluh tahun lalu,” ungkap Azrul.

Masalah lain yang dihadapi para petani ialah kesulitan mendapat bibit yang baik, atau walaupun mendapat bibit, di saat yang tidak tepat, seperti musim tanam sudah lewat, bibit baru datang. “Bahkan ada yang lebih miris, mereka pernah mendapat bibit kacang yang sudah tidak bisa ditanam,” tambah Azrul.

Azrul menyatakan setuju dengan program BLT. Namun sayang, kata dia, dana yang diterima melalui program itu hanya untuk sesaat dan tidak bisa dipakai untuk hal-hal produktif.

Saat memberikan *closing statement* dalam Diskusi Denpasar 12, Direktur Pemberitaan *Media Indonesia* Usman Kansong mengatakan, pandemi covid-19 menghantam hampir semua negara. Namun, reaksi dan kondisi yang muncul di setiap negara berbeda-beda.

Usman mengingatkan, kita pun punya pasar yang besar di dalam negeri. Itu artinya ekonomi kita tidak sepenuhnya bergantung pada ekonomi global atau ekonomi antarnegara. Posisi seperti ini merupakan peluang bagi kita untuk memulihkan ekonomi.

Diakui, kelas menengah kita sekarang memang *wait and see*. Ada dua hal yang membuat mereka menunggu dan melihat situasi. Pertama, mereka lebih mengkhawatirkan masalah kesehatan. Mereka khawatir pergi ke mal untuk belanja karena belum ada jaminan bahwa mereka akan aman dari terjangkit covid-19.

Kedua, mereka masih berpikir ulang kalau ingin membelan-

jakan uangnya karena belum tahu kapan resesi akan berakhir. “Jadi lebih bagus dia *keep* uangnya, *cash is the king*, kira-kira begitu sampai nanti mereka merasa aman untuk berbelanja,” kata Usman.

Dia melanjutkan, kita, khususnya pemerintah harus memastikan dan membangun optimisme bahwa resesi bukanlah kiamat. “Pemerintah juga harus membangun optimisme dari sisi kesehatan bahwa protokol kesehatan akan dipatuhi oleh masyarakat.”

Terkait dengan protokol kesehatan, pemerintah sudah mengeluarkan perpres soal penegakan hukum. Usman mengatakan, ini sebenarnya bagian dari upaya menjamin keamanan masyarakat, terutama kelas menengah, supaya mereka mau membelanjakan uangnya.

Resep lain untuk memulihkan perekonomian, menurut Usman, tentu saja menarik investasi untuk menyerap tenaga kerja. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam tiga bulan pertama sudah mendatangkan investasi Rp210,7 triliun.

Tujuh perusahaan asing juga sudah berniat merelokasi investasinya ke Indonesia. Namun, itu semua baru komitmen, belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Artinya, kata Usman, penyerapan tenaga kerja belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat, masih butuh waktu.

Usman menambahkan, resep lain untuk mengurangi tingkat kedalaman resesi ialah *social safety net*. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari bantuan sosial, BLT, relax-

sasi berbagai kewajiban, kemudahan pembayaran pajak, listrik, cicilan, dan lain-lain. Ini semua resep untuk mengurangi tingkat keparahan resesi ekonomi.

Menurut Usman, ada dua hal yang perlu dilakukan supaya pemulihan resesi tidak terlalu lama. Pertama, kerja sama global dalam menemukan vaksin. Sekarang kerja sama itu sedang berlangsung, bahkan ada kompetisi.

Kedua, kerja sama dalam pemulihan ekonomi. Biasanya Amerika Serikat yang mengambil inisiatif sebagai pemimpin global. Akan tetapi, belakangan ini Amerika tidak bisa mengambil posisi tersebut karena dominasi mereka sudah berkurang. Ada aktor baru yakni Tiongkok.

Lalu, apa yang akan kita lakukan setelah pandemi covid-19 berakhir? Menurut Usman, kita harus merumuskan model atau cara apa pun dalam konteks ekonomi. “Pandemi covid-19 sesungguhnya merupakan peringatan kepada kita untuk mengubah cara hidup kita, termasuk cara hidup sebagai *homo economicus* atau *homo faber*.”

Konkretnya, kita harus melakukan ekonomi yang *pro-environment* karena kalau kita lihat sejarah, berbagai pandemi yang terjadi di banyak negara berawal dari persoalan lingkungan. “Karena itu, ekonomi yang *pro-environment* perlu kita rumuskan seperti apa ke depan,” kata Usman seraya memberikan contoh, dalam dunia pariwisata, kita mestinya beralih dari turisme massal menjadi *quality tourism*. ■

Kesiapan Sektor Ekonomi Pascapandemi



1 Latar Belakang: Saat Kasus Positif Covid-19 Cenderung Menurun

BERBAGAI kemajuan dalam penanganan covid-19 mulai terlihat. Ini terjadi berkat kerja sama yang erat seluruh elemen masyarakat. Saat puncak gelombang pandemi varian delta pada Juli 2021, kasus positif covid-19 tercatat mencapai 12,48%. Kini, persentase itu terus menurun di angka 1,55% pada 18 September 2021.

Tekanan terhadap sistem kesehatan nasional berangsur jauh berkurang. Ini tecermin dari angka penurunan *bed occupancy rate* (BOR) nasional menjadi 12% atau turun sebesar 63% dari angka BOR 3 Juli 2021 yang sebesar 75%.

Vaksinasi nasional juga menunjukkan kemajuan berarti dengan sudah tervaksinasinya 44,7 juta jiwa (2 dosis) dari target



MIRAMDANI

Pekerja melakukan bongkar muat kelapa sawit untuk diproses menjadi minyak sawit mentah (CPO) di Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) Buatani I, Asian Agri, Siak, Riau, Rabu (10/5/2023). Pertumbuhan minyak sawit mentah sempat mengalami pasang surut akibat pemberlakuan aturan-aturan baru oleh pemerintah terkait dengan pandemi covid-19.

208 juta jiwa penduduk. Pencapaian ini bukan berarti kita boleh memperlonggar disiplin protokol kesehatan dan antisipasi terhadap ancaman varian baru. Kita juga tidak boleh mengendurkan target mencapai *herd immunity* lewat vaksinasi nasional.

Di tengah tingkat ketidakpastian yang masih tinggi, optimisme pemulihan ekonomi nasional harus terus dijaga. Sebagai bangsa, kita harus mampu belajar dari pengalaman selama penanganan pandemi covid-19.

Di awal 2021, kita sempat berharap banyak dengan sinyal

pemulihan ekonomi. Ini dapat terlihat dari *purchasing managers index* (PMI) manufaktur global yang berada pada zona ekspansif.

Indikasi pemulihan ekonomi juga terlihat dari kenaikan harga komoditas, seperti minyak mentah, CPO, dan batu bara, yang terjadi akibat meningkatnya permintaan global. Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Di kuartal kedua 2021, kita mampu tumbuh 7,07% dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52% (YoY).

Namun, munculnya varian baru pada paruh kedua 2021 memicu kenaikan kasus positif covid-19 dan kematian harian di negara berkembang, khususnya Indonesia, yang mendorong pengetatan kembali aktivitas masyarakat.

Dinamika pandemi covid-19 inilah yang akan menjadi *downside risk* dan berpotensi menahan laju pemulihan perekonomian pada semester II 2021.

Pelajaran terpenting dari episode puncak kedua pandemi varian delta ialah kita tidak boleh sedikit pun melonggarkan kewaspadaan terhadap virus ini.

Dalam nota keuangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2021, pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,0%-5,5%. Untuk mencapai proyeksi ke arah tersebut, sisa tahun berjalan 2021 menjadi penting dalam mempersiapkan perbaikan pemulihan ekonomi nasional.

Pertanyaan yang perlu kita jawab ialah sampai sejauh mana kesiapan sektor ekonomi jika pandemi covid-19 berakhir? ■



Berkat kerja kita bersama, kerja para pemimpin negeri yang bergandeng tangan mengedepankan nilai gotong royong, maka kondisi kita kini berangsur-angsur pulih.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 ‘Kita Berada dalam Situasi Luar Biasa’

WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyebut penyebaran covid-19 yang sempat memuncak pada pertengahan 2021 lalu sebagai sebuah krisis.

“Satu setengah tahun kita merasakan betul betapa imbas yang terjadi bukan hanya di sisi sektor kesehatan, melainkan juga ekonomi dan kesehatan jiwa warga masyarakat yang membawa problematika tersendiri,” kata Lestari, yang biasa disapa Rerie, saat mengantarkan diskusi bertajuk Kesiapan Sektor Ekonomi Pascapandemi dalam Forum Diskusi Denpasar 12 secara daring, Rabu, 22 September 2021.

Rerie mengatakan, krisis yang terjadi saat itu, kalau kita berbicara dalam konteks ekonomi, sudah menimbulkan berbagai kondisi yang membuat kita waswas.

Konkretnya, menurut Rerie, kita sempat lumpuh atau setidaknya kita berhadapan pada situasi yang tidak bisa kita sebut se-

bagai situasi normal atau biasa-biasa saja.

Rerie mengungkapkan, berkat kerja kita bersama, kerja para pemimpin negeri yang bergandeng tangan mengedepankan nilai gotong royong, maka kondisi kita kini berangsur-angsur pulih.

Namun, Rerie mengingatkan, situasi yang telah membaik itu bukan berarti kita sudah selesai atau terbebas dari masalah.

Di lapangan, ada beberapa program yang sudah menunjukkan kemajuan, seperti vaksinasi. Akan tetapi, itu belum bisa untuk menyelesaikan semua masalah sebab masih jauh dari target yang ditetapkan kalau kita ingin mengejar *herd immunity*.

Pada sektor ekonomi, IMF pun belum bisa memberikan proyeksi ataupun prediksi yang cukup menggembirakan meskipun Presiden Joko Widodo optimistis ekonomi kita akan terus bergerak ke arah positif.

Rerie kemudian mengajukan pertanyaan, bagaimana kita harus melangkah? Apa yang kita inginkan? Apa yang menjadi harapan dan akan dilakukan pemerintah? Apa realitas sesungguhnya yang terjadi saat ini? Bagaimana setelah ini, apakah kondisi saat ini sudah bisa disebut dengan pascapandemi?

Rerie sendiri berpendapat bahwa krisis belum selesai. Masalahnya kemudian, “Bagaimana kita memperpendek jarak antara harapan dan kenyataan serta kesadaran untuk kemudian menerima situasi kenormalan baru?”

Menurut Rerie, seharusnya kita bisa menerapkan dan menindaklanjuti hidup dalam kenormalan baru sehingga mempercepat

pemulihan ekonomi kita.

Dalam pemulihan ekonomi, menurut Rerie, yang harus diperhatikan tidak hanya skala makro, tapi juga mikro. Pelaku usaha dan pelaku ekonomi dari berbagai kalangan, termasuk sektor informal pun harus menjadi salah satu target yang harus masuk dalam perencanaan dari para pemangku kepentingan. Apa yang harus kita berikan kepada mereka?

Agar situasi kita cepat pulih, kata Rerie, diperlukan kerja sama lintas sektor. Diperlukan sebuah pemahaman bahwa apa yang kita hadapi sekarang ini adalah situasi yang luar biasa. “Kemampuan kita untuk mencari jalan keluar dari situasi luar biasa ini menjadi sebuah keniscayaan.” ■



Semakin masyarakat mendapat bantuan, baik itu berupa sembako, uang tunai, maupun bansos, maka konsumsi di tengah-tengah masyarakat makin hari makin bagus.”

Fauzi Amro

Anggota Komisi XI DPR RI
dari Fraksi Partai NasDem

3 Aktivitas agar Ekonomi tidak Mati

ANGGOTA Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fauzi Amro, melihat pandemi covid-19 yang menimpa Indonesia dan 180 negara lain memang berdampak sangat luar biasa. Tidak saja di bidang ekonomi dan kesehatan, tapi juga sosial. Kita sudah masuk ke tahun kedua.

Kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit mana yang harus diprioritaskan penanganannya terlebih dahulu, kesehatan atau ekonomi.

Sama-sama dilematis. Pasalnya, menurut Fauzi Amro, dampak situasi saat ini terhadap ekonomi berbeda dengan krisis moneter (krismon) 1998. Saat itu, krisis ekonomi berdampak pada krisis politik.

Di tahun 2000-an ini, saat covid-19 menjalar ke seluruh dunia,



Sejumlah warga mengikuti vaksinasi covid-19 dosis ketiga atau *booster* saat *car free day* (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (19/6/2022). Kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi covid-19 banyak dipuji oleh negara lain karena berdampak pada cepat pulihnya perekonomian Indonesia setelah di tahun pertama, pertumbuhan ekonomi negeri ini jatuh hingga -2,5%.

termasuk Indonesia, muncul krisis kesehatan yang berdampak pada krisis ekonomi.

Namun, dalam suasana seperti itu, kata Fauzi, masyarakat dunia tetap memiliki optimisme bahwa cepat atau lambat pandemi covid-19 akan segera berlalu.

Kita belakangan ini menyaksikan bagaimana Liga Inggris digelar. Piala Eropa berjalan lagi. Orang yang menyaksikan pertan-

dingan sangat banyak dan sebagian besar tidak memakai masker.

Mengapa mereka berani menggelar pertandingan yang mendatangkan kerumunan orang? Fauzi memperkirakan kekebalan *community*-nya sudah terbentuk. “Hampir 80% bahkan 90% masyarakat Eropa, khususnya di Inggris, itu sudah divaksin dan mereka sudah sadar bahwa dengan bervaksin kekebalan kelompok atau *herd immunity* bisa terwujud,” katanya.

Indonesia baru mendapat apresiasi dari perwakilan Bank Dunia bahwa kita sudah memvaksin di atas 100 juta orang. Meski belum tuntas, kata Fauzi, ini sangat luar biasa sebab khusus di Pulau Jawa, DKI Jakarta, dan Bali, vaksinasi dosis pertama bahkan sudah hampir 100% dan akan menuju 70% dosis kedua.

Pascapenerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Jakarta sudah menuju hijau dan masuk level 2. Hanya beberapa provinsi dengan tingkat vaksinasi rendah yang masih masuk level ketiga dan bahkan level keempat.

“Saya mengatakan seperti ini di awal karena saya yakin dan optimistis semakin banyak warga masyarakat yang sadar untuk melakukan vaksinasi sehingga tingkat imunitasnya akan terbentuk dengan sendirinya,” ujar Fauzi.

Seiring dengan itu, roda ekonomi mesti mulai diputar. Fauzi mengingatkan, ekonomi kalau tidak ada konsumsi, tidak ada pergerakan. Kalau tidak bergerak, dia akan mati. “Roda perekonomian kita akan mati ketika konsumsi tidak ada, ketika pergerakan orang tidak ada. Jika manusia tidak beraktivitas maka ekonomi

akan mati,” tegasnya.

Fauzi menunjukkan bukti saat awal-awal covid-19. Di tahun pertama, pertumbuhan ekonomi kita mengalami -2,5%. Namun, lambat laun kita optimistis. Pertumbuhan kita pada kuartal ketiga dan kuartal keempat sudah masuk ke 5%, bahkan menuju 5,2%. “Oleh sebab itu, saya menggarisbawahi komitmen pemerintah yang menganggarkan Rp1.900 triliun dalam APBN untuk belanja negara,” katanya.

Total APBN 2021 secara global Rp2.700 triliun, untuk belanja Rp1.900 triliun. Ada belanja pusat dan belanja daerah. Kurang lebih Rp800 triliun diposkan untuk disalurkan ke daerah.

Realitas itu membuktikan bahwa pemerintah sangat serius mendukung pemulihan dengan melibatkan UMKM melalui konsumsi masyarakat. Menurut Fauzi, parameter pemulihan ekonomi nasional ialah berapa besar dana pusat yang jumlahnya Rp800 triliun digelontorkan ke masyarakat. Dari jumlah itu, hampir 52% digunakan untuk bansos atau perlindungan sosial kepada masyarakat.

“Semakin masyarakat mendapat bantuan, baik itu berupa sembako, uang tunai, maupun bansos, maka konsumsi di tengah-tengah masyarakat makin hari makin bagus,” ujar Fauzi.

Ia menambahkan, untuk menggerakkan perekonomian dan konsumsi masyarakat, UMKM memang harus diprioritaskan. Jika melihat pengalaman pada 1998 dan 2020, pertahanan ekonomi yang paling diandalkan ialah bagaimana agar UMKM tetap eksis.



MIMOH IRFAN

Peserta melayani pembeli dalam Bazar UMKM untuk Indonesia di Gedung Sarinah, Jakarta, Kamis (26/1/2023). Untuk menggerakkan perekonomian dan konsumsi masyarakat, UMKM menjadi prioritas. Berkaca pada pengalaman 1998 dan 2020, pertahanan ekonomi yang paling diandalkan ialah bagaimana agar UMKM tetap eksis.

Sampai saat ini, kata Fauzi, kita tidak tahu *the real* UMKM kita ada berapa jumlahnya. Berapa pun jumlah UMKM, mulai saat ini sistem digitalisasi UMKM sudah saatnya dilakukan, baik kepada objek usaha maupun terhadap orangnya, termasuk

klaster usahanya.

“Ya, usaha UMKM harus diklaster, orangnya juga, begitu pula objeknya. Jika ini dilakukan, akan menciptakan pertumbuhan, akan menciptakan konsumsi, akan menciptakan kemandirian UMKM secara individu maupun kelompok,” tambah Fauzi.

Fauzi optimistis perekonomian Indonesia akan terus tumbuh ke arah positif. Jangan sampai seperti Singapura dan Malaysia yang kewalahan menghadapi covid dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mereka negatif.

Konsekuensinya, protokol kesehatan harus ditaati. Begitu pula vaksinasi. Sekali lagi, jangan sampai kita lengah dan tingkat penularan covid-19 tinggi seperti di Singapura dan Malaysia.

Fauzi menyarankan pemerintah agar membuat *roadmap* atau peta jalan bagaimana kita harus melangkah. Kita memang harus berdampingan dengan covid-19. Ada kecenderungan tingkat penularan covid-19 terus menurun, tapi kita tetap tidak tahu kapan berakhirnya.

Kita boleh optimistis. Kita boleh yakin, “Tapi kapan berakhirnya covid ini, sekali lagi kita belum tahu. Oleh sebab itulah, kita menyarankan kepada pemerintah untuk membuat peta jalan. Bagaimana ke depan covid-19 kita anggap seperti flu atau penyakit menular lainnya,” kata Fauzi.

Jika ada *roadmap*, menurut Fauzi, kita siap dan cepat terkait apa yang harus dilakukan. “Kapan pun ada covid-19, kita siap, paling tidak yang sudah divaksin tenang,” tandas Fauzi. ■



Kita harus berpikir bahwa UMKM yang manual itu harus memiliki sentuhan-sentuhan seni yang bisa menciptakan kreasi-kreasi produk *handmade* yang mampu menembus pasar ekspor.”

Radityo Fajar Arianto
Direktur Sparklabs Incubation
Universitas Pelita Harapan

4 UMKM dan Game Changer Pemulihan Ekonomi

UMKM memang sektor yang perlu diperhatikan untuk memulihkan perekonomian di masa pandemi covid-19. Namun, Direktur Sparklabs Incubation Universitas Pelita Harapan, Radityo Fajar Arianto mengingatkan, kesehatan masyarakat harus diutamakan.

Menurut Radityo, kesehatan akan menjadi *game changer* pemulihan ekonomi. Lalu, seperti apa posisi dan peran UMKM yang diharapkan bisa memulihkan ekonomi?

Sebagai pemerhati UMKM, Radityo menjelaskan, UMKM di Indonesia sudah diatur dalam UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mengacu pada aturan tersebut, usaha mikro adalah usaha yang asetnya kurang dari Rp50 juta. Usaha dengan aset Rp50 juta sampai Rp500 juta termasuk usaha kecil. Kalau asetnya Rp500 juta sampai Rp10 miliar masuk skala usaha menengah. Adapun yang memiliki aset lebih dari Rp10 miliar masuk kategori usaha besar.

Aset yang dimaksud dalam UU No 20/2008 tidak termasuk

tanah dan bangunan atau tempat usaha. Aset yang dimaksud ialah aset lancar, ada uang kasnya, ada piutangnya, juga ada persediaan barang dan jasanya.

Pelaku UMKM juga dapat dilihat dari omzetnya dalam satu tahun. Usaha mikro Rp300 juta, usaha kecil Rp300 juta sampai Rp2,5 miliar, usaha menengah Rp2,5 miliar sampai Rp50 miliar, dan usaha besar lebih dari Rp50 miliar.

Di dalam undang-undang tersebut, menurut Radityo, ada lima hal yang harus dilakukan pemerintah agar UMKM semakin berdaya, termasuk industri atau pelaku usaha besar.

Pertama, pemberdayaan. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menciptakan iklim sedemikian rupa agar dunia usaha semakin mampu mengembangkan usahanya.

Kedua, keberpihakan khususnya kepada usaha mikro dan kecil agar UMKM memiliki kepastian, kesempatan, dan mendapatkan perlindungan dalam berusaha.

Ketiga, pengembangan, yakni upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan melalui pemberian fasilitas bimbingan, pendampingan, perkuatan, dan penumbuhan.

Keempat, memberikan bantuan pembiayaan, termasuk penjaminan. Bagaimana mereka diberikan jaminan kredit sebagai dukungan karena rata-rata UMKM tidak berbadan hukum, khususnya yang mikro.

Kelima, kemitraan kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling me-

merlukan.

Banyak yang mengatakan UMKM kecil, tapi mengapa kontribusinya besar dalam perekonomian kita? Radityo menjelaskan, dari sisi penyerapan tenaga kerja, usaha mikro terbukti mampu menyerap 107,2 juta tenaga kerja atau 89%. Adapun usaha kecil dan usaha menengah masing-masing hanya 4,74% dan 3%.

“Jadi kalau kita gabung mikro, kecil, menengah saja, itu sudah 97%. Jadi kita bisa bayangkan, penduduk Indonesia itu menggantungkan mata pencaharian untuk membiayai keluarga dan sebagainya 97% lewat UMKM,” tandasnya.

Kemudian, para pelaku UMKM itu usahanya apa saja? Radityo memaparkan total ada 62,9 juta unit usaha (99,99%). Jadi kalau kita bicara struktur ekonomi, struktur ekonomi kita itu basisnya ialah UMKM. Untuk usaha besar ada 5.400 unit, yang kalau dipersentasekan hanya 0,01%.

Berapa sumbangan UMKM buat PDB Indonesia? Radityo mengatakan, walaupun jumlah unitnya 99,99% dan menyerap tenaga kerja 97%, persentasenya buat PDB hanya 60%. Kalau diuangkan Rp13.600 triliun. Dari jumlah itu, Rp5.000 triliun disumbang oleh usaha mikro yang jumlahnya ada 1.300 usaha kecil dan Rp1.800 triliun dari usaha menengah. Adapun usaha besar, yang 0,01% tadi, mereka menyumbang Rp5.400 triliun.

Banyak di antara kita yang bertanya berapa pendapatan pelaku usaha mikro setiap harinya? Menurut Radityo, rata-rata per hari mereka memperoleh pendapatan Rp253.000 atau kalau

dipukul rata Rp250.000. Itulah omzet mereka yang diputar setiap hari.

Omzet Rp250.000 ekuivalen 25% dari batas omzet yang tertera dalam UU No 20/2008. Omzet usaha kecil Rp5,4 juta per hari atau sudah hampir mencapai 65% dan usaha menengah Rp99 juta atau 59%. Adapun omzet usaha besar per hari mencapai Rp3,15 miliar. “Itulah kira-kira pendapatan-pendapatan mereka setiap hari,” ujar Radityo.

Jika UMKM diharapkan bisa terus menggerakkan perekonomian nasional di masa pandemi covid-19, lalu tantangannya apa? Radityo menyatakan sependapat dengan Fauzi Amro bahwa Indonesia perlu membuat transformasi digital untuk para pelaku UMKM.

Ia menyebut banyak keuntungannya jika UMKM melakukan transformasi digital meskipun ada juga tantangannya. Namun, yang pasti, lewat digitalisasi kita bisa mengetahui secara rinci perihal data UMKM, ada berapa unit, bagaimana pendapatan mereka, bagaimana transaksinya, dan bagaimana *credit scoring*-nya.

“Semua itu bisa kita peroleh jauh lebih mudah ketika terjadi transformasi digital di UMKM. Tetapi sekaligus menjadi ancaman,” tutur Radityo.

Ancaman yang dimaksud Radityo ialah masyarakat saat ini, terutama yang sudah terbiasa berbelanja secara *online*, selalu membanding-bandingkan harga dan kualitas barang yang sama di toko-toko *online*. Termasuk layanannya. Tampaknya UMKM be-

lum siap dengan hal itu.

Menurut Radityo, masalah yang dihadapi UMKM selama ini ialah terkait dengan *marketing*, produk yang dihasilkan, juga *packaging*-nya. Semua aspek bisnis usaha mikro ini perlu dibenahi. Ini belum kalau kita bicara *quality control*, standarisasi produk, dan memperoleh pasar.

Itu semua menjadi masalah UMKM. Ketika tidak memiliki keunikan, maka UMKM tidak akan mampu bersaing di harga dan kualitas barang. Radityo mengingatkan UMKM harus tahu bahwa saat mereka masuk ke toko *online*, banyak perusahaan besar yang sudah meng-*create* produk.

Memberikan contoh, Radityo menyebutkan produk *hand sanitizer*, misalnya. Untuk memproduksi pembersih tangan ini, banyak perusahaan besar yang membeli mesin-mesin yang menghasilkan barang dengan presisi tinggi tapi menawarkan harga lebih murah.

Tidak demikian dengan UMKM yang memproduksi barang sama tapi dikerjakan secara manual dengan tangan. Kalau mau bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar, tentu akan sangat sulit. Belum lagi ditambah mencari *supplier* juga susah. Lalu kalau mau *packaging*, yang bagus dikenakan minimum order.

Radityo menceritakan, suatu hari ia berkunjung ke Demak dan menemui salah satu pelaku UMKM yang memproduksi kue. Sang pelaku UMKM mengeluhkan soal *packaging*-nya. Untuk membeli *packaging* minimal harus pesan 2.000, satu *packaging* Rp2.000.

Jadi total biaya yang harus dikeluarkan untuk urusan yang satu ini Rp4 juta.

“Uang kas harus saya putar setiap hari untuk membeli bahan pembuat kue. Kalau harus mengeluarkan Rp4 juta untuk *packaging*, ya repot,” kata Radityo mengutip pelaku usaha mikro kue di Demak.

Ia mengatakan, membuat *roadmap* untuk UMKM memang penting, tetapi harus lebih realistis. Pasalnya, kalau mau dipetakan, para pelaku UMKM punya kondisi yang berbeda-beda.

Dalam menghadapi masa pandemi covid-19 seperti saat ini, yang penting bagi pelaku UMKM ialah bagaimana bisa bertahan. “Mereka itu ingin bertahan hidup saja. Tidak ada pikiran untuk melakukan inovasi. Mereka berprinsip pokoknya aku ingin bisa jualan hari ini. Jadi kalau penghasilan mereka rata-rata Rp250 ribu per hari, ya itu yang dikejar, bagaimana hari ini bisa jualan Rp250 ribu,” ujar Radityo.

Ia menambahkan, walaupun pemerintah mau membuat *roadmap* terkait dengan usaha UMKM, sebaiknya dikelompokkan berdasarkan kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang.

Radityo menjelaskan *roadmap* jangka pendek bisa berupa pemberian pelatihan dan bantuan langsung tunai kepada pelaku usaha mikro. Mengapa? Harap maklum, buat pelaku usaha mikro, yang penting bagaimana bisa bertahan hidup karena mereka tidak bisa mengambil kredit bank.

Roadmap jangka menengah khusus untuk memetakan pelaku

usaha kecil yang umumnya sudah punya produk sendiri, punya pasar, dan usahanya sudah berputar. Sebagian di antara mereka juga sudah melakukan digitalisasi. Yang diperlukan mereka saat ini ialah bagaimana bisa mendapatkan akses pendanaan kredit perbankan atau koperasi.

Lalu, bagaimana dengan *roadmap* jangka panjang? Radityo menjelaskan *roadmap* ini diperlukan untuk menghindari *the race to commoditization*. Bagaimana caranya? Kita harus berpikir bahwa UMKM yang manual itu harus memiliki sentuhan-sentuhan seni yang bisa menciptakan kreasi-kreasi produk *handmade* yang mampu menembus pasar ekspor. “Jualannya tidak perlu banyak, tetapi produknya *luxurious*,” jelas Radityo. ■



Kami punya PR untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Ini menjadi tantangan kita semua bahwa *safety and security, health and hygiene, environment sustainability* yang masih rendah harus ditingkatkan.”

Raden Kurleni Ukar

Deputi Bidang Kebijakan Strategis
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

5 Skenario Membangkitkan Industri Pariwisata yang Lumpuh

SERBUAN covid-19 tak urung juga memukul industri pariwisata. Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Raden Kurleni Ukar, mengakui bahwa pandemi covid 19 telah melumpuhkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif beserta seluruh mata rantai industrinya.

Dia berterus terang bahwa kinerja pariwisata dan ekonomi kreatif pada 2020 tidak menggembirakan dan tahun ini pun belum menunjukkan perbaikan walaupun untuk ekonomi kreatif ada secercah harapan.

Menurut Kurleni Ukar, tahun 2021 seharusnya menjadi momentum pemulihan bagi dunia pariwisata dan ekonomi kreatif. “Tetapi saat ini kita menghadapi *disruptive, complexity, ambiguity*, dan *diversity* yang membuat kondisi serba tidak menentu, penuh ketidakpastian, dan tumpang tindih. Perubahan lingkungan strategis mengganggu ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif kita.”

Namun, respons pemerintah terhadap covid-19 dan penanganan yang telah dilakukan berpengaruh positif terhadap peningkatan kunjungan wisata dan devisa bagi negara. “Kita patut bersyukur dengan adanya PPKM yang diterapkan pemerintah, Indonesia berhasil menjadi negara dengan jumlah kasus harian paling rendah di Asia Tenggara. Sementara negara pesaing jumlah kasus hariannya masih relatif lebih tinggi,” kata Kurleni.

Dalam hal vaksinasi, imbuhnya, sebetulnya dari sisi jumlah kita sudah baik. Tetapi dari sisi persentase terhadap jumlah penduduk yang divaksin, kita masih tertinggal dari negara-negara tetangga. Itu menjadi tantangan bagi kita.

Apa pun komposisinya, menurut Kurleni, kondisi ini membawa harapan bahwa industri pariwisata bisa segera pulih. Kita lihat mobilitas penduduk yang menurun tajam sejak PPKM di bulan Juli 2021 mulai mengalami peningkatan. Karena itu, kita perlu mempersiapkan pemulihan pariwisata sesuai dengan perubahan lanskap dan tren pariwisata, di mana pariwisata yang dulu mencari tempat-tempat yang ramai dan viral, sekarang harus memperhatikan *caring capacity* dan *physical distancing*.

Kita memang harus menyesuaikan dengan tuntutan. Dunia wisata Indonesia harus bisa beradaptasi akibat pandemi ini. “Jadi saat ini kita menuju *new tourism*. Ekonomi kita kini ditandai dengan *hygiene, low touch, low mobility, dan less crowd*,” kata Kurleni.

Selain itu, digitalisasi industri pariwisata menjadi sebuah

keniscayaan. Permintaan wisatawan akan *contactless* dan *seamless experience* menuju *quality tourism* harus kita perhatikan dan canangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam kondisi ini, menurut Kurleni, wisatawan Nusantara menjadi fokus dengan tiga model berwisata. Pertama, *staycation* perjalanan pendek dengan mobil atau *roadtrip*. Kedua, wisata *long distance* dengan destinasi yang jauh dari keramaian. Ketiga, wisata berbasis alam seperti *ecotourism*. “Ini yang sedang dan akan kita kembangkan.”

Bagaimana dengan sektor ekonomi kreatif? Kurleni menjelaskan, ada 17 subsektor di mana kuliner, fesyen, dan kriya masih menjadi penyumbang terbesar PDB ekonomi kreatif dengan total kontribusi setiap tahun mencapai kira-kira 70%-75% dari total distribusi ekonomi kreatif.

Subsektor kuliner, disebut Kurleni, rata-rata menyumbang 42%, fesyen 18%, dan kriya 15%, walaupun pada 2020 mengalami pertumbuhan negatif.

Kurleni optimistis pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif kita dapat dipercepat dengan momentum akselerasi transformasi digital yang berlangsung saat ini. “Suka atau tidak suka, ini yang terjadi sebab potensi digital memang luar biasa,” ujarnya.

Dengan memperhatikan berbagai tantangan dan peluang, menurut Kurleni, pihaknya sudah menyusun langkah-langkah pemulihan. Salah satunya meningkatkan kapasitas SDM dengan



MIRAMDANI

Wisatawan menikmati suasana saat matahari terbenam di Pantai Kuta, Bali, Minggu (17/7/2022). Pemerintah perlu mempersiapkan pemulihan pariwisata sesuai dengan perubahan lanskap dan tren pariwisata, bahwa pariwisata yang dulu mencari tempat-tempat ramai dan viral, sekarang harus memperhatikan *caring capacity* dan *physical distancing*.

reskilling dan *upskilling*.

Pemerintah juga melakukan revitalisasi destinasi pariwisata dan infrastruktur ekonomi kreatif, termasuk mengembangkan desa wisata, mengembangkan kabupaten/kota kreatif, meningkatkan *residency* dan daya saing usaha melalui pemberian insentif

dan memfasilitasi akses permodalan, menstandarisasi usaha, lalu melakukan inovasi produk jasa pariwisata maupun ekonomi kreatif.

Langkah lain yang diambil ialah pemulihan dan perluasan pasar, antara lain dengan gerakan bangga berwisata di Indonesia saja, bangga buatan Indonesia, dan membeli produk kreatif lokal.

Kemendagri juga aktif mendorong akselerasi vaksinasi. Ini dilakukan, kata Kurleni, karena merupakan salah satu *game changer* yang bisa memulihkan pariwisata. Demikian pula dengan sertifikasi CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment-Sustainability*).

Di samping itu, Kemendagri juga meluncurkan gerakan bangga buatan Indonesia untuk membantu para UMKM *on boarding* ke platform digital, dan ini dilanjutkan dengan program beli produk kreatif lokal.

Kurleni menjelaskan, “Semua itu dilakukan sebagai upaya kita bergotong royong membantu saudara-saudara kita sendiri dan bagaimana kita bisa membantu UMKM untuk secepatnya bisa naik kelas.”

Kemendagri juga membantu memfasilitasi agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mendapatkan dukungan dalam program pemulihan ekonomi nasional. “Kita tahu banyak program dan kebijakan di sektor keuangan dan di sektor sosial yang berlaku secara umum. Namun, kita memperjuangkan agar industri pariwisata juga bisa memanfaatkan kebijakan-kebijakan terse-

but,” ujar Kurleni.

Ia mengungkapkan, dalam masa pandemi covid-19 ini, “Kami juga mengalami pemotongan anggaran sehingga banyak program yang sudah kami susun belum bisa terealisasikan. Konsekuensinya, kami mundur dulu, dan kami akan tetap laksanakan di tahun depan.”

Terkait dengan CHSE, kata Kurleni, sertifikasi CHSE sudah dan terus dilaksanakan tahun ini setelah tahun lalu berhasil menyertifikasi hampir 6.000 usaha yang bergerak di industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pascapandemi, Kemenparekraf akan kembali fokus ke program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMN, terutama dukungan untuk peningkatan penguatan destinasi pariwisata prioritas dan revitalisasi destinasi Bali dengan membuat jenis-jenis pariwisata yang akan dikembangkan, seperti wisata alam, budaya, juga wisata berbasis partisipasi aktif masyarakat. “Partisipasi masyarakat sebagai pengelola destinasi wisata pun akan ditingkatkan,” tambah Kurleni.

Lalu, apa pekerjaan rumah (PR) Kemenparekraf yang lain agar sektor pariwisata segera pulih? “Kami punya PR untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Ini menjadi tantangan kita semua bahwa *safety and security, health and hygiene, environment sustainability* yang masih rendah harus ditingkatkan,” kata Kurleni. Maklum, CHSE menjadi prasyarat atau keinginan para wisatawan.

Namun, secara umum, menurut Kurleni, Kemenparekraf sudah menyiapkan ‘skenario’ menghadapi pandemi covid-19 yang dikhawatirkan memunculkan resesi. Pertama, di tahun 2021 ini dan 2022 menyiapkan tahap penyelamatan melalui kebijakan menolak krisis dan mengurangi dampaknya.

Kedua, 2022-2024 ditetapkan sebagai tahun pemulihan dengan mengeluarkan kebijakan memberikan stimulus untuk mempercepat pemulihan.

Ketiga, menetapkan tahap untuk tumbuh dan akselerasi dengan menyiapkan industri masa depan yang berketahanan dan berkelanjutan.

“Itu adalah langkah-langkah yang kami siapkan agar bisa menyongsong masa depan yang lebih cerah setelah kita dapat mengatasi pandemi,” ujar Kurleni optimistis. ■



Kita berharap Badan Pangan Nasional ini bisa membantu upaya kita mewujudkan kedaulatan pangan sehingga jangan gampang mengimpor produk-produk peternakan, tetapi perbanyaklah upaya mendukung peternakan rakyat.”

Dedi Kusmanagandu

Ketua Komite Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia

6 Mempertahankan dan Meningkatkan Potensi Keturunan Kakek Ayam

PADA saat kita disibukkan dengan covid-19, belakangan terdengar kabar bahwa konsumsi daging segar dan daging beku menurun karena ditengarai bisa menimbulkan semacam transmisi bagi penyebaran covid-19.

Jika kabar itu benar dan bukan hoaks, tentu akan merugikan petani, terutama peternak unggas (ayam) petelur. Jangan-jangan nanti akan muncul berita bahwa telur bisa mentransmisikan covid-19 ke manusia.

Kabar itu ditepis Ketua Komite Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia, Dedi Kusmanagandu. Dia mengaku pihaknya tidak punya ruang untuk berkomunikasi dengan media massa yang belakangan ini senang dengan kabar-kabar sensasional. Kemudian tersiarlah kabar semacam itu bahwa daging hewan, termasuk unggas, bisa mentransmisikan covid-19.

Dedi lalu *flashback* ke 2003 ketika para peternak unggas pernah mendapatkan musibah dengan berjangkitnya wabah flu burung. Namun, saat itu praktis tidak ada peternak yang terinfeksi

flu burung.

Jika dibandingkan dengan virus korona, menurut Dedi, peternak unggas lebih berpengalaman dalam menangani virus yang penularannya sangat tinggi pada unggas, antara lain virus penyebab flu burung. “Tapi kami bisa mengatasinya,” tegas dia.

Ia berharap vaksinasi covid-19 yang digalakkan pemerintah nantinya berhasil melahirkan kekebalan massal (*herd immunity*) pada masyarakat Indonesia. Ia pun yakin badai pasti berlalu.

Terkait dengan bidang yang digeluti, Dedi Kusmanagandu menjelaskan, ayam ras penghasil telur merupakan salah satu penyumbang protein hewani terbesar di Indonesia. Sampai saat ini harganya boleh dibilang sangat murah dan terjangkau oleh masyarakat.

Namun, dalam satu setengah tahun terakhir, para peternak unggas menghadapi masalah. Selama pandemi, permintaan memang turun, sementara biaya produksi terus naik.

Ayam petelur, kata Dedi, bukan hasil rekayasa genetika, tapi betul-betul ayam hasil pemuliaan. Ayam-ayam itu besar juga bukan karena disuntik, tapi betul-betul dipelihara secara modern.

Dedi lalu menjelaskan bahwa di kalangan peternak unggas, khususnya ayam, ada istilah ‘kakek ayam’ atau *grandparents stock*. Sang kakek ayam di Indonesia saat ini sekitar 650.000 ekor. Kakek ayam ini kemudian menghasilkan ‘orang tua ayam’ yang populer dengan sebutan *parent stock*. Jadi, satu ekor kakek ayam akan melahirkan ‘bapak’ atau orang tua sebanyak 43 ekor. Dari 43

ekor akan menghasilkan 148 ekor ayam. Inilah yang disebut *commercial stock* yang kemudian dijual di pasar dan kita konsumsi.

Jika ‘silsilah’ ayam seperti itu, lalu berapa produksi ayam daging di Indonesia? Dedi menjelaskan, dari 650.000 kakek ayam di atas, akan menghasilkan 3 miliar sampai 3,3 miliar ekor ayam broiler/ayam potong dalam satu tahun. “Jadi itulah prestasi kita. Kira-kira produksinya per minggu sekarang ini sekitar 60 juta-70 juta per minggu.”

Lalu, berapa uangnya? Dedi kembali menjelaskan, jika bibit ayam harganya Rp6.000 per ekor, jumlah uang yang diperlukan untuk membeli bibit ayam sekitar Rp19,9 triliun. Bagaimana kalau bibit ini menjadi besar? Untuk menjadi besar, ayam butuh pakan. Di dalam pakan terdapat nutrisi. Kita punya nutrisisionis yang sudah tersertifikasi sehingga bisa memperbesar ayam sampai berumur 1-1,5 bulan. Selama itulah rata-rata pemeliharaan ayam potong. Dalam kurun waktu satu tahun diperlukan 11 juta ton pakan ayam.

Harga pakan ayam kira-kira Rp7.000 sampai Rp7.500 per kilogram. Jadi, biaya pakan untuk ayam broiler sekitar Rp83 triliun per tahun. Dedi menjelaskan, dalam praktik, kadang-kadang ayam mengalami stres dan sakit karena diperlihara dalam jumlah banyak atau musim yang tidak baik. Untuk ini diperlukan obat. Biaya obat untuk kesehatan ayam Rp800 per ekor sehingga per tahun mencapai Rp2,9 triliun.

Dengan begitu, menurut Dedi, jumlah uang yang beredar di

dunia perayaman broiler dalam setahun kira-kira Rp215 triliun.

Bagaimana dengan ayam petelur? Jumlah ayam petelur di Indonesia sekitar 250 juta ekor per tahun. Tapi pada saat pandemi covid-19, jumlahnya turun 20%. “Jadi perkiraan kami ialah sekitar 200 juta ekor per hari,” kata Dedi.

Setiap hari ayam itu bertelur, jumlahnya 200 juta butir. Satu kilogram telur berisi 16-17 butir sehingga dalam sehari menghasilkan 12,5 juta kilogram telur. Jadi, kalau ditotal, dalam setahun akan mendapatkan angka Rp91 triliun.

Itulah gambaran perputaran uang di kalangan peternak ayam petelur atau broiler. Belum lagi perputaran uang untuk ayam potong yang menurut perhitungan Dedi, jika digabung dengan ayam petelur, bisa mencapai Rp356 triliun per tahun atau Rp1 triliun per hari.

Lalu, apa yang dihadapi dunia perunggasan di Indonesia? Dedi menjelaskan, dalam kurun waktu satu setengah tahun terakhir, konsumsi telur turun kira-kira 20%-25% sehingga harga telur jatuh, bahkan sampai di bawah biaya produksi. Harga pakan, bahan bakunya juga naik sehingga biaya pemeliharaan ayam ikut naik.

Dedi hanya mengharapkan peraturan Menteri Pertanian yang mengatur soal perunggasan dilaksanakan secara konsisten supaya situasi, kondisi, dan perekonomian peternakan ayam dapat tertolong.

Dibentuknya Badan Pangan Nasional, disebut Dedi, juga men-

jadi harapan baru bagi para peternak. “Kita berharap Badan Pangan Nasional ini bisa membantu upaya kita mewujudkan kedaulatan pangan sehingga jangan gampang mengimpor produk-produk peternakan, tetapi perbanyaklah upaya mendukung peternakan rakyat,” katanya.

Para peternak ayam pun berharap ada semacam gerakan nasional bersedekah telur. Semua warga masyarakat diajak untuk bersedekah telur sehingga permintaan telur bisa meningkat. Dengan gerakan itu, masyarakat yang miskin terbantu dalam konsumsi protein hewani. ■



Area nelayan, area wisata, area peternakan, area ekspor-impor benar-benar vital. Ini juga perlu *di-mapping* sehingga kita bisa tetapkan sektor-sektor apa yang harus diperkuat.”

Suyoto

Ketua Korbid Kebijakan Publik dan Isu Strategis
DPP Partai NasDem

7 Memperpendek Time Delay

APA pun masalah yang dihadapi, selaku penanggap diskusi, Ketua Korbid Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem, Suyoto, mengingatkan bahwa kita saat ini berada di masa transisi.

Konsekuensinya, menurut dia, untuk mencari solusi, kita harus berpikir transisional. Hasilnya, bisa berhasil atau sebaliknya, mundur. Kita tentu berharap di masa transisi ini kita berhasil keluar dari berbagai masalah jika pandemi covid-19 berakhir. Setelah itu ekonomi kita bisa tumbuh 5,2%.

Namun, karena kita berada di masa transisi, masih menurut Suyoto, maka logikanya kita juga harus menggunakan logika transisi dalam menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi.

Ia menyebut ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, memastikan protokol kesehatan (prokes) berjalan sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Kedua, memperpendek *time delay*.

Keduanya, disebut Suyoto, harus berjalan paralel, bagaimana memastikan prokesnya berjalan dan bagaimana *time delay* itu



MI/ADAM DWI

Pekerja mengumpulkan telur di peternakan ayam di Desa Pengasinan, Gunung Sindur, Bogor, Rabu (7/9/2022). Harga telur ayam mulai turun sejak bansos dibagikan. Sebaliknya, harga pakan ayam dan telur mulai naik sejak pemerintah menaikkan harga BBM. Peternakan ayam termasuk salah satu industri yang terdampak oleh pandemi covid-19. Di saat ekonomi mulai pulih, para peternak tidak bisa memenuhi permintaan pasar karena ada *time delay*.

kita diperpendek antara lain dengan vaksinasi.

Selama pandemi covid-19, masyarakat sudah tahu tentang prokes. Selain itu, ada PSBB, PPKM, dan berbagai nama lain yang semuanya bertujuan mencegah penyebaran covid-19. Terakhir ialah vaksinasi.

Covid-19 yang diikuti dengan pandemi, kata Suyoto, membuat permintaan turun. Fakta yang muncul, begitu kasus covid-19

melandai, permintaan naik. Kuota naik. Permintaan ke luar negeri juga naik.

Sekarang yang terjadi itu, menurut Suyoto, kebutuhan impor dan kebutuhan ekspor naik. Kalau permintaan turun, berdampak langsung kepada industri-industri kita. Tapi kalau permintaan naik, tidak bisa langsung dipenuhi oleh industri kita.

Mengutip penjelasan Dedi Kusmanagandu, Suyoto mengatakan jika ada ledakan permintaan telur, permintaan ayam belum tentu bisa langsung dipenuhi karena ada *time delay*. “Saya kira sektor peternakan sudah sangat jelas. Namun, untuk sektor yang lain perlu pencermatan dengan sungguh-sungguh.”

Suyoto menambahkan, untuk sektor-sektor lain seperti sektor pariwisata, misalnya, perlu dicermati unsur *time delay* mana yang bisa diperpendek. “Jadi, catatan saya untuk ini perlu *mapping area* wilayah mana saja yang perlu diperpendek *time delay*-nya.”

Begitu pula jika kita menginginkan UMKM bisa berperan maksimal dalam membangkitkan perekonomian kita, mana yang perlu diperpendek *time delay*-nya.

Suyoto mengingatkan, begitu ekspor-impor kita terganggu, maka sektor-sektor lain termasuk peternakan juga terganggu. Demikian juga dengan sektor kelautan yang berefek ke nasib para nelayan kita.

Masih di masa pandemi, menurut Suyoto, banyak perusahaan kontainer yang kolaps dan tidak siap memenuhi kebutuhan transportasi. Akibatnya, tarif jasa kontainer naik 400%-500%. Fakta itu

menggambarkan bahwa area ini sangat vital. “Area nelayan, area wisata, area peternakan, area ekspor-impor benar-benar vital. Ini juga perlu di-*mapping* sehingga kita bisa tetapkan sektor-sektor apa yang harus diperkuat.”

Suyoto melanjutkan, jika kita sudah melakukan *mapping*, mana yang kira-kira kita ingin perpendek *time delay*-nya? Bagaimana meningkatkan kapasitas permintaan lokal konsumen? “Lalu bagaimana kita membantu dengan cepat produsen-produsen yang *klenger* ini.”

Bahwa pemerintah memberikan bansos kepada rakyat yang rentan, disebut Suyoto, sudah benar. Lalu bagaimana dengan pelaku UMKM? “Menurut saya, mereka harus terus diberdayakan dan jangan dibiarkan hidup sendiri.”

Terhadap perusahaan besar, menengah, terutama yang mengandalkan modal dari perbankan, mau tidak mau harus ada relaksasi dan perlu ada penguatan modal kembali.

Itu perlu dilakukan, sebab menurut Suyoto, sebelumnya mereka sudah berdarah-darah menahan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawannya. Pemerintah harus membantu keberadaan mereka. ■



Ekonomi kreatif,
ekonomi digital di
Indonesia akan merajai
dan menjadi pelaku
utama dari ekonomi
Indonesia, baik di level
UMKM, pengusaha
kecil menengah, mikro,
maupun besar.”

Millie S. Lukito

Founder, CEO & Bureau Chief Mobiliari Group

8 Pulihkan Ekonomi, Digitalisasi Bisa Tembus Rp2.000 Triliun

HARI-HARI terus berlalu. Kita masih hidup bersama covid-19. Direktur Penyakit Menular WHO South East Asia Regional Office (SEARO) 2018-2020, Tjandra Yoga Aditama, menyatakan gembira sebab Indonesia dinilai sebagai *one of the best in the world* dalam menangani kasus covid-19.

Indonesia berhasil menurunkan kasus positif covid-19 hingga 58% per minggu. Mengacu pada data yang dirilis John Hopkins, data kematian di Indonesia akibat covid-19 masih tinggi, berada di urutan ketiga dunia.

Bertindak sebagai penanggap, Tjandra Yoga mengatakan, kita harus berupaya agar tingkat kematian itu menurun seiring dengan menurunnya kasus positif covid-19.

Bagaimana caranya agar kasus covid-19 tidak naik lagi? Tjandra menjelaskan ada lima cara supaya kasus covid-19 tidak naik lagi sehingga pemulihan ekonomi bisa berjalan makin cepat.

Pertama, kita harus mencegah supaya orang tidak menulari

atau mengurangi penularan dengan meningkatkan jumlah *test* dan *trace* dan juga meningkatkan pemeriksaan *genome sequencing*.

Genome sequencing covid 19 adalah salah satu prosedur laboratorium untuk menentukan urutan basa yang terdapat pada organisme.

Jadi, *genome sequencing* covid 19 adalah upaya melihat urutan kode genetik. Metode ini bermanfaat sebagai salah satu kunci penanganan infeksi covid-19 akibat virus korona yang tengah melanda berbagai negara, termasuk Indonesia.

Kedua, lalu lintas orang keluar harus dibatasi. Pengawasan terhadap protokol kesehatan harus diperketat. PPKM dengan skala level 1, 2, 3, dan 4 agar dilakukan secara bertahap.

Ketiga, orang-orang yang belum tertular harus dilindungi dengan cara divaksin dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Ini penting, jangan hanya bergantung pada vaksin.

Keempat, jika perlu berlakukan lagi CERDIK (Cek kesehatan secara berkala; Enyahkan kebiasaan buruk merokok dan sebagainya; Rajin berolahraga; Diet yang bagus; Istirahat cukup; dan Kelola stres).

Kelima, vaksinasi covid-19. Kasus positif covid-19 memang sudah menurun. Namun, kita tetap harus waspada. Vaksin menjadi penting untuk pemulihan ekonomi negara.

Meskipun mengaku tidak menguasai dunia bisnis, Tjandra sependapat dengan para pembicara diskusi bahwa pandemi covid-19 merupakan momentum yang baik bagi para pelaku



BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/MUCHLIS

Presiden Joko Widodo meluncurkan Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas, di Gedung SMESCO, Jakarta, Senin (3/10/2022). Dalam upaya mendorong UMKM masuk ke dunia digital, salah satu permasalahan yang masih harus dibenahi pemerintah adalah mengatasi kesenjangan digital di Indonesia. Pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 70% lebih, tetapi faktanya Indonesia masih mengalami kesenjangan terhadap akses internet.

UMKM untuk masuk ke dunia digital agar bisa memberikan kontribusi bagi upaya pemulihan ekonomi negara.

Bisa tembus Rp2.000 triliun

Jika memang digitalisasi itu dilakukan secara masif, seperti apa dampaknya bagi perputaran uang di negeri ini? Pelaku

ekonomi digital yang juga Founder, CEO & Bureau Chief Mobiliari Group, Millie S. Lukito, mengatakan apabila nilai APBN Indonesia saat ini Rp2.700 triliun, pada 2025 nanti ekonomi digital kita diperkirakan tembus ke angka Rp2.000 triliun.

“Ya, pada tahun itu, *size* ekonomi digital Indonesia akan mencapai Rp2.000 triliun. Berarti nanti ukuran dari ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 hampir sama dengan seluruh total APBN Indonesia sekarang,” tegas Millie.

Akan tetapi, Millie memperhatikan kita saat ini belum memusatkan perhatian seratus persen secara intens terhadap pembangunan ekosistem ekonomi digital. Ia memberikan contoh dan mempertanyakan apakah seorang *influencer* (*Youtuber*) yang punya penghasilan miliaran rupiah sudah membayar pajak sebagaimana mestinya.

Millie menduga belum, sebab aparat pajak masih sibuk memburu perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor riil agar membayar pajak, padahal kondisi mereka megap-megap akibat diterpa covid-19.

Millie menengarai masih banyak orang kaya perseorangan yang melenggang nyaman dan tanpa menghadapi satu regulasi apa pun, termasuk regulasi pajak.

Menyinggung soal peran UMKM dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha di sektor ini, Millie mengatakan UMKM akan menghadapi kompetisi harga jika mereka masuk ke digitalisasi ekonomi. Mereka akan menghadapi kompetisi harga yang

disebut Millie ‘gila-gilaan’.

Millie mengamati akhir-akhir ini banyak pelaku UMKM baru bermunculan, terutama di Jakarta dan Surabaya. Usia mereka muda, berpendidikan tinggi, dan pernah sekolah di luar negeri. Mereka punya akses dana yang cukup kuat.

Mereka bisa mengimpor barang-barang dari luar negeri dan kemudian memanfaatkan *Instagram* atau platform seperti *Tokopedia* untuk menjalankan kegiatan perdagangannya.

Pelaku UMKM seperti itu, kata Millie, sudah lebih *sophisticated* atau *luxurious*. Mereka sudah naik kelas. Di usia muda, mereka menjadi *entrepreneur* dan sudah bisa membayar pajak serta memberi pekerjaan bagi banyak orang. “Jadi, demokratisasi di bidang ekonomi digital saat ini sudah sangat terasa ada di mana-mana, terutama setelah covid-19 menerpa kita.”

Di sektor pariwisata, menurut Millie, sekarang ini sudah terjadi *shifting* yang luar biasa. Para pelancong/turis sekarang tidak mau lagi berkumpul ramai-ramai di sebuah hotel besar, lalu mereka masuk kamar di malam hari, kemudian di pagi hari ramai-ramai menuju ruang makan untuk makan pagi.

Kebiasaan seperti itu, kata Millie, mulai ditinggalkan. “Model seperti itu sudah tidak akan dilakukan lagi dengan adanya disrupsi akibat pandemi covid-19.”

Millie menambahkan, Indonesia mempunyai banyak objek wisata karena kita negara kepulauan. Bagi wisatawan asing, mereka suka, tapi tidak wajib hukumnya untuk bermalam di hotel



Pengunjung bertransaksi dengan pembayaran secara digital pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Jumat (15/7/2022). Pesatnya digitalisasi tak hanya dijawab oleh ragam inovasi dalam sektor ekonomi dan keuangan. Perlindungan konsumen perlu diperhatikan guna memupuk kepercayaan masyarakat akan ekonomi digital.

bintang lima yang supermewah.

Wisatawan dari Australia atau Amerika, menurut pengamatan Millie, lebih menyukai ketenangan di suatu tempat sunyi yang lebih hijau. Ia menyarankan Kemenparekraf lebih men-*shift* dan membangun tempat-tempat wisata di luar Bali lebih intens dan lebih terfokus dengan *roadmap* yang jelas.

Bagaimana dengan ekonomi kreatif kita? Millie mengatakan

ada sektor yang belum mendapatkan perhatian yang cukup, yakni *gamers*.

Ia mengungkapkan, sekarang ini di Hollywood ada film produksi Marvel berjudul *Shang-Chi*. Film itu kini mendunia. *Soundtrack* film tersebut karya orang Indonesia. Berkat lagu ciptaannya, sang pencipta *soundtrack* mendapat *follower* di Spotify sebanyak 10 juta.

Sayangnya, menurut Millie, banyak orang Indonesia yang tidak tahu sebab pekerja seni ini mengadopsi identitasnya menjadi orang Amerika dengan nama Rich Brian dan sekarang tinggal di Los Angeles. “Saya mendengar ia akan membuat lebih banyak lagi film bersama produsen film di Hollywood.”

Millie mengungkapkan, dengan difasilitasi Media Group, “Kami kemudian mendapat akses berbicara dengan Rich Brian. Dia mengatakan, kalau saya di Indonesia *nggak* dihargai dan bagi orang Indonesia, sektor-sektor yang saya lakukan ini dianggap tidak real. Sedangkan kalau saya ke Amerika, saya diangkat sebagai hero.”

Saat ini Rich Brian tinggal di Kanada. Ia tetap berkarya di sana dan kemudian menjadi pembayar pajak di negara itu.

Millie menegaskan, ekonomi kreatif, ekonomi digital di Indonesia akan merajai dan menjadi pelaku utama dari ekonomi Indonesia, baik di level UMKM, pengusaha kecil menengah, mikro, maupun besar. “Lima tahun ke depan semuanya akan berbasis ekonomi kreatif dan ekonomi digital.”

Ia menyarankan pemerintah harus lebih membenahi lagi permasalahan yang selama ini menghambat perkembangan ekonomi digital, misalnya kesenjangan digital di Indonesia. Pengguna internet di Indonesia memang sudah 70% lebih, tetapi faktanya kita masih mengalami kesenjangan terhadap akses internet.

Indonesia tertinggal jauh jika dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, bahkan Filipina. Masih banyak tempat di Indonesia yang *blank spot*. Itu artinya ketersediaan wifi atau *network* masih di 2G, sedangkan di negara Barat sudah 5G.

Millie menegaskan, sekarang kita harus mau membangun ekonomi digital, ekonomi kreatif, sesuatu yang dulu mungkin kita anggap main-main dan tidak penting atau bukan sesuatu yang serius.

Bidang itu kini benar-benar serius. Millie memberikan contoh Gojek merger Tokopedia senilai US\$18 miliar, Bukalapak IPO US\$8 miliar. “Ini sesuatu yang betul-betul harus kita tanggapi dengan serius, atau kita anggap ini bukan sesuatu yang serius?” tukas Millie.

Permudah dan permurah infrastruktur digital

Mempertegas apa yang sudah disampaikan para pembicara dan penanggap, wartawan senior Saur Hutabarat mengatakan, pemerintah harus memudahkan dan memurahkan infrastruktur digital.

Namun, menggarisbawahi apa yang disampaikan Tjandra,

kita memang tetap perlu berhati-hati dalam menghadapi covid-19. Gelombang ketiga bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tapi sebaiknya memang harus dicegah. Pasalnya, jika gelombang ketiga terjadi, ekonomi akan terpukul kembali.

Saur mengutip seorang profesor terkait dengan perlunya vaksin generasi kedua yang bukan lagi *booster* seperti yang dilakukan sekarang.

Menurut Saur, apa yang disampaikan sang profesor menunjukkan bahwa pandemi masih jauh dari selesai. Kendati demikian, Saur mengajak semua pihak melihat optimisme ekonomi itu seperti kegiatan yang dilakukan tukang cukur.

Tukang cukur termasuk sektor informal, bahkan mikro sekali. Dalam menjalankan pelayanannya, tidak bisa tidak dia harus menjaga jarak dengan yang dicukur.

Di awal pandemi, banyak orang yang takut ke tukang cukur. Sekarang tukang cukur sudah buka dengan menjaga protokol kesehatan memakai masker. Ini bukti konkret perekonomian sudah bergerak.

Saur memberikan contoh lain. Ketika *lockdown* dilonggarkan di Denmark, yang lebih dulu banyak diserbu orang ialah tukang cukur sehingga mereka membahasakannya sebagai *crazy busy*.

“Mudah-mudahan apa yang kita takuti melemah, kasus covid-19 berkurang, tingkat angka kematian yang masih tinggi bisa lebih diturunkan, dan gairah seperti tukang cukur semakin ada di mana-mana,” pungkas Saur. ■



Kebangkitan UMKM Pascapandemi

1 Latar Belakang: Tulang Punggung yang Lumpuh

PANDEMI covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga sektor lain seperti ekonomi khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, saat krisis ekonomi akibat pandemi covid-19, UMKM menjadi sektor paling terdampak. Pemerintah sudah mencanangkan beberapa program demi mendukung kebangkitan UMKM.

Diperkirakan, ekonomi Indonesia 2021 bisa tumbuh 3,7%-4,5%. Berbagai upaya terus dilakukan terhadap sektor UMKM yang diharapkan menjadi *critical engine* yang bisa berperan besar dalam pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah melansir beberapa program untuk mendukung

pertumbuhan UMKM. Antara lain melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), seperti pemberian Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Per 30 Juli 2021 telah tersalur BPUM sebesar Rp14,21 triliun atau 92,35% kepada 11,8 juta usaha mikro.

Selain BPUM, apa saja program penguatan sektor UMKM yang dijalankan pemerintah? Apakah akan berhasil sesuai target? Apa kendalanya? Bagaimana seharusnya cara mengakselerasi potensi pertumbuhan UMKM pascapandemi?

Situasi tersebut menjadi tantangan besar yang harus dijawab bersama. Publik harus diingatkan kembali mengenai kerja besar yang belum selesai dan membutuhkan prioritas tinggi agar upaya membangkitkan UMKM bisa segera terealisasi demi ikut mendorong perekonomian nasional.

Berbicara tentang UMKM dan kaitannya dengan krisis, maka kita sering membanding-bandingkan karena bukan pertama kali kita menghadapi krisis besar.

Pada 1998 kita melewati salah satu krisis besar. Saat itu UMKM dianggap sebagai tulang punggung. Jika dibandingkan dengan sekarang, UMKM mengalami dampak yang luar biasa dan paling buruk. Pada 1998, kalau tidak ada UMKM, mungkin krisis ekonomi akan lebih lama.

Pertanyaannya ialah kenapa UMKM sekarang sulit bangkit?

Sebuah survei menemukan beberapa hal menarik soal UMKM. Pertama, bahwa sebagian besar UMKM atau sekitar 56,8% mengalami kondisi buruk dari pandemi ini. Hanya 14% yang masih da-

lam kondisi baik.

Kedua, mayoritas UMKM atau 82,9% mengalami dampak negatif. Ini untuk menjawab orang-orang yang mengatakan bahwa ada sebagian orang yang dengan adanya pandemi justru membuka usaha baru. Tetapi secara umum, kalau ditanyakan seberapa besar pandemi itu memberikan dampak bagi UMKM, mayoritas (82,9%) mengalami dampak negatif. Yang berdampak positif hanya sekitar 6%, tepatnya 5,9%, terutama UMKM yang migrasi ke dunia digital.

Yang ketiga atau terakhir ialah bahwa 63,9% atau sekitar 64% UMKM mengalami penurunan omzet lebih dari 30%, dan hanya 3,8% yang mengalami peningkatan omzet. ■



Saat ini 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Jumlah UMKM sebanyak 64 juta yang menyerap 97% angkatan kerja. Artinya hampir 130 juta tenaga kerja yang berkontribusi kepada 60% PDB nasional.”

Tubagus Fiki Satari

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM

2 Memulihkan Pilar

SEJAK awal Maret 2020, covid-19 mulai masuk Indonesia. Kasusnya terus melonjak. Korban sakit dan meninggal terus bertambah sampai fasilitas rumah sakit tidak sanggup menampung.

Pemerintah tidak diam. Berbagai langkah ditempuh, bermacam jalan dicari untuk dapat mengendalikan virus korona yang menyebar liar itu. Perlahan dan bertahap, berkat kerja keras pemerintah yang didukung masyarakat, pandemi covid-19 sudah mulai terkendali.

Situasi kian menggembirakan. Wakil Ketua MPR RI, Lestari

Moerdijat, dalam diskusi bertajuk Kebangkitan UMKM Pascapandemi yang diadakan Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 10 November 2021, mengapresiasi kerja keras pemerintah dan dukungan semua pihak sehingga kini kita berada pada titik yang cukup memberikan harapan.

Pascapandemi, kata perempuan yang akrab disapa Rerie itu, UMKM perlu mendapatkan perhatian khusus karena sebagai bagian terpenting dari sistem perekonomian di negara ini.

Menurut Rerie, sejak awal pandemi sesungguhnya pemerintah sudah menempatkan UMKM sebagai prioritas penerima manfaat dalam pemulihan ekonomi nasional. Hal itu karena UMKM menjadi salah satu yang paling terpuak dampak pandemi covid 19.

Misalnya, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif lumpuh. Itu memang bukan hanya di negeri ini, tapi juga terjadi secara global. Dalam program pemulihan ekonomi nasional, pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu pilar andalan untuk bangkit dari krisis pandemi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 bisa mencapai 3,7%-4,5%. Diharapkan bahkan diyakini sektor UMKM menjadi salah satu mesin yang berperan sebagai pendorong pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah sudah menyiapkan beberapa program penting. Di antaranya, kata Rerie, menyalurkan bantuan-bantuan dalam jumlah cukup signifikan kepada usaha mikro. Ini juga sejalan dengan strategi pemulihan perekonomian nasional di mana UMKM

menjadi salah satu pilar dari strategi kebangkitan dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Legislator NasDem itu menegaskan kunci kebangkitan UMKM ialah aksi kolektif. Di masa pandemi dan pascapandemi covid-19, sering sekali kita mendengar kata kolaborasi, sinergi, dan kerja sama. Rerie berharap agar kolaborasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kebangkitan UMKM khususnya dalam pemulihan ekonomi.

“Saya yakin dengan kerja bersama, kita dapat melalui pandemi ini dan sama-sama tegak berdiri melakukan pemulihan ekonomi,” kata legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu.

Kebangkitan UMKM pascapandemi bertumpu pada inisiatif pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM sebagai penggerak. UMKM semestinya menjadi kekuatan yang dahsyat sebagai lokomotif perekonomian nasional.

Menurut Tubagus Fiki Satari, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM dalam diskusi itu, saat ini 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Jumlah UMKM sebanyak 64 juta yang menyerap 97% angkatan kerja. Artinya hampir 130 juta tenaga kerja yang berkontribusi kepada 60% PDB nasional.

Tantangannya, menurut Fiki, ialah UU Cipta Kerja meningkatkan batas omzet usaha mikro menjadi Rp2 miliar. UKM yang naik kelas menjadi industri besar masih sangat rendah *success rate*-nya.



MIVICKY GUSTAWAN

Senior Manager Multimedia *Metro TV* Kris Wijayanto menyampaikan materi saat *Workshop SJMI Online* di Kantor *Media Indonesia*, Jakarta, Kamis (22/4/2021). *Media Indonesia* bekerja sama dengan Yayasan Dharma Bakti Astra menggelar *workshop 'Laris Manis di Marketplace'* untuk para UMKM binaan Yayasan Dharma Bakti Astra. Kemajuan UMKM harus terus didorong dengan pendekatan-pendekatan yang fokus agar bisa lebih efektif, terutama terkait rendahnya literasi digital para pelaku UMKM.

Di bagian lain, masih minim UMKM yang masuk bagian dari rantai pasok industri. Itu menjadi tantangan di mana kontribusi ekspor dari UMKM masih rendah. UMKM pernah mendapatkan masa keemasan di era krisis moneter 1998 di saat 20% UMKM

menjadi *buffer* ekonomi. Berbeda dengan pandemi saat ini yang mana UMKM terdampak karena pembatasan mobilitas.

Terkait dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), menurut Fiki, pemerintah memiliki keberpihakan secara khusus yang cukup signifikan terhadap UMKM. Sejak 2020, anggaran PEN untuk UMKM sebesar Rp124,56 triliun dan di 2021 naik menjadi sekitar Rp131 triliun.

Tidak hanya dana yang mengakselerasi kebangkitan UMKM. Transformasi digital dan resiliensi UMKM juga terkait erat. Di saat pandemi terdapat 3 juta transaksi per hari. Terjadi peningkatan transaksi 54% dengan 37%-nya ialah pengguna baru dan 56% pengguna/konsumen tersebut berdomisili di luar perkotaan.

Selama dua tahun pandemi tercatat pendapatan ekonomi digital Indonesia sebesar Rp640 triliun, dan ada proyeksi pada 2025 sebesar Rp1.700 triliun. Itu meningkat 8 kali lipat jika dibandingkan dengan proyeksi kenaikan PDB nasional yang hanya 1,5 kali lipat. Ini luar biasa dan harus disiapkan.

Pertanyaan besarnya ialah siapa yang menikmati ekonomi digital itu? Terkait dengan arahan Presiden Joko Widodo soal target digitalisasi 30 juta pelaku UMKM pada 2024, terdapat beberapa masalah fundamental.

Pertama, literasi digital pelaku UMKM masih rendah. Kedua, belum ada kesiapan dari sisi budaya dan karakter. Ketiga, pelayanan purnajual, kapasitas dan kualitas produksi yang belum konsisten, dan keempat, akses pasar yang belum optimal.

Dari permasalahan utama itu, tambah Fiki, difokuskan pada dua pendekatan, yaitu kapasitas usaha dan perluasan pasar. Pelaku UMKM fokus pada wilayah perdagangan atau *trade area*. Usaha mikro jangan dulu di-*onboarding*-kan ke *e-commerce* nasional karena memang kapasitas kualitas literasinya masih *challenging*.

Usaha kecil didorong masuk ke *e-commerce* lokal atau homogen yang produknya fokus. Misalnya untuk produk hortikultura ada Sayurbox dan TaniHub, untuk perikanan ada Aruna, furnitur ada Dekoruma, dan sebagainya. Itu bisa menjadi sarana melatih pelaku UMKM terkait dengan kebiasaan atau budaya bisnis di *e-commerce*.

Pemerintah, kata Fiki, terus mendorong kemajuan UMKM dengan pendekatan-pendekatan yang fokus agar bisa lebih efektif, meski kemampuan pemerintah sangat terbatas.

Salah satunya dengan menysasar kelompok pelaku usaha mikro yang memang jumlahnya besar sehingga ada model-model yang bisa dikembangkan. Tentu bersinergi dengan *stakeholder*, para pendamping, universitas, pesantren, asosiasi, agregator pembiayaan, dan platform-platform lain.

Dalam membangkitkan UMKM di masa pascapandemi dan seterusnya telah dilakukan kolaborasi lintas kementerian/lembaga. Sudah ada MoU Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian untuk kerja sama UMKM masuk ke rantai pusat BUMN. ■



Usaha mikro harus didorong untuk memiliki legalitas sehingga bisa mengakses baik modal kerja maupun *capital expenditure (capex)*.”

Martin Manurung

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

3 Mendorong Naik Kelas

KELAHIRAN UU Cipta Kerja membawa konsekuensi juga bagi UMKM. Ada perubahan kriteria UMKM. Itu sebagai turunan dari UU Cipta Kerja, yakni di Pasal 35 dan 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang UMKM.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, mengatakan sesuai PP tersebut ada pengelompokan, yakni usaha mikro yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan. Lalu ada usaha kecil yang memiliki modal usaha Rp1 miliar-Rp5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan, serta usaha menengah yang bermodal usaha lebih Rp5 miliar-Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Itu khusus yang berdiri setelah berlakunya PP UMKM.

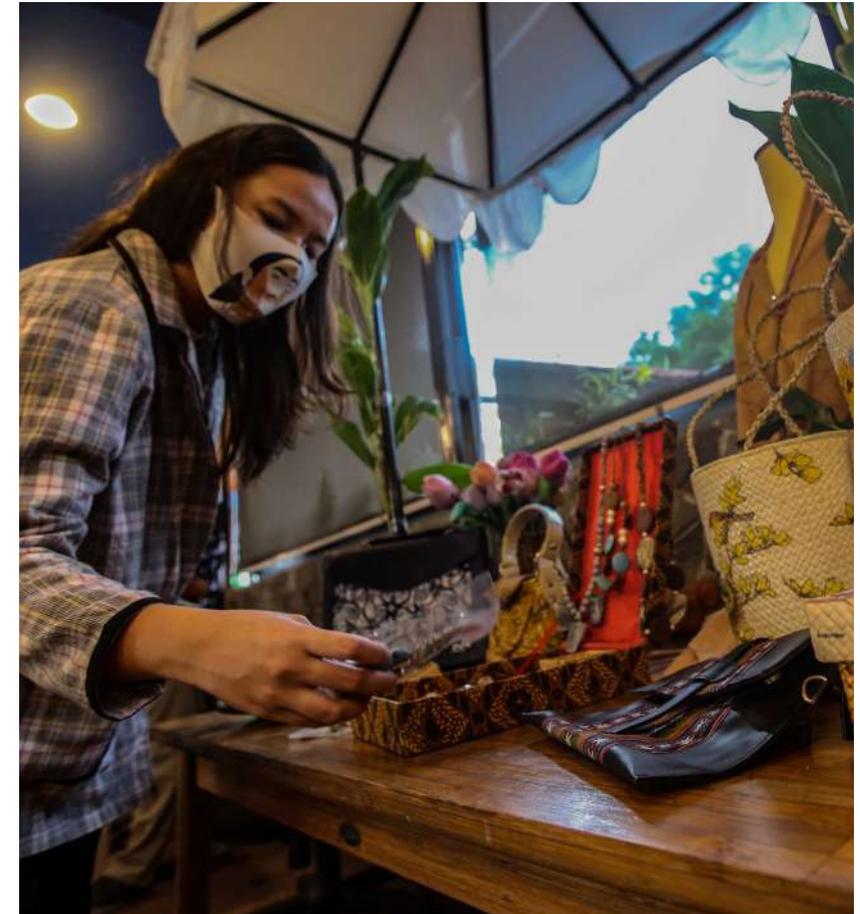
Harus diakui, UMKM memang berpengaruh banyak baik terhadap pendapatan nasional maupun investasi, apalagi lapangan kerja dan angkatan kerja.

Pemerintah dan DPR sama-sama mempunyai komitmen yang besar untuk memperhatikan dan memfasilitasi UMKM. Dengan persetujuan DPR, pemerintah sudah melakukan beberapa program, seperti pemberian bantuan sosial kepada usaha mikro yang miskin dan rentan.

Termasuk dalam bantuan sosial itu ialah penurunan tarif listrik 50% lebih dari 3 bulan untuk pelanggan listrik dengan kapasitas 450 watt. Lalu ada insentif perpajakan bagi UMKM dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar per tahun. Juga stimulus untuk PPH. Pengenaan tarif PPH sebesar 0% diberikan selama 6 bulan di periode April-September 2020 dan diperpanjang hingga Desember 2021.

Selain itu, ada relaksasi dan restrukturisasi kredit dengan memberikan keringanan kredit bagi pekerja informal, misalnya ojek, sopir taksi, nelayan, dan penduduk dengan penghasilan harian, yang efektif berlaku mulai April 2020. Juga ada perluasan pembiayaan modal kerja UMKM dengan mendorong perbankan untuk memberikan kredit lunak kepada UMKM. Targetnya ialah 23 juta UMKM yang selama ini belum pernah mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan.

Pemerintah pun menyediakan penyangga produk koperasi dan UMKM di bidang pertanian, perikanan, kuliner, dan industri rumah tangga untuk memastikan produk terserap sehingga



MIRAMDANI

Pengunjung melihat hasil UMKM penerima kredit produktif program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/7/2020). Sebagai bagian dari dukungan pada program PEN, Bank Mandiri menyalurkan kredit produktif, seperti kredit modal kerja (KMK) dan kredit usaha rakyat (KUR) kepada UMKM di Bogor. Pemerintah mendorong perbankan untuk memberikan kredit lunak kepada UMKM, dan menargetkan 23 juta UMKM yang selama ini belum pernah mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan.

koperasi dan UMKM memiliki perputaran dana yang lebih baik. Juga ada intervensi pasar tenaga kerja UMKM melalui pelatihan metode *learning*.

Di sisi lain, Komisi VI DPR mendorong pemulihan UMKM pascapandemi covid-19 melalui sinergi di antara mitra-mitra kerja komisi tersebut. Misalnya, BUMN di sektor asuransi sudah membentuk holding asuransi dan memiliki berbagai produk yang terintegrasi dengan UMKM. Dengan program itu UMKM bisa lebih memiliki kepastian menghadapi risiko-risiko seperti risiko kerja, kecelakaan, dan kebakaran.

UU Cipta Kerja mengamanatkan pula adanya kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil. Lalu, bagaimana agar UMKM juga masuk ke sektor formal? Komisi VI DPR sudah menggelar rapat dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membahas itu karena UU Cipta Kerja baru berlaku sehingga tidak semua serta-merta langsung diketahui.

Salah satu ketentuan dalam UU Cipta Kerja ialah penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Sistem tersebut akan memperluas usaha mikro jika sudah memperoleh legalitas, memperluas akses, juga untuk permodalan. Sebenarnya, kata Martin Manurung, kalau dicermati, berbagai level usaha dari mikro, kecil, sampai menengah yang diperlukan ialah pembiayaan.

Menurut legislator NasDem itu, kalau ingin meningkatkan atau menaikkan UMKM maka harus didorong usaha mikro

untuk memiliki legalitas sehingga bisa mengakses baik modal kerja maupun *capital expenditure* (capex).

Dunia UMKM jelas tidak hanya menghadapi masalah permodalan. Debbie Tampubolon, CEO & Co Founder INAmikro/JAK-mikro, melihat ada lima masalah spesifik dari sektor UMKM di Indonesia, yaitu 1) kurangnya literasi keuangan, literasi digital, literasi perlindungan usaha, 2) kurangnya akses ke permodalan atau pinjaman perbankan, 3) kurangnya akses teknologi dan inovasi, 4) kurangnya literasi ke pasar yang lebih besar, 5) kurangnya literasi ke promosi, jejaring, pemahaman hukum, dan izin usaha.

Menurut Debbie, sejak 2015, INAmikro berusaha mengembangkan teknologi secara lokal untuk menjawab masalah-masalah tersebut.

Jumlah pelaku usaha sektor mikro di Indonesia sekitar 63,5 juta. Kalau sektor UMKM terdampak pandemi, sektor mikro sangat terdampak karena mereka ada di pasar rakyat. Di pasar rakyat di Jakarta, misalnya, dari jumlah pedagang sebanyak 700, akibat pandemi tinggal 100 atau 200. Jadi suatu pukulan besar bagi pasar rakyat.

Profil dunia usaha di Indonesia menunjukkan hanya ada sekitar 5.000 pemain konglomerat, medium sekitar 60.000 pengusaha, pemain kecil sebanyak 780.000, dan sisanya ialah mikro. Oleh karena itu, INAmikro memang fokus pada usaha mikro. Di masa sebelum pandemi saja usaha mikro sudah menantang, dan betul-betul hancur setelah pandemi.



MISUSANTO

Pengunjung melihat produk-produk kerajinan UMKM yang dipamerkan dalam pembukaan pameran NasDem UMKM Trade Show (NUTS) di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022). Pameran yang digelar 9-11 November tersebut diikuti ratusan perajin dan pelaku industri rumah tangga yang telah dilatih dan difasilitasi Partai NasDem untuk bisa bangkit pascapandemi. Prioritas utama UMKM ialah keberlanjutan usaha. Karena itu, yang sangat dibutuhkan pelaku UMKM ialah pendampingan oleh pihak lain untuk memberikan mereka gagasan agar bisa bertahan menjalankan usaha.

Masalah klasik yang dihadapi pengusaha mikro ialah meminjam dana kepada tengkulak atau bank plecit atau bank keliling dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Bisa 10%-20% per hari atau 35% per bulan. Bandingkan dengan tingkat bunga dari perbankan yang 21%. Mereka pun sangat memimpikan untuk mendapatkan kredit komersial yang bunganya 21% itu.

Masalah lain ialah digitalisasi usaha. Di masa sekarang ini di-

gitalisasi merupakan keharusan. Suka atau tidak suka UMKM pun harus terjun dalam digitalisasi usaha. Memberikan edukasi dan pendampingan bagi usaha mikro untuk melek digital dan bangkit dari pandemi merupakan pekerjaan besar yang harus dikerjakan bersama dengan pemda, pemkot, atau pemprov karena tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh satu atau dua lembaga.

Mengatasi masalah UMKM tidak mudah, tetapi harus dimulai meski dari jumlah yang terbatas. INAmikro telah membantu pedagang membuat izin-izin, membantu mempunyai kartu ATM, dan membantu menjadi *bankable*. Tahap berikutnya ialah membantu mereka mendapatkan kredit dari perbankan nasional atau perbankan daerah. Karena, tanpa membantu mereka memecahkan masalah, mereka akan kembali meminjam ke bank keliling ataupun pinjaman *online* (pinjol) dengan bunga yang mencekik.

Pelaku usaha mikro harus melek dan familier dengan digitalisasi. Tetapi, digitalisasi itu hanya alat. Tujuannya ialah si mikro khususnya di pasar rakyat bisa naik kelas.

Pandemi covid-19 bagai badai tsunami yang memporak-porandakan sektor UMKM. Dampaknya masif dan luas. Menurut ekonom Dianta Sebayang, yang juga Ketua Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis LPPM, Universitas Negeri Jakarta, akibat pandemi covid-19 terdapat 50% UMKM yang omzetnya turun sampai akhirnya menutup usaha, 80% kehabisan tabungan, 60% melakukan pengurangan pekerja terutama di sektor bisnis manufaktur, 39% bergantung pada pinjaman keluarga, dan 42% akan bertahan

hanya 3 bulan jika tidak ada intervensi pemerintah berupa BLT.

Tidak ada sektor usaha yang lolos dari terpaan pandemi covid-19, dari pedagang eceran makanan dan minuman, warung, sampai jasa hiburan dan pariwisata. Sekitar 80% sektor usaha di Indonesia terdampak pandemi.

Masalah pandemi bukan hanya berdampak di sisi *demand* dalam artian konsumen yang berkurang, tetapi juga di sisi *supply*. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan bahan baku karena adanya *work from home* (WFH). Produksi industri berkurang jauh dan jalur logistik menjadi terhambat selama pandemi.

Pandemi memberikan dampak yang drastis dan signifikan kepada UMKM. Pemerintah bergerak cepat dengan mengeluarkan aneka kebijakan dan insentif untuk segera membangkitkan dan memulihkan UMKM. Sudah mulai banyak kegiatan swasta, pemerintah, dan pengusaha melakukan pendampingan kepada UMKM terutama soal digitalisasi.

Masalah utamanya ialah keberlanjutan. Misalnya di beberapa bidang, banyak yang sempat masuk ke *e-commerce*, tetapi tidak bisa berlanjut karena kesulitan bahan baku dan produksi.

Harapannya ialah koordinasi teknik karena koordinasi yang dijalankan selama ini bersifat elitis. MoU di antara kementerian sering kali belum jalan di lapangan sehingga niat baik itu belum langsung dirasakan dengan baik oleh UMKM.

Menurut Dianta dalam diskusi tersebut, ada persepsi publik yang mengaitkan koordinasi elite itu hanya menguntungkan

korporasi besar karena banyak sekali *e-commerce* yang sama. Jadi dianggap jangan-jangan pemain digitalnya bukan lapak pelaku UMKM, tapi nama UMKM dipakai untuk objek korporasi besar.

Di Indonesia, kata Dianta, saat ini terdapat 338 juta *mobile connection*. Berarti orang Indonesia punya nomor telepon seluler (ponsel) bukan hanya satu. Namun yang penting ialah pengguna internet karena mereka memiliki literasi digital lebih tinggi daripada yang hanya menggunakan ponsel. Jadi kalau melakukan transaksi, UMKM harus memiliki literasi digital yang lebih tinggi.

Go digital tidak sama dengan kemampuan berinteraksi dengan layanan *business banking* karena *go digital* memiliki media sosial. Maka, ada yang namanya *social e-commerce* dan *e-commerce*. Kalau *e-commerce* ada malnya, tapi *social e-commerce* jualannya via *Instagram*, *TikTok*, dan pada akhirnya DM atau japri. Dibutuhkan penguatan level UMKM agar bisa berkolaborasi dan berintegrasi dengan layanan perbankan.

Prioritas utama UMKM ialah keberlanjutan usaha. Untuk itu, yang sangat dibutuhkan pelaku UMKM ialah pendampingan oleh pihak lain untuk memberikan mereka gagasan agar bisa menjalankan usaha pascapandemi. Mereka butuh 'kakak asuh'.

Untuk saat ini, pelaku UMKM butuh kiat untuk bisa bertahan. Belum sampai pada mengembangkan usaha, tetapi untuk bertahan selama pandemi ini. ■



Ekspor kayu yang bukan barang jadi harus benar-benar dilarang dengan pengawasan yang ketat. Jika tidak, UMKM furnitur akan semakin kesulitan mendapatkan bahan baku kayu.”

Imam Rahman
Pengusaha Furnitur

4 Keberpihakan Pemerintah

BAGI pelaku UMKM, pandemi covid 19 merupakan tantangan. Bahkan sebagian kecil pelaku UMKM merasa pandemi covid 19 justru membawa pertumbuhan usaha.

Imam Rahman, pengusaha furnitur Jepara, Jawa Tengah, mengatakan perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) memberikan keuntungan tersendiri buat pengusaha furnitur. AS sebagai importir furnitur terbesar di dunia atau sekitar 45,7% dan Tiongkok 39%.

Dengan adanya WFH akibat pandemi, masyarakat lebih banyak tinggal di rumah dan memanfaatkan *online marketplace* untuk berbelanja. Salah satu yang terdampak dari lirikan *online marketplace* ialah dunia furnitur.

Imam mengakui bahwa pandemi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan UMKM furnitur. Justru di tengah pan-

demi, tantangan usaha furnitur ialah meningkatkan keunggulan dalam berkompetisi baik dalam ketersediaan bahan baku, inovasi, teknologi, maupun beradaptasi dengan kondisi pasar seperti kontainer yang sangat mahal dan perlindungan pemerintah.

Dampak pandemi terhadap sektor usaha furnitur dan kerajinan terlihat dari prediksi peningkatan furnitur dunia yang mencapai US\$650,7 miliar. Pada 2016 hanya sekitar US\$180 miliar, tapi saat ini terjadi peningkatan sangat signifikan.

Kini yang menjadi masalah bagi ekspor furnitur ialah peningkatan biaya kontainer. Dulu biaya pengiriman kontainer, misalnya ke Amerika, hanya US\$1.300-US\$1.500. Sekarang meningkat sampai 900% bahkan 1.000%. Ini harus bisa diatasi agar ekspor Indonesia khususnya furnitur bisa ditingkatkan.

Di California, kontainer menumpuk karena orang tidak kerja. Mereka memilih tidak kerja karena tetap digaji pemerintahnya.

Data pertumbuhan furnitur dunia sampai 2027, betapa luar biasa. *Value of the furniture market worldwide from 2020 to 2027* memprediksi pertumbuhan pasar furnitur dunia dari 2020 hingga 2027 menunjukkan peningkatan kebutuhan furnitur terus meningkat.

Prediksi peningkatan pertumbuhan pasar furnitur dunia ialah US\$650,7 miliar. Adapun peran Indonesia sebagai negara penghasil furnitur di dunia masih sangat minim dengan kontribusi masih kurang 1% terhadap pasar global.

Keunggulan kompetitif Indonesia dalam produksi furnitur

ialah Indonesia sebagai negara terbesar ketiga dunia yang memiliki hutan hujan tropis setelah Brasil dan Kongo (Afrika). Selain itu, Indonesia memiliki sumber kayu jati terbesar di dunia.

Sebanyak 70% pengguna memakai furnitur yang terbuat dari kayu. Sisanya, 30%, menggunakan furnitur berbahan metal dan plastik. Dengan demikian, industri furnitur Indonesia mestinya diuntungkan dengan ketersediaan bahan baku yang cukup banyak.

Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang ahli secara turun-temurun dalam membuat furnitur dengan tenaga kerja yang murah. Misalnya *home industry* di Jepara dikenal sebagai industri furnitur dunia dengan kualitas kayu terbaik, yakni jati dan mahoni.

Masalah yang dihadapi sebagai UMKM, kata Imam, ialah bahan baku. Data yang diperoleh dari Perhutani tahun 2001 menyebutkan, Perhutani memotong pohon sekitar 1.046.440 meter kubik (m³). Dari jumlah itu, separuhnya atau sekitar 500 ribu m³, ialah pohon jati. Sisanya pinus, mahoni, dan akasia.

Presiden Jokowi mencanangkan kontribusi furnitur bisa mencapai US\$5 miliar. Untuk mencapai itu dibutuhkan 1,3 miliar m³ kayu. Kalau melihat kebutuhan tersebut, sebenarnya bahan baku industri furnitur UMKM masih sangat kurang.

Di 2020, penebangan pohon khususnya kayu jati oleh Perhutani turun menjadi sekitar 350.000 m³, atau turun sekitar 37%. Sebaliknya ada peningkatan untuk kayu pinus dan sengon. Penye-

babnya bukan Perhutani tidak mau memotong kayu jati, tapi karena belum waktunya pohon jati ditebang karena belum berumur di atas 40 tahun. Namun, perlu diketahui, pohon-pohon yang membutuhkan waktu lama untuk bisa ditebang itu sangat diminati pengusaha furnitur baik UMKM maupun perusahaan besar, termasuk perusahaan penanaman modal asing (PMA).

Untuk mengatasi kekurangan bahan baku kayu bagi UMKM furnitur, Imam mengusulkan agar pemerintah melarang ekspor kayu dan rotan yang bukan barang jadi. Saat ini ekspor rotan sudah dilarang, tapi mungkin masih ada oknum yang melakukannya. Karena itu, perlu pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah ekspor ilegal rotan ke luar negeri.

Adapun ekspor kayu yang bukan barang jadi harus benar-benar dilarang dengan pengawasan yang ketat. Jika tidak, UMKM furnitur akan semakin kesulitan mendapatkan bahan baku kayu.

Imam juga mengusulkan agar Perhutani memfokuskan penjualan kayu kepada UMKM, bukan kepada PMA, karena PMA dapat membeli dalam jumlah besar khususnya untuk bahan baku rotan.

Perhutani adalah BUMN yang telah bekerja keras untuk memotong dan memilih kayu yang paling baik. Namun, karena jumlah kayu yang dipotong itu sedikit, biasanya mereka bekerja sama dengan perusahaan besar sehingga kadang kala UMKM tidak bisa mendapatkan harga yang wajar. Karena mahal, mungkin UMKM akan mengambil kayu dari hutan rakyat yang ditebang dari po-



M/BRYANBODO HENDRO

Pekerja memproduksi mebel secara manual di Desa Kedungcino, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Minggu (15/11/2020). Kendala bagi UMKM di industri furnitur ialah ketersediaan bahan baku. Mereka pun berharap pemerintah dapat dengan tegas melarang ekspor bahan baku kayu dan rotan agar pasokan bahan baku dalam negeri terpenuhi.

hon-pohon yang usianya belum cukup sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Perlu pula membatasi dengan ketat PMA di industri furnitur untuk membuka usahanya di Indonesia. Berikan kesempatan bagi UMKM dan penanaman modal dalam negeri untuk mengembangkan ekspor furnitur Indonesia yang masih kurang dari 1% itu. UMKM furnitur sedang tumbuh dengan sangat baik sehingga pe-

merintah harus membantu. Lebih baik diproteksi khususnya dari bahan baku sehingga UMKM bisa bersaing di pasar internasional atau dalam negeri.

Menurut data Kementerian Perindustrian, kinerja ekspor industri furnitur per Agustus 2021 mengalami peningkatan 30,8% jika dibandingkan dengan di periode yang sama 2020. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing furnitur Indonesia, alangkah baiknya pemerintah membuat sentral penjualan bahan baku kayu dan bahan baku penunjang lainnya di kota-kota yang memproduksi furnitur, misalnya di Jepara. Kemudian, teknologi mesin-mesin utama ada *factory sharing* yang ditempatkan di areal tersebut, yang akan membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas dan mempercepat proses produksi. Misalnya mesin pengeringan yang saat ini dimiliki UMKM di Jepara semuanya tradisional. Tidak ada yang pakai mesin modern sehingga kualitasnya sangat jauh, serta lama berproduksi. Kapasitasnya pun tidak bisa besar.

Pemerintah perlu mempertimbangkan pula untuk membuat *warehouse* atau *showroom* atau *assembly* manufaktur yang besar di luar negeri seperti dilakukan Tiongkok dan negara-negara lain. Tanpa fasilitas itu, harga produk kita akan ditekan oleh PMA maupun *customer* dari luar negeri.

Pengusaha lain yang mengaku tidak terpengaruh pandemi covid-19 ialah Niluh Djelantik. *Entrepreneur* industri fesyen itu mengatakan, di masa pandemi pihaknya membangun banyak lobi

dan lini usaha baru.

Tidak hanya untuk diri sendiri, Niluh juga memperjuangkan agar UMKM bidang lainnya tidak rontok selama masa pandemi karena 70% perekonomian di Bali tergantung industri pariwisata. Munculnya pandemi mendorongnya untuk melakukan *switching back* agar bangkit kembali.

Permasalahannya sangat sederhana, kata Niluh. Negara bukan hanya harus hadir dalam bentuk bantuan modal, tapi juga dalam bentuk lain. Misalnya memperjuangkan agar UMKM memiliki legalitas dan *go digital*. Kalau *go digital*, UMKM harus bisa membuka pintunya untuk dunia luar.

Niluh Djelantik bergerak di bidang usaha sepatu dari kulit. Persoalan bahan baku yang dialami Imam Rahman, juga dialami Niluh. Dia menceritakan pengalaman membeli kulit berkualitas tinggi. Di mana membelinya? Dia harus membelinya di Italia, padahal kulitnya dibuat di Indonesia.

Kenapa? Karena di Indonesia, Niluh tidak bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan kulit dengan kualitas tersebut. Setelah *brand*-nya menjadi cukup dikenal, baru pintu terbuka.

Di awal 2000-an, ekspor Indonesia sangat besar. Furnitur Indonesia sangat dikenal apalagi furnitur dari Jepara, Yogyakarta, maupun Semarang. Semuanya keren walaupun setelah dikirim ke luar negeri digunakan nama *brand* lain.

Ada beberapa perusahaan besar dari negara-negara lain membuka kantor di Jepara, Semarang, dan manajernya tinggal



MIBRIYANBODO HENDRO

Pekerja di Pecangaan, Jepara, Jawa Tengah, mengangkut mebel ke bak truk untuk kemudian didistribusikan ke berbagai daerah di Jawa, Kamis (26/1/2023). Industri mebel Jepara masih tertatih di pasar global akibat tingginya biaya pengiriman sehingga produsen mengandalkan pangsa pasar dalam negeri.

di Yogya. Volume ekspor mereka bisa sampai puluhan bahkan ratusan kontainer per bulan. Itu memakai *brand* siapa? Jelas bukan *brand* anak bangsa. Mereka juga memiliki akses yang sangat luas terhadap bahan baku, sedangkan anak-anak Indonesia berjuang mati-matian. Kita bisa menjadi *brand* yang mendunia, tapi ujung-ujungnya mengambil bahan baku di luar negeri karena di dalam negeri susah mendapatkan akses. Akhirnya kita tidak kom-

petitif dan harga menjadi mahal.

Indonesia kalah dalam banyak hal dengan Malaysia dan Thailand dari segala lini. Sistem mereka sudah sangat *clear*. Kenapa mereka bisa punya 35 juta wisatawan yang datang ke Thailand? Karena di sana ada sistem *value-added tax (VAT) refund*.

Di Indonesia *VAT refund* itu bagaimana prosesnya? Bagaimana sosialisasinya? Bali yang mendatangkan 4 juta wisatawan per tahun ternyata tidak punya *VAT refund*. Padahal itu potensinya sangat besar untuk menjadi penyeimbang bagi *revenue*-nya Indonesia.

Pandemi covid-19 ini tidak akan membawa kita mundur lagi. Kita akan terus bergerak maju menghadapi perkembangan dunia yang semakin terbuka. Digitalisasi menghilangkan semua sekat yang membatasi. Yang kreatif akan tegak berdiri, yang tidak berinovasi akan limbung lalu tumbang.

Di masa pandemi, tidak ada satu pihak pun bisa *survive* tanpa berkolaborasi dengan yang lain. Di Solo, Jawa Tengah, kata Anton Sang Bambu dari *Digital Creative Agency Sugarad.id*, pihak UMKM di sana mendapatkan dukungan dari Shopee, Tokopedia, dan Gojek untuk menginkubasi pelaku UMKM untuk terus bergerak memperbaiki diri menuju level yang lebih tinggi.

Kunci kebangkitan UMKM ialah kolaborasi antara pemerintah dan *stakeholder* pendukung lainnya untuk sama-sama membangun ekosistem supaya bangkit.

Pemerintah, kata Anton, sudah sangat membantu di bidang

pendanaan UMKM. Hanya saja belum merata. Pemerintah juga sudah memberikan pendampingan, program-program inkubasi, juga dari Kementerian Koperasi dan UKM serta beberapa kementerian lain. Cuma, masalah yang paling penting ialah pendampingan perizinan. Perizinan itu menjadi lebih kompleks. Ada produsen jas hujan mau ekspor ternyata susah minta ampun. Mau masuk SNI (Standar Nasional Indonesia) saja susah, apalagi mau masuk Eropa. Syaratnya ribet sekali.

Di samping itu, pendampingan pajak juga penting buat pelaku UMKM. “Mungkin para senior yang ikut Forum Diskusi Denpasar 12 ini bisa memberi sedikit pencerahan tentang pendampingan pajak untuk teman-teman UMKM,” kata Anton.

Anton menceritakan, beberapa temannya dari pasar rakyat membuka kios minuman kecil lalu berkembang membuka beberapa *outlet* dan sebagainya. Tetapi pendampingan pajak dirasa kurang karena teman-temannya itu bisa dibilang buta tentang pajak.

Selama ini mereka menganggap ketika kios makanan dan minuman bayar pajak retribusi sudah selesai. Mereka tidak tahu bahwa ada pajak lain yang harus diurus. Tiba-tiba mendapat ‘surat cinta’ dari pajak, ternyata belum lapor ini, belum lapor itu. Jadi, pelaku UMKM memerlukan pendampingan pajak karena UMKM beda dengan korporasi yang semuanya sudah siap dengan proses perpajakan yang rapi.

Soal pendanaan, Anton mengatakan di Solo ada program Bank Solo untuk pinjol. Bank pasar itu sedang berjuang melawan pinjol

dengan bunga 0,33% per bulan.

Lalu Bank Jateng juga mendukung. Ada beberapa pendanaan dari Bank Jateng yang bunganya sangat rendah serta ada bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Wartawan senior Saur Hutabarat mengatakan kunci program membangkitkan UMKM di masa pascapandemi ialah kolaborasi, pendampingan, dan debirokratisasi.

Pertanyaannya ialah bagaimana agar pelaku usaha mikro di pasar rakyat bisa naik kelas menjadi usaha kecil? Bagaimana yang kecil naik kelas agar menjadi menengah dan yang menengah juga bisa naik kelas?

Untuk menjawab pertanyaan itu, kata Saur, diperlukan model-model yang berbeda buat si mikro, berbeda buat si kecil, dan berbeda buat si menengah.

Memang dibutuhkan banyak pendampingan untuk UMKM karena masih banyak masalah yang memerlukan banyak solusi. Tidak ada pilihan lain bahwa masa depan perekonomian negeri ini ada di UMKM, bukan di tempat lain. ■



IV



**Menatap Ekonomi
Indonesia 2022**

1 Latar Belakang: Ekonomi Digital Meningkat Pesat

DI akhir 2021, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 akan mencapai interval 4,7%-5,5% dari sebelumnya 3,2%-4,0% pada 2021. Hal itu didorong oleh perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang lebih kuat. Peningkatan permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi diperkirakan berlanjut. Hal itu didukung oleh pelaksanaan vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam siaran pers menyatakan bahwa respons bauran kebijakan BI yang bersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional terus mengawal perekonomian pada 2022. Beberapa target ekonomi makro yang ditetapkan, seper-

ti inflasi rendah dan terkendali pada sasaran $3\% \pm 1\%$ di 2022, didukung oleh kenaikan kapasitas produksi nasional melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat dalam perekonomian. Defisit transaksi berjalan rendah, yakni di kisaran 1,1%-1,9% pada 2022. Stabilitas sistem keuangan terjaga, kecukupan modal tinggi, dan likuiditas melimpah. Dana pihak ketiga dan kredit akan tumbuh 7,0%-9,0% dan 6,0%-8,0% pada 2022.

Ekonomi keuangan digital pun akan meningkat pesat. Pada 2022, nilai transaksi *e-commerce* diperkirakan mencapai Rp530 triliun, uang elektronik Rp337 triliun, dan *digital banking* lebih dari Rp48 ribu triliun.

Khusus ekonomi keuangan digital, prospek Indonesia tergolong yang tertinggi di kawasan. Indonesia mencatatkan pertumbuhan 88%, di atas Vietnam (81%), Thailand (54%), dan Malaysia (35%). Untuk nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai US\$40,3 miliar, yang terdiri atas *e-commerce* (52%), *online travel* (25%), *ride hailing* (14%), dan media *online* (9%). Prospek perbaikan juga diharapkan berasal dari pertumbuhan ekonomi syariah dan UMKM.

Tantangan terberat yang dihadapi pemerintah ialah membangun pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan terus mengikis ketimpangan ekonomi, yang direfleksikan sebagai *Gini ratio*. Pandemi, yang menjadi penyebab utama perlambatan ekonomi dan terganggunya agenda pembangunan nasional,

menyisakan pekerjaan rumah berat karena terjadi ketimpangan ekonomi pada Maret 2021 yang melebar sebesar 0,384 dari 0,381 *year on year* (yoy).

Meskipun, jika dilihat dari September 2020, ada perkembangan positif yang ditunjukkan dengan membaiknya angka *Gini ratio* di Maret 2021 sebesar 0,01. Catatan penting yang harus digarisbawahi ialah meningkatnya kesenjangan penduduk di perkotaan yang mencapai 0,401 (Maret 2021) dari 0,393 (Maret 2020).

Amanat konstitusi dalam menciptakan kesejahteraan rakyat merupakan pekerjaan berat yang harus dilakukan bersama. Meneruskan agenda-agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang sempat terhambat selama pandemi menjadi bagian dari upaya tersebut. Untuk menjaga optimisme kebangkitan ekonomi nasional di 2022, Forum Denpasar 12 mengajak para pemangku kepentingan untuk dapat urun rembuk terkait dengan isu ekonomi yang berkembang di masyarakat serta memberikan masukan terhadap langkah-langkah yang harus diambil ke depan. ■



Sebagai sebuah negara, kita mesti berpikir apa yang akan dilakukan dalam konteks pemulihan dan penataan ekonomi ke depan. Apa yang akan kita lakukan harus berpijak pada kolaborasi dan sinergi demi menopang geliat ekonomi yang ada.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Krisis Global Menjadi Ruang Pembelajaran

KONDISI ekonomi nasional hingga akhir 2021 mulai memancarkan optimisme meskipun tidak dapat dimungkiri masih ada keraguan dan pesimisme. Ketidakpastian itu terjadi karena kita masih belum selesai berhadapan dengan pandemi covid-19, satu krisis yang tidak pernah kita sangka ternyata terjadi begitu panjang.

“Sampai dengan hari ini kita masih belum tahu kapan krisis ini akan berakhir dan mau tidak mau kita semua harus mulai menjalani dan melanjutkan kehidupan dengan apa yang disebut sebagai norma baru yang melahirkan kenormalan-kenormalan baru,” jelas Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam diskusi bertajuk Menatap Ekonomi Indonesia 2022 pada Rabu,

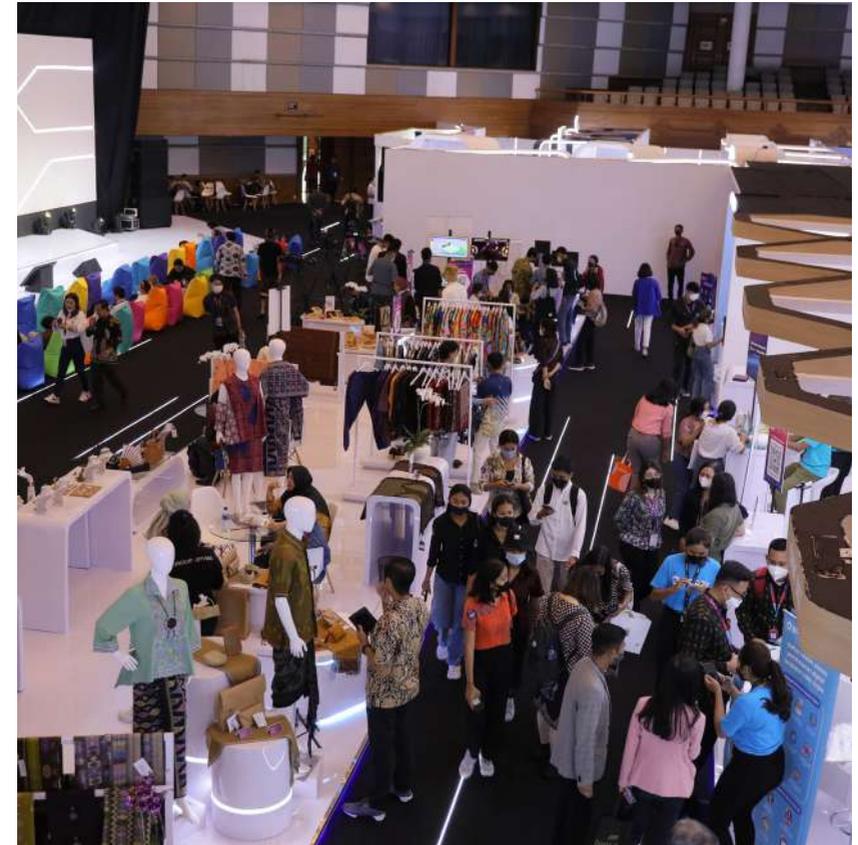
19 Januari 2022.

Selama dua tahun, kata politikus Partai NasDem yang akrab disapa Rerie itu, berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bersumbu pada bagaimana mengatasi dampak-dampak yang terjadi akibat pandemi covid-19. “Negara kita alhamdulillah berhasil melalui satu situasi yang luar biasa di pertengahan tahun lalu, dan kerja keras pemerintah bersama dengan seluruh lapisan masyarakat serta *stakeholder*, kita harapkan tidak mengalami gelombang pandemi selanjutnya sebagaimana yang dialami sejumlah negara di dunia akibat adanya varian baru covid-19,” ujarnya.

Menurut Rerie, sebagai sebuah negara, kita mesti berpikir apa yang akan dilakukan dalam konteks pemulihan dan penataan ekonomi ke depan. Apa yang akan kita lakukan harus berpijak pada kolaborasi dan sinergi demi menopang geliat ekonomi yang ada.

Peningkatan permintaan domestik yang juga sudah dilaporkan oleh para menteri terkait, baik kepada publik maupun dalam laporan kepada DPR, menurutnya menunjukkan bahwa pesimisme bisa kita kesampingkan. Namun, langkah-langkah apakah yang ditunggu dan hal-hal apakah yang harus kita antisipasi, kiranya para pembicara dapat memberikan masukan dan pencekahan dalam diskusi kali ini.

Pada 3 Januari 2022, kata Rerie, Presiden Joko Widodo meminta para pemangku kepentingan untuk bersikap optimistis, bersama-sama menyatukan langkah dan gerak, serta bergandengan



M/IRAMDANI

Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 digelar di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Kamis (14/7/2022). Sistem pembayaran digital yang berkembang pesat mendorong inovasi metode pembayaran lintas negara (*cross border payment*). Ekonomi keuangan digital meningkat pesat bukan hanya karena pandemi, tapi juga lantaran sebelumnya kita sudah memasuki era revolusi digital yang bergerak begitu cepat. Ekonomi keuangan digital menjadi salah satu yang menandai bangkitnya ekonomi secara keseluruhan. Indonesia memiliki berbagai potensi yang bisa menjadi modal dan pegangan untuk menjadi lebih baik.

tangan dalam menata arah perekonomian nasional. Optimisme tersebut ditopang oleh positifnya neraca perdagangan yang dilaporkan atau disampaikan oleh Menteri Keuangan.

Demikian pula yang disampaikan sebelumnya oleh Gubernur Bank Indonesia bahwa kebijakan energi bersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional dalam rangka mengawal perekonomian di 2022 dengan beberapa target yang hendak dicapai.

Seperti yang disinggung moderator saat membuka diskusi, katanya, kita sedang berhadapan dengan perkembangan digital yang luar biasa. Ekonomi keuangan digital meningkat pesat bukan hanya karena pandemi, tapi juga lantaran sebelumnya kita sudah memasuki sebuah era revolusi digital yang bergerak begitu cepat.

Ekonomi keuangan digital, imbuhnya, menjadi salah satu yang menandai banggunya ekonomi secara keseluruhan. Indonesia memiliki berbagai potensi yang bisa menjadi modal dan pegangan untuk menjadi lebih baik pada 2022.

“Bagaimana mewujudkan amanat konstitusi menjadi tugas kita bersama, kita kerjakan bersama, bersama-sama melakukan kolaborasi dan sinergi, berpedoman pada nilai-nilai kebangsaan, serta melanjutkan agenda pembangunan berkelanjutan menjadi sebuah gerakan nasional,” papar Rerie.

Ia mengingatkan bahwa krisis global dalam sejarah adalah ruang pembelajaran yang terjadi berulang. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari krisis dan banyak hal yang bisa kita petik untuk

dijadikan pegangan ke depan. “Namun, di atas itu semua saya yakin kita memiliki optimisme dapat menjalani 2022 dengan rasa percaya bahwa Indonesia mampu keluar dari permasalahan,” cetusnya. ■



Perempuan, anak muda, dan ekonomi hijau akan menjadi penggerak ekonomi ke depan. Kepemimpinan Indonesia dalam Forum G20 diharapkan dapat menjadi momentum untuk mewujudkan harapan tersebut.”

Teten Masduki
Menteri Koperasi dan UKM

3 Perlu Kolaborasi Membangun UMKM

USAHA mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia semakin kuat beradaptasi dengan covid-19. Berdasarkan data BRI Institute 2021, sejak Maret 2020 hingga September 2021 hanya 20% pelaku UMKM yang menyatakan usaha mereka pernah tutup. Jauh berbeda dengan temuan di awal pandemi yang diperkirakan mencapai 50% UMKM tutup seperti diprediksi oleh Bank Dunia.

Selanjutnya menurut Shigehiro Shinozaki, Senior Economist, Economic Research and Regional Cooperation Department ADB, pada Agustus 2021 usaha mikro di Indonesia lebih cepat pulih, usaha kecil bertahan, dan usaha menengah membaik. Dalam dua tahun terakhir di tengah pandemi covid 19, Kementerian Koperasi dan UKM telah menancapkan fondasi ekosistem usaha



MIMOH IRFAN

Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan (kiri) didampingi Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga MPR Budi Muliawan menjadi pembicara dalam diskusi Media Expert Meeting di Jalan Raya Puncak, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Senin (14/12/2020). Diskusi tersebut membahas mengenai antisipasi dampak pandemi covid-19 yang melanda dunia dan peran UMKM yang selama ini selalu memberikan kontribusi di setiap saat resesi melanda Indonesia.

yang adaptif bagi pelaku koperasi dan UMKM.

Ada empat fondasi yang telah ditetapkan. Pertama, untuk pelaku usaha mikro, pemerintah telah menyalurkan banpres seluruh tim usaha mikro kepada 12,8 juta pelaku dengan total Rp15,36 triliun. Kepada usaha kecil dan menengah diberikan tambahan bunga KUR 3% dan telah disalurkan kepada 7,52 juta debitur dengan pembiayaan Rp279,17 triliun.

“Lebih lanjut kepada pelaku koperasi diberikan fasilitas pembiayaan bunga ringan 3% dengan realisasi sebesar Rp1,64 triliun atau 102,6% dari target Rp1,62 triliun,” ungkap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam diskusi yang dipandu Radityo Fajar Arianto, ekonom yang juga Direktur Sparklabs Universitas Pelita Harapan.

Kedua, fondasi perluasan pasar dan digitalisasi. Pelaku usaha yang telah terhubung ke dalam ekosistem digital mencapai 16,9 juta, tumbuh lebih dari 100% jika dibandingkan dengan sebelum pandemi. Belanja pemerintah menjadi prioritas di tengah proses pemulihan pasar, baik di dalam negeri maupun luar negeri. “Realisasi belanja pemerintah untuk UMKM telah mencapai Rp350 triliun atau 79,1% dari target Rp442,43 triliun,” jelasnya.

Ketiga, fondasi kemitraan. Pada 2021 telah dimulai melalui kemitraan dengan sembilan BUMN dan sejumlah perusahaan swasta, seperti PT Mitra BUMDes Nusantara, Microsoft Consulting, Uniqlo, Ikea, Tokopedia, MNC Group, juga Grab dan Gojek.

Keempat, fondasi pendataan. Langkah itu disinergikan ke dalam nomor induk berusaha, Badan POM, KUR, dan koperasi.

“Di 2022 kita akan memasuki tahun pemulihan transformatif. Pada fase ini pemulihan tidak sekadar tumbuh kembali seperti kondisi sebelum pandemi, tetapi menyiapkan UMKM dan koperasi agar lebih siap menghadapi krisis apa pun di masa-masa yang akan datang,” urai Teten.

Pemerintah, menurutnya, optimistis bahwa bermodalkan fon-

dasi adaptasi yang telah disiapkan sepanjang 2021, pemulihan transformatif di 2022 dapat diwujudkan. Optimisme itu cukup beralasan karena ke depan penduduk Indonesia akan didominasi generasi milenial, generasi Z, dan generasi *post-gen Z* dengan persentase mencapai 64,69% dari total 270,2 juta penduduk nasional.

Perempuan, anak muda, dan ekonomi hijau, kata Teten, akan menjadi penggerak ekonomi ke depan. Kepemimpinan Indonesia dalam Forum G20 diharapkan dapat menjadi momentum untuk mewujudkan harapan tersebut.

Langkah transformatif pertama, 70% dari prioritas program Kementerian Koperasi dan UKM ke depan akan menyasar langsung UMKM dan koperasi dengan segmen anak muda, perempuan, dan fokus untuk pengembangan usaha ramah lingkungan.

Langkah transformatif kedua ialah mendorong pembiayaan UMKM dan koperasi bergeser dari sektor perdagangan ke sektor riil. Hal itu penting mengingat sektor riil diharapkan mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

“Dalam transformasi ini Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) kita patok 40% untuk sektor riil agar memacu pembiayaan perbankan dan nonperbankan lebih terkonsolidasi ke dalam ekosistem sektor riil,” jelas mantan juru bicara presiden itu.

Adapun yang ketiga, menargetkan di 2022 sedikitnya 30% atau setara dengan 20 juta pelaku usaha terhubung di dalam ekosistem

digital. Melalui ketiga agenda pemulihan transformasi tersebut, imbuh Teten, target Kementerian Koperasi dan UKM di 2022 bisa terpenuhi, di antaranya kontribusi koperasi terhadap PDB naik lebih dari 6,2%.

Selain itu, kontribusi UMKM terhadap PDB meningkat sebesar 63%, rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,75%, koperasi modern sebanyak 150 unit, peningkatan ekspor nonmigas menjadi 15,8%, peningkatan rasio kredit perbankan di atas 20%, dan transformasi informal atau formal bertambah menjadi 5,5 juta.

Seluruh capaian di 2021 dan dilanjutkan pada 2022, menurutnya, tidak mungkin dapat dicapai hanya karena kerja keras Kementerian Koperasi dan UKM sendiri. “Kami perlu melakukan kolaborasi dengan banyak pihak guna memajukan UMKM dan koperasi di Tanah Air,” ucap Teten. ■



Mereka yang punya akses digital akan *survive*, tetapi yang tidak punya akses digital akan repot sehingga risikonya ialah ketimpangan pendapatan.”

Muhammad Chatib Basri

Menteri Keuangan periode 2013–2014

4 Vaksinasi Menjadi Kunci Pemulihan

MENTERI Keuangan periode 2013–2014 Muhammad Chatib Basri menjelaskan bahwa pola pemulihan ekonomi di setiap negara berbeda-beda. Ada yang bentuknya huruf V, ada yang bentuknya seperti logo Nike, dan ada pula yang terus menurun.

Pertanyaannya, apa yang menentukan pola pemulihan yang berbeda-beda itu? Jawabannya, menurut Chatib, bergantung pada tingkat kemajuan program vaksinasi covid-19 di suatu negara. Itu yang menjelaskan mengapa ekonomi Singapura di kuartal II bisa tumbuh mencapai 14%.

“Negara dengan capaian vaksinasi tinggi, pemulihan ekonominya tinggi. Jadi, kalau saya ditanya apakah yang menentukan

pemulihan ekonomi, jawabannya ialah kesehatan dan capaian vaksinasi,” tuturnya.

Menurutnya, krisis yang terjadi saat ini ialah satu dari sedikit krisis ekonomi yang pemulihannya tergantung Menteri Kesehatan, bukan Menteri Keuangan atau Gubernur Bank Indonesia. Negara yang tingkat vaksinasinya tinggi mungkin tingkat penularan covid-19-nya juga tinggi, tapi tingkat hospitalisasinya relatif rendah. Itu yang terjadi di Australia dan Singapura, misalnya.

“Jadi, program vaksinasi sangat menentukan, dan saya kira itu yang sangat memengaruhi kenapa optimisme muncul seperti yang disampaikan oleh Bu Lestari Moerdijat dalam pembukaan diskusi kali ini,” tukasnya.

Fenomena perekonomian yang sedang kita hadapi, kata Chatic, lazim disebut sebagai ancaman *taper tantrum*, yakni kebijakan suku bunga yang diterapkan beberapa bank sentral negara maju seperti The Fed Amerika Serikat. Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan rambatan terhadap perekonomian global, khususnya terhadap sistem keuangan.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, ia menyarankan agar kita mengambil langkah-langkah antisipasi, antara lain melakukan perubahan dalam *supply chain*. “Kita tidak bisa sepenuhnya bergantung kepada global, karena ketika terjadi *shock* di suatu negara maka implikasinya ialah *supply* akan terganggu,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut dia, kita harus terus melakukan diversifikasi *supply chain*, baik diversifikasi produk ekspor maupun



Pengunjung menghabiskan waktu dengan berwisata kuliner di Chill and Relax (Chillax) di kawasan Sudirman, Jakarta, Jumat (30/12/2022). Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa pemerintah menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai Jumat (30/12/2022). Pemulihan ekonomi di Indonesia sangat bergantung pada mobilitas masyarakat. Hal itu terlihat jelas setiap kali ada PPKM, ekonomi kolaps. Ketika pembatasan itu dibuka, ekonomi pun kembali bergeliat.

diversifikasi negara-negara yang menjadi destinasi ekspor dari Indonesia.

Selain itu, imbuhnya, untuk mengatasi *shock* terkait *supply chain*, kita perlu belajar dari kejadian ketika Tiongkok mendadak menghentikan ekspor, perekonomian sejumlah negara yang bergantung pada produk asal ‘Negeri Tirai Bambu’ itu pun terganggu. Bahkan dampaknya terasa oleh semua negara di dunia.

Untuk itu, menurut Chatib, ke depan orang akan mulai menggunakan teknologi 3D (tiga dimensi) sehingga bila suatu negara tidak mengirimkan barang, cukup meminta desainnya dan barang tersebut bisa dicetak di negara tujuan ekspor. Hal seperti itu akan sangat mengubah pola *supply chain* di masa depan. “Ini tantangan, tetapi sekaligus menjadi peluang untuk berinvestasi.”

Lebih lanjut, ia menjelaskan pihak yang paling terpukul karena krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi covid-19 ialah UMKM dan mereka yang bekerja di sektor informal.

Siapa sih yang bekerja di sektor informal? Banyak yang bekerja di sektor informal ialah perempuan. Makanya ia khawatir *gender issue* menjadi hal yang mesti diperhatikan ke depan, terutama mengenai potensi terjadinya *gender gap*.

Chatib juga mengungkapkan mengenai *k-shaped recovery* karena pandemi covid-19 yang muncul sejak 2020 membuat sejumlah sektor industri sangat terpukul dan membawa ekonomi ke jurang resesi. Pemulihan yang terjadi pun ternyata tidak berjalan seimbang, berbeda di setiap sektor.

Kenyataan tersebut kemudian memunculkan jenis pemulihan berbentuk ‘k’ atau *k-shaped recovery*. Artinya, ada industri yang cepat pulih dan diuntungkan, tapi ada pula yang malah tertatih-tatih dan dirugikan. Secara visual, bentuk pemulihan tersebut tampak bercabang dan menyerupai dua lengan huruf ‘k’, di mana ada kelompok industri yang bergerak mengarah ke atas atau positif dan sisanya menjadi lengan bawah huruf ‘k’ alias bergeser ke arah negatif.

Mereka yang punya akses digital, sebut Chatib, akan *survive*, tetapi yang tidak punya akses digital akan repot sehingga risikonya ialah ketimpangan pendapatan. “Ini yang harus diantisipasi.”

Apa yang terjadi dengan pengangguran? Pengangguran di Indonesia pasti selalu rendah. Kenapa? Karena kita tidak punya tunjangan bagi penganggur. “Di Indonesia hanya orang kaya yang bisa *nganggur*, sedangkan orang miskin pasti kerja,” ucapnya.

Ternyata, menurut Chatib, pemulihan ekonomi di Indonesia sangat bergantung pada mobilitas masyarakat. Hal itu terlihat jelas, setiap kali ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB), ekonomi kolaps. Ketika pembatasan itu dibuka, ekonomi pun kembali bergeliat.

Menurutnya, prioritas pemulihan pascapandemi harus fokus pada *health sector, social assistance, and SMEs* (usaha mikro, kecil, dan menengah/UMKM). “Sektor lain bukannya tidak penting, tetapi *timing*-nya digeser dulu. Kalau sektor utama itu sudah beres, baru diberikan prioritas kepada sektor-sektor lain,” usul Chatib. ■



Berbicara tentang pemulihan ekonomi sesungguhnya tidak sekadar mencari berapa pertumbuhan ekonomi yang dicapai, karena setelah pandemi, struktur sosial masyarakat menjadi lebih berat.”

Hendri Saparini

Founder dan Ekonom Senior dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia

5 Mengoptimalkan Ekonomi Domestik

HENDRI Saparini, Founder dan Ekonom Senior dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, meyakini bahwa pemulihan ekonomi 2022 lebih baik daripada 2021.

Pertanyaannya, apakah benar akan lebih baik, lebih tinggi secara struktur, dan pemulihan akan jauh lebih kuat? Indonesia, menurutnya, memang punya beberapa pekerjaan rumah, apakah kita bisa mengerjakannya atau tidak.

Bila berbicara tentang ekonomi, menurut Hendri, secara global memang cukup berpengaruh bagi Indonesia, tetapi di lain sisi juga tidak terlalu berpengaruh karena mayoritas ekonomi nasional disokong oleh sektor riil.

“Sebenarnya ekonomi Indonesia lebih didominasi oleh ekonomi domestik atau ekonomi yang cenderung tradisional. Hampir 80% disokong oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah,” jelasnya.

Kendati demikian, ada beberapa perubahan di level global yang akan berakibat pada Indonesia. Misalnya, perlambatan pertumbuhan ekonomi global, yang salah satunya diakibatkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Tiongkok, karena porsinya cukup signifikan sehingga berpengaruh pada perekonomian nasional. “Apalagi Tiongkok merupakan salah satu dari lima partner ekonomi terbesar bagi Indonesia,” ungkap Hendri.

Di samping itu, imbuhnya, pandemi covid-19 yang belum bisa dipastikan kapan bakal berakhir akan terus menjadi kekhawatiran bagi masyarakat dan dunia usaha. Pandemi yang ditandai dengan berbagai pembatasan aktivitas publik tentu akan menjadi hambatan bagi upaya pemulihan ekonomi.

Dalam kaitan itu, KTT G20 memasukkan percepatan vaksinasi menjadi agenda penting karena kesenjangan vaksinasi akan memperlambat mobilitas publik. Adapun upaya pemulihan ekonomi ditentukan oleh mobilitas, baik mobilitas barang maupun mobilitas orang.

“Jadi kalau ada negara yang vaksinasinya sudah sangat tinggi, seperti sejumlah negara Eropa dan Amerika Serikat yang sudah mencapai 70%, tetapi negara-negara lain masih di bawah 40%, maka pertukaran barang dan orang tentu akan terganggu,” tu-

kasnya.

Menurut Hendri, sebagai bagian dari masyarakat dunia, kita wajib mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi karena setiap perubahan di level global akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Namun, jangan lupa bahwa sebenarnya ekonomi domestik sangat kuat dan kecenderungan di banyak negara juga demikian.

“Jadi, mengoptimalkan ekonomi domestik akan mengurangi risiko yang akan terjadi akibat perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat global. Pilihan-pilihan kebijakan inilah yang mestinya menjadi pertimbangan bagi pemerintah,” ujarnya.

Bila kita masuk pada ekonomi domestik, faktor apa yang menguntungkan? Hendri berpandangan bahwa banyak hal positif yang kita alami akibat kenaikan harga komoditas, kenaikan harga akibat peningkatan permintaan. Akan tetapi, di 2022, dengan beberapa perlambatan ekonomi di negara-negara partner Indonesia, permintaan produk ekspor yang lebih dari separuh dipenuhi oleh komoditas primer akan menurun sehingga kecenderungan itu patut menjadi catatan bagi kita.

Permintaan impor yang semakin meningkat karena peningkatan konsumsi rumah tangga kelas menengah atas dan juga karena permintaan industri, menurut Hendri, perlu menjadi perhatian sebab industri manufaktur dalam negeri bergantung pada komoditas impor atau bahan baku impor, dan ketergantungan itu relatif tinggi di berbagai sektor. Untuk menjaga agar neraca per-



MIRAMDANI

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Bahil Lahadalia memberikan materi saat Kuliah Umum di Grand Studio Metro TV, Jakarta, Jumat (3/2/2023). Kuliah umum dalam rangkaian acara HUT ke-53 *Media Indonesia* itu mengangkat tema *Menggenjot Investasi di Tahun Sulit*. Investasi selama masa pandemi tetap positif karena investor asing masih melihat bahwa investasi di Indonesia sangat menarik, terutama di sektor primer dan tersier, tapi bukan di sekunder.

dagangan tetap surplus, maka perlu ada kebijakan yang komprehensif dan detail.

Berbagai hal positif yang terjadi selama 2021, lanjutnya, punya potensi untuk tetap terjadi pada 2022. Ia melihat tren digitalisasi ekonomi dampaknya cukup positif, dan hal itu harus terus dijaga karena digitalisasi ekonomi memberikan peluang pertumbuhan yang lebih inklusif.

Bagaimana dengan pertumbuhan regional? Hendri mengatakan negara-negara penghasil komoditas akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus, bahkan beberapa di antaranya bisa mencapai pertumbuhan di atas rata-rata nasional. “Ini yang kita harapkan akan terus berlanjut sebagai pendorong ekonomi,” paparnya.

Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan investasi? Ia menilai investasi di Indonesia selama pandemi tetap positif karena investor asing masih melihat investasi di Indonesia sangat menarik, terutama di sektor primer dan tersier, tapi bukan di sekunder. “Ini sesuatu yang positif, tapi pekerjaan rumah besar bagi kita ialah mendorong peningkatan investasi di sektor sekunder guna menciptakan lapangan kerja yang lebih masif,” jelas Hendri.

Ekspor Indonesia, kata dia, mungkin tidak sekuat tahun 2021, dan hal itu harus menjadi catatan karena di 2022 impor akan meningkat dengan adanya perbaikan ekonomi domestik. Beberapa kebijakan yang akan diambil pada 2022, seperti pengurangan bansos dan subsidi, perlu menjadi perhatian karena ekonomi masyarakat belum terlalu pulih. Pada saat subsidi dikurangi, tentu akan mengakibatkan harga-harga yang diatur pemerintah melonjak.

Oleh karena itu, harus ada kehati-hatian, betul betul melakukan kajian mengenai alokasi atau pengurangan subsidi dan bansos. “Kita tidak bisa tergesa-gesa untuk mengembalikan defisit, tapi harus dengan penuh pertimbangan dan perhitungan

an yang matang.”

Lebih lanjut dijelaskan, berbicara tentang pemulihan ekonomi sesungguhnya tidak sekadar mencari berapa pertumbuhan ekonomi yang dicapai, karena setelah pandemi, struktur sosial masyarakat menjadi lebih berat. “Jadi kita tidak bisa hanya menggunakan indikator mereka yang ada di bawah garis kemiskinan, tetapi yang rentan miskin, hampir miskin juga jumlahnya meningkat karena banyak kelas menengah atas yang berubah menjadi miskin akibat pandemi covid-19,” urai Hendri.

Bila pada 2022 terjadi kenaikan harga-harga barang, akan sangat berpengaruh terhadap kelompok di atas miskin. Demikian pula tentang kualitas hidup masyarakat. Data menunjukkan *quality of life index* mengalami penurunan. Salah satunya penurunan kualitas asupan pangan untuk kelompok bawah.

“Kita punya pekerjaan rumah tentang gizi dan kualitas sosial. Hal itu tampak selama masa pandemi, di mana masyarakat dipaksa menggunakan digital tapi faktanya masih banyak kelompok masyarakat bawah yang tidak bisa mengikuti dan mengaksesnya secara baik,” ungkapnya.

Mengenai masalah pengangguran, ia menjelaskan akan terjadi peningkatan signifikan jumlah pekerja sektor informal karena terjadi ‘migrasi’ besar-besaran dari kelompok formal ke sektor informal. “Mereka yang tadinya di sektor formal terpaksa berge-ser ke sektor informal, dan walaupun pemulihan terjadi, mereka tidak dengan mudah dapat kembali terserap ke sektor formal,” ia

mengingatkan.

Hal itu terjadi bukan hanya karena tingkat pendidikan dan kompetensi, tetapi juga lantaran perubahan jenis pekerjaan akibat adanya pergeseran teknologi. Karena itu, menurut Hendri, perlu ada upaya afirmatif dari pemerintah agar pertumbuhan ekonomi 2022 lebih tinggi daripada di 2021 dengan kualitas pertumbuhan yang lebih baik.

Bila tidak ada perubahan signifikan untuk menciptakan lapangan kerja bagi sektor informal, lanjutnya, masyarakat akan bergantung pada BLT atau perlindungan sosial dari pemerintah. “Kondisi itu tidak bisa dibiarkan terlalu lama karena pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat bila masyarakat memiliki *income* tetap dan pasti.” ■



Disparitas penanganan pandemi covid-19 dan kondisi pemulihan ekonomi pascapandemi yang berbeda-beda di setiap negara, termasuk dalam hal digitalisasi, mengingatkan kita untuk selalu siap menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi ke depan.”

Arya David Sumual

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia

6 Perbedaan Kebijakan Memicu Inflasi

SAMA seperti pembicara sebelumnya, Arya David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia, optimistis pertumbuhan ekonomi 2022 akan lebih tinggi ketimbang di 2021. Ada tiga faktor yang memengaruhi pertumbuhan pada 2022.

Pertama, terdapat benang merah antara pertumbuhan dan kurs rupiah. Kedua, harus selalu *concern* terhadap inflasi, terutama inflasi harga energi yang dialami secara global. Ketiga, kebijakan bank sentral Amerika Serikat, The Fed, serta dampaknya terhadap perekonomian dan moneter global.

“Memang ekonomi kita sudah masuk ke tahap pemulihan dan salah satunya dimotori oleh mulai menggeliatnya permintaan konsumen. Pembelian kebutuhan sekunder dan tersier mulai

kembali terjadi kecuali memang untuk beberapa *item* yang terkait dengan pembatasan mobilitas seperti *traveling* dan bioskop,” ungkap Arya dalam diskusi yang berlangsung pada 19 Januari 2022.

Investasi retail, menurutnya, juga tampak masih tinggi walaupun trennya sedikit mengalami penurunan akhir-akhir ini. Pemulihan, sambungnya, mulai menjangkau semua sektor. Beda dengan di 2020 yang pemulihannya masih berbentuk huruf ‘k’, kini pelan-pelan mulai merata ke berbagai sektor. Meski demikian, di segmen korporasi komersial, pemulihannya masih tertinggal jika dibandingkan dengan sektor UMKM.

Faktor lain yang juga penting dalam menakar pertumbuhan ekonomi ialah inflasi. Ia memperkirakan laju inflasi akan lebih tinggi walaupun sangat mungkin masih dalam *range* Bank Indonesia, sebesar 3% ±1%.

Mengenai adanya wabah varian baru covid-19, omicron, Arya menilai, adanya perbedaan kebijakan di sejumlah negara—ada negara yang menerapkan kebijakan *zero covid policy* seperti Tiongkok yang sudah menerapkannya sejak awal pandemi serta negara-negara yang memilih kebijakan yang sedikit lebih rileks karena pertimbangan ekonomi dan anggaran negara yang terbatas—tentu akan memicu inflasi.

Meskipun demikian, menurutnya, pertumbuhan juga akan jauh lebih baik ketimbang tahun 2020 di saat pandemi covid-19 mulai merebak. “Ketika itu, di 2020 kan hampir semua negara menerapkan kebijakan yang mirip *lockdown*, seperti di Indonesia

yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat,” sebutnya.

Berdasarkan berbagai literatur, kata Arya, omicron tergolong varian yang penyebarannya cepat, tapi *fatality*-nya sangat rendah, mirip-mirip dengan flu biasa. “Mudah-mudahan tidak ada lagi varian-varian lain yang lebih ganas.”

Disparitas penanganan pandemi covid-19 dan kondisi pemulihan ekonomi pascapandemi yang berbeda-beda di setiap negara, termasuk dalam hal digitalisasi, menurut Arya, mengingatkan kita untuk selalu siap menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi ke depan.

“Jadi kalau tanpa strategi nasional yang tepat, saya khawatir kita akan keteter dari bangsa-bangsa lain yang sudah lebih baik dan siap teknologinya dalam menghadapi berbagai disrupsi, terutama disrupsi digital yang saat ini sedang melanda dunia,” katanya mengingatkan. ■



Ternyata kita adalah pangsa pasar ekonomi syariah terbesar di dunia. Dengan peningkatan produksi maka pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.”

Dianta Sebayang

Ekonom dari Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

7 Pandai Menangkap Peluang Bisnis

DALAM menanggapi uraian para narasumber pada diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Denpasar (FDD) 12, Dianta Sebayang, ekonom dari Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), mengungkapkan ada satu potensi yang sering kali dilupakan dan kebetulan sedang menjadi tren, yakni ekonomi syariah.

Bila dilihat dari konteks perbankan syariah, ternyata selama pandemi sudah tumbuh 20%, termasuk dalam konteks *e-commerce* industri halal. Juga yang menarik ialah zakat, yang ternyata tumbuh 30% selama pandemi, kurang lebih mencapai Rp17 triliun di tahun 2021.

“Ternyata kita adalah pangsa pasar ekonomi syariah terbesar



MIRAMIDANI

Jemaah Indonesia bersama jemaah dari negara lain melaksanakan tawaf saat ibadah umrah se usai salat Subuh di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Sabtu (28/5/2022). Sebelum pandemi covid-19, sebanyak 1,5 juta orang Indonesia menunaikan ibadah umrah setiap tahun. Sayangnya, banyak jemaah umrah Indonesia yang menggunakan jasa agen perjalanan milik Turki karena negara itu sejak awal gencar mempromosikan wisata syariah.

di dunia. Dengan peningkatan produksi maka pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Dianta.

Dalam urusan umrah, misalnya, banyak sekali jemaah asal Indonesia yang berkunjung ke Tanah Suci. Sebelum pandemi covid-19, terdapat 1,5 juta orang Indonesia menunaikan ibadah umrah setiap tahun. Sayangnya, banyak jemaah umrah yang ke Tanah Suci menggunakan jasa agen perjalanan milik Turki karena negara itu sejak awal gencar mempromosikan wisata syariah. ■



V



**Hambatan UKM
dan Tantangan
Kebangkitan
Ekonomi Rakyat
Pascapandemi**

1 Latar Belakang: Butuh Inovasi dan Adaptasi

SETELAH dua tahun terpuruk dalam masa pandemi, kini perekonomian Indonesia mulai menggeliat. Pemerintah membidik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena sektor itu dinilai sebagai pilar utama yang dapat mempercepat *recovery* perekonomian nasional.

Pilihan keberpihakan untuk menumbuhkan kembali UMKM sangat beralasan. Peran dan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) di masa sebelum pandemi terus meningkat. Kontribusi UMKM terhadap PDB atas dasar harga konstan pada 2019 mencapai Rp7.034,1 triliun, naik 22,9% dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.721,1 triliun. Adapun kontribusi UMKM terhadap PDB atas dasar harga berlaku sebesar Rp9.580,8 triliun atau naik

5,7% dari tahun sebelumnya sebesar Rp9.062,6 triliun.

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pascapandemi, terutama ekonomi kerakyatan berbasis usaha kecil dan menengah, pemerintah menyiapkan berbagai insentif untuk mendukung UMKM. Di antaranya ialah subsidi bunga, penempatan dana pemerintah pada bank umum mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit modal kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Warung (BT-PKLW), serta insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah.

Pemerintah juga memberikan dukungan bagi UMKM dari sisi permodalan melalui program restrukturisasi kredit. Per 31 Juli 2021, tercatat terdapat lebih dari 3,59 juta UMKM telah memanfaatkan program tersebut dengan nilai sebesar Rp285,17 triliun.

Namun, tantangan yang dihadapi tidak mudah. Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, sekitar 69,02% UMKM mengalami kesulitan permodalan di saat pandemi covid-19. Data tersebut menunjukkan bahwa bantuan permodalan bagi UMKM menjadi hal yang penting.

Akses permodalan menjadi salah satu hal penting karena setelah masa krisis akibat pandemi, permodalan baru merupakan titik tumbuh bagi UMKM. Diperlukan kecermatan dalam perencanaan hingga eksekusi program-program pemulihan ekonomi agar tercapai tujuan secara efektif dan menciptakan dampak so-

sial ekonomi yang positif, seperti pembukaan lapangan kerja baru dan berputarnya roda ekonomi riil.

UMKM pascapandemi juga diwarnai persaingan memperebutkan pelanggan di era internet. Karena itu, dituntut kemampuan membaca peluang dan mengapitalisasinya sebab kompetisi saat ini sudah melampaui batas-batas negara. Model bisnis yang inovatif dan pengelolaan proses bisnis yang baik menjadi kunci dalam memenangi kompetisi.

Tantangan lainnya ialah mempersiapkan UMKM agar bisa adaptif dalam kebutuhan era baru dan perubahan yang demikian cepat. ■



Salah satu yang selalu dikeluhkan UMKM ialah kesulitan permodalan. Padahal permodalan sangat diperlukan untuk membangkitkan usaha.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi

SAAT ini, meski kita belum sepenuhnya terbebas dari pandemi covid-19, geliat ekonomi sudah mulai terasa. Tidak dapat dimungkiri bahwa usaha kecil dan mikro menjadi bagian yang memainkan peran sangat penting dalam kebangkitan ekonomi rakyat pascapandemi dan dalam pemulihan ekonomi nasional.

Optimisme itu dikemukakan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam pengantar diskusi bertajuk Mengurai Hambatan Usaha Kecil Mikro dan Tantangan Kebangkitan Ekonomi Rakyat Pascapandemi, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 23 Maret 2022.

Melihat kembali ke masa-masa awal pandemi dua tahun

berselang, Lestari yang biasa disapa Rerie mengatakan seluruh sektor terdampak pandemi. Tak sedikit sahabat, rekan, yang tadinya bekerja di institusi atau korporasi kemudian terdampak oleh pandemi dan akhirnya banting setir. Tidak sedikit yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka yang memiliki modal mencoba membangun kehidupan melalui usaha kecil dan mikro sebagai bagian dari pilihan pemulihan.

Geliat pertumbuhan pelan-pelan bergerak pascapemulihan. Ekonomi mikro dan kecil menjadi salah satu sektor yang cepat bergerak serta memainkan peran penting. Pemerintah memfasilitasi UMKM melalui program restrukturisasi kredit karena yakin sektor mikro dan kecil mampu menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi pascapandemi. Pada Juli 2021 tercatat sebanyak 3,59 juta UMKM yang sudah memanfaatkan program pemulihan dengan nilai cukup besar yakni Rp285,17 triliun.

Menurut legislator Partai NasDem itu, catatan menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia adalah kontributor bagi peningkatan PDB setiap tahun sebelum pandemi. UMKM juga menjadi sektor yang menyerap lebih banyak tenaga kerja dan membuka lapangan kerja baru. Karena itu, kita mesti melihat bahwa UMKM sesungguhnya dapat diandalkan menjadi salah satu motor penggerak pemulihan ekonomi kita.

Kendati demikian, tambah Rerie, masih banyak permasalahan yang dihadapi sektor UMKM. Salah satu yang selalu dikeluhkan UMKM ialah kesulitan permodalan. Padahal permodalan sangat

diperlukan untuk membangkitkan usaha. Akan tetapi, kata Rerie, banyak pelaku UMKM yang kemudian terbentur dengan aturan yang ada. Salah satunya BI *checking*. Para pengusaha kecil dan menengah merasa BI *checking* menghambat mereka memperoleh akses permodalan.

Kita berharap krisis akibat pandemi segera berakhir dan kemajuan ekonomi dengan usaha kecil dan mikro menjadi bagian yang bisa menjadi penggerak dan titik balik untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi.

“Diskusi ini diadakan dengan maksud agar kita dapat bersama-sama mencari masukan, mendengarkan dan pada akhirnya sedapat mungkin mengurai hambatan yang terjadi dalam geliat pengembangan UMKM. Termasuk juga mencari masukan yang mungkin nantinya bisa membantu percepatan pemulihan. Masukan-masukan dari diskusi ini dapat kita teruskan kepada para pemangku kepentingan,” kata Rerie. ■



Kendati sudah ada KUR, fakta di lapangan begitu sulitnya peternak mendapatkan KUR yang bunganya 3% per tahun itu. Padahal kita membutuhkan jumlah peternak yang tidak sedikit.”

Wayan Supadno
Pelaku usaha pertanian

3 Lingkaran Masalah

PANDEMI covid 19 benar-benar menguji daya tahan sebuah negara menghadapi krisis. Indonesia tidak luput dari ujian itu. Namun, dari sekian banyak negara yang terdampak pandemi covid-19, Indonesia termasuk negara yang dianggap oleh penilai independen dunia berhasil mengelola situasi dampaknya.

Wayan Supadno, seorang pelaku usaha pertanian, dalam diskusi itu mengatakan, meski Indonesia tidak terperosok jauh dalam krisis ekonomi yang bersumber dari krisis kesehatan covid-19, masih banyak hal yang harus dibenahi dalam habitat dunia usaha kita. Salah satunya soal daya saing.

Menurut Wayan, sesungguhnya Indonesia termasuk negara yang kurang berdaya saing. Dalam indeks daya saing global, In-



M/IRAMDANI

Dewan juri foto bersama finalis dan pemenang Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2022 pada Malam Grand Final WMM 2022 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (8/11/2022). Sejak pertama kali diluncurkan pada 2007, WMM telah melahirkan lebih dari 56.000 wirausaha muda yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan hingga mampu menghadirkan ragam solusi bagi perekonomian Tanah Air.

donesia berada di peringkat ke-110 dari 132 negara. Artinya, bagi usaha pertanian, misalnya, ini menjadi masalah serius yang berdampak pada kecepatan memasarkan hasil pertanian.

Begitu pula dengan indeks inovasi global. Indonesia masih di peringkat ke-87 dari 132 negara. Artinya, kita dinilai belum refleksi dengan nuansa inovasi. Daya kreativitas masyarakat kita oleh peneliti independen dunia dianggap harus ditingkatkan lagi.

Indeks *entrepreneurship* kita juga masih di peringkat 94 dari

132 negara. Artinya, jiwa kewirausahaan masyarakat kita masih kurang. Itulah yang mengakibatkan kita mendatangkan banyak pengusaha atau investor dari luar negeri. Ini juga perlu dibenahi.

Dari mana memulainya? Menurut Wayan, itu harus dimulai dari diri kita, dari orangtua kita. Orangtua harus mulai mendidik anak-anaknya untuk berjiwa kewirausahaan, kemandirian, supaya jumlah pengusaha kita banyak, praktisi kita banyak.

Kalau yang berjiwa wirausaha sedikit, mau tidak mau pengangguran akan banyak atau PMA-nya akan banyak. Ini penting untuk dipahami bersama agar meningkatkan indeks *entrepreneurship* menjadi 50 besar. Kalau ini tidak segera ditindaklanjuti, akan menjadi masalah serius bagi bangsa ini ke depan. Jangan sampai kekayaan sumber daya alam ini dinikmati negara lain dan kita hanya sebagai pekerja.

Bangsa kita pun, kata Wayan, belum termasuk kompetitif. Harga pangan kita tergolong tertinggi di Asia. Contoh konkret ketika ada barang impor masuk, selalu menimbulkan keresahan karena kalah bersaing harga. Misalnya gula. Harga gula di Brasil, India, dan Thailand maksimum Rp6.000 per kilogram, tapi di Indonesia Rp11.000 atau Rp12.000 ribu per kilogram. Ketika gula mereka masuk ke Indonesia, pasti berdampak serius bagi petani kita.

Begitu juga dengan daging sapi. Harga daging sapi di luar negeri Rp40.000 per kilogram, sedangkan di Indonesia Rp55.000 per kilogram. Ini tanda-tanda bahwa kita kurang kompetitif.

Tingkat suku bunga perbankan kita masih tergolong ting-

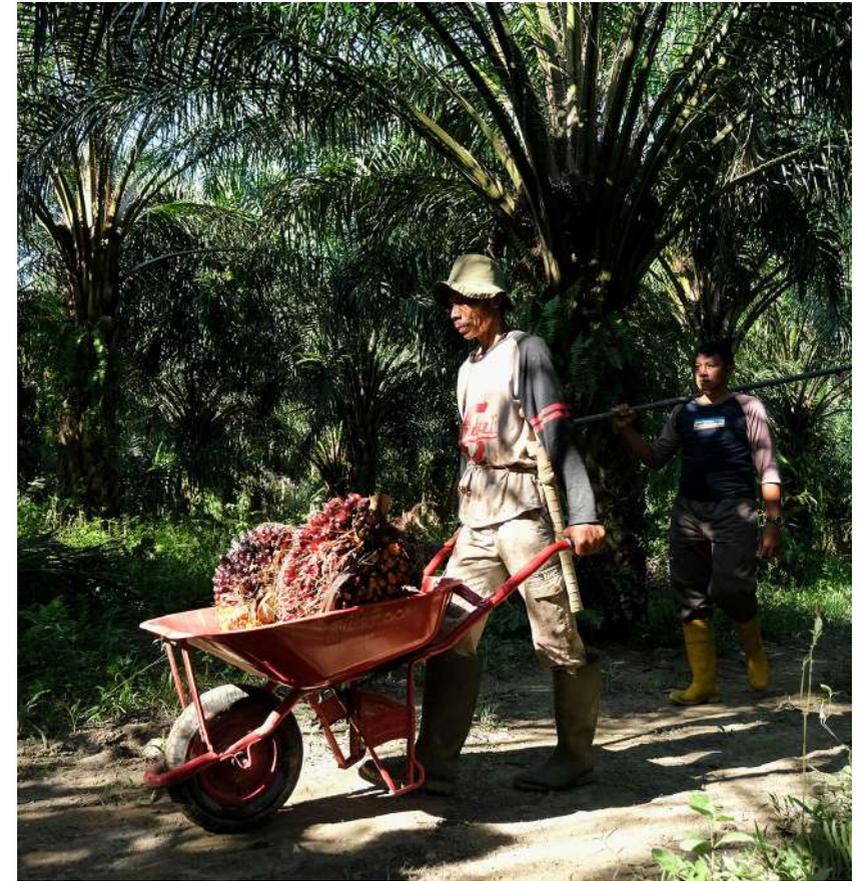
gi, 12%, bahkan ada yang 14%. Ini kumulatifnya menjadi beban petani. Contoh konkret, ada pabrik pupuk, bahan bakunya pakai utang bank kena bunga 12%. Pabrik dibangun pakai utang kena 12%, distributornya truknya kena 12% lagi, di toko kena 12% lagi. Jadi ini sudah berbentuk holistik yang mengakumulasi beban kehidupan kita.

Wayan mengaku sangat respek dengan kebijakan KUR dari pemerintah yang diberi subsidi bunga sampai 3%. Kendati sudah ada KUR, fakta di lapangan begitu sulitnya peternak mendapatkan KUR yang bunganya 3% per tahun itu. Padahal kita membutuhkan jumlah peternak yang tidak sedikit.

Kompleksitas ekonomi kita juga baru di peringkat 61. Artinya, kita masih suka ekspor barang mentah atau bahan baku. Kita belum mengekspor hasil-hasil produksi yang bernilai ekonomi tinggi, belum produk hilir yang bernuansa inovatif.

Contoh konkret, kita ekspor miliaran butir kelapa ke Tiongkok. Satu butir harganya kurang lebih Rp7.000. Oleh Tiongkok diproses. Dari airnya saja sudah lunas untuk membeli satu butir kelapa. Lalu batoknya bisa jadi karbon aktif. *Cocopeat*-nya bisa jadi pembalut wanita. Serabut atau *cocofiber*-nya bisa menjadi jok mobil dan seterusnya. Untuk kita, hal-hal seperti itu masih harus dipacu.

Di subsektor perkebunan juga sama. Menurut Wayan, kita memiliki kebun sawit terluas di dunia, sekitar 16,38 juta hektare. Di dalamnya ada 6,8 juta hektare milik 2,7 juta KK petani. Di dalam 6,8 juta hektare itu terdapat 2,7 juta hektare yang sudah ser-



Warga memanen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Desa Tanampulu, Banawa Selatan, Donggala, Sulawesi Tengah, Selasa (27/07/2021). TBS kelapa sawit tersebut kemudian dijual ke perusahaan pengolahan sawit dengan harga mulai dari Rp1.500 per kilogram. Saat ini pabrik minyak goreng kelapa sawit dimiliki pemodal besar, bukan milik kumpulan petani. Konsekuensi logisnya, harga dikendalikan satu pihak. Ini sangat tidak baik untuk masa depan bangsa karena akan terbentuk rasio kesenjangan sosial ekonomi masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan sosial.

tifikat hak milik dan APL (area penggunaan lain).

Petani kelapa sawit, walaupun memiliki proporsi luas 41% dari total sawit Indonesia, *output*-nya tidak lebih dari 32%. Produknya rendah, rendemennya rendah akibat yang ditanam ialah benih ilegal, bukan benih legal seperti yang ditanam PTPN maupun swasta besar. Dampaknya kesejahteraan petani rendah.

Petani sawit, jelas Wayan, mendapat pungutan ekspor yang tahun lalu terkumpul Rp71 triliun. Dia menyarankan, dari Rp71 triliun itu dialokasikan Rp3 triliun guna membeli 300 juta butir benih sawit dari pusat penelitian sawit untuk dibagikan kepada petani sawit yang memiliki lahan seluas 2 hektare. Jangan sampai petani sawit menunggu 25 tahun untuk panen dari benih yang palsu atau ilegal.

Masalah lain ialah inovasi teknologi yang belum membumi ke petani sawit. Saat ini pabrik minyak goreng kelapa sawit dimiliki pemodal besar, bukan milik kumpulan petani. Konsekuensi logisnya, kata Wayan, harga dikendalikan satu pihak. Ini sangat tidak baik untuk masa depan bangsa karena akan terbentuk rasio kesenjangan sosial ekonomi masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan sosial.

Solusinya ialah adanya inovasi-inovasi yang membumi dalam skala petani untuk mengubah berondolan sawit menjadi CPO/ minyak goreng atau provitamin A seperti di Nigeria. Menurut Wayan, hal-hal sederhana itu tidak ada di negeri kita. Ini ironis karena Indonesia memiliki areal sawit terluas di dunia dan pa-

kar sawit terbanyak sejagat. Di sisi lain, pungutan ekspor sawit dari petani mencapai Rp71 triliun, tapi tidak balik lagi ke petani. Ini juga mestinya menjadi perhatian serius pemerintah dan para pemimpin.

Wayan juga menyarankan adanya integrasi sawit dan sapi. Sapi diumbar di bawah sawit dan akan berbiak sendiri, nyaris tanpa memberi pakan karena sapi makan rumput di sekitar sawit. Perlu semakin banyak petani sawit yang mau mengintegrasikan sawit dan sapi supaya harga pokok produksinya rendah, yang akhirnya menambah laba. Ini penting disosialisasikan kepada masyarakat dan idealnya di-*backup* dengan KUR. ■



Pada akhirnya UMKM harus bertransformasi ke platform *online* walaupun memang belum siap atau memang secara literasi terhadap platform digital masih terbatas.”

Zahra Damariva
Pelaku usaha digital

4 Tantangan Digitalisasi UMKM

PANDEMI covid-19 membawa dua akibat bagi dunia industri. Di satu sisi, sebagian besar industri terpuruk bahkan gulung tikar. Di sisi lain, sebagian kecil industri justru berkembang. Salah satu dari sedikit industri yang berkembang ialah industri *startup* (perusahaan rintisan).

Zahra Damariva, pelaku usaha digital, mengaku bahwa pandemi berdampak pada akselerasi industri *startup*. Di masa pandemi, dari lima jenis industri *startup* yaitu *e-commerce*, logistik, kesehatan, pariwisata, dan fintech, dua yang terakhir relatif lebih terdampak. Pariwisata terkait dengan pembatasan mobilitas, sedangkan fintech dengan literasi keuangan. Meskipun mempunyai tujuan sendiri-sendiri, semuanya sama-sama inklusif ter-

hadap UMKM.

Tidak dimungkiri, kata Zahra, bahwa di masa pandemi ini yang kelihatan bertumbuh besar ialah *startup* yang berusaha memberdayakan UMKM. Pelaku UMKM juga berkembang signifikan. Mereka yang tadinya bekerja di kantor, kemudian karena krisis ekonomi beralih membuka usaha kecil, baik di bidang kuliner maupun fesyen dan sebagainya. Tren saat ini ialah *startup* berusaha membantu permasalahan yang dihadapi UMKM.

Tantangan yang dihadapi UMKM ialah turunnya daya beli masyarakat. Menurut Zahra, banyak UMKM yang menjual produknya melalui *startup* atau dibantu oleh *startup* masuk ke *e-commerce*. Walaupun sudah menjual melalui *startup*, omzetnya tetap turun karena daya beli masyarakat turun.

Dalam berbisnis sangat bergantung pada daya beli masyarakat. Di saat daya beli masyarakat turun kadang-kadang dibutuhkan permodalan untuk bisa mengeksplorasi produk-produk baru. Dalam situasi itu dibutuhkan cara berjualan baru selain permodalan.

Hal lain yang muncul dalam masa pandemi, kata Zahra, ialah pergeseran perilaku konsumen menjadi berbelanja *online*. Contohnya *user growth* pada restoran-restoran yang menyediakan pengiriman makanan meningkat di tahun 2020 sebesar 3% hingga diasumsikan pada saat itu naik hingga 82%. Transisi ini membuat pembelanjaan produk UMKM bergeser dari yang tadinya mungkin di bazar atau di toko, akhirnya terdampak bertransisi lewat



Konsumen sedang bertransaksi secara daring melalui salah satu *e-commerce*, beberapa waktu lalu. Selama masa pandemi, perilaku konsumen bergeser ke berbelanja daring, yang ditandai dengan pertumbuhan cukup signifikan pengguna *e-commerce*. Transisi ini membuat pembelanjaan produk UMKM sebagian berubah dari sebelumnya secara langsung ke transaksi secara daring.

online. Harus berjualan melalui platform digital.

Pada akhirnya UMKM harus bertransformasi ke platform *online* walaupun memang belum siap atau memang secara literasi terhadap platform digital masih terbatas.

Industri *startup* mencari banyak upaya untuk membantu UMKM dalam tiga hal, yaitu permodalan, transformasi perusahaan UMKM konvensional menjadi digital, dan menciptakan cara baru berjualan.

Startup banyak yang memberdayakan UMKM lewat kolaborasi dengan fintech *P2P lending* untuk memberikan permodalan. Namun, persentase konversi dari UMKM yang mengajukan pendanaan dan yang mendapatkan pendanaan masih kecil. Misalnya yang mengajukan ke fintech berjumlah 100, akhirnya hanya 3 yang lolos mendapatkan pendanaan, yang tidak lolos 97.

Tentunya, kata Zahra, fintech punya standar. Yang pertama ialah *BI checking* yakni pengecekan riwayat kredit di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia yang dilakukan oleh debitur. Ini yang menjadi kendala UMKM tidak mendapatkan pendanaan.

Kedua, secara administrasi banyak UMKM baru memulai usaha. Mereka belum punya badan usaha, belum ada pajak, dan lain-lain. Mereka memang belum *settle* karena baru memulai bisnis di masa pandemi akibat tidak bisa bekerja lagi. Ini juga menjadi penyebab banyak yang tidak lolos fintech karena administrasi perusahaannya tidak lengkap.

Lalu ada pula yang tidak bisa mendapatkan permodalan karena perusahaan fintech mempunyai standar, misalnya mewajibkan omzet UMKM per bulan Rp500 juta. Padahal banyak UMKM baru saja memulai usaha dan tidak mempunyai omzet sebanyak itu. Jadi, tambah Zahra, banyak faktor yang menyebabkan konversi

dari mengajukan pendanaan hingga mendapatkan pendanaan ini sangat kecil.

Pertanyaannya, bagaimana UMKM-UMKM konvensional bisa bertransformasi berjualan secara digital? Sebenarnya tidak sulit. Mulai dari di media sosial lalu berjualan di *e-commerce*. Dalam berjualan ada yang punya kanal sendiri. Banyak *startup* yang membantu kanal penjualan digital untuk UMKM.

Dalam digitalisasi UMKM masih banyak persoalan yang dihadapi, terutama menyangkut permodalan. Kerja sama dengan bank masih sulit karena banyak UMKM masih kecil dan belum punya aset, tidak bisa memberikan kolateral kalau harus meminjam uang. Akhirnya UMKM hanya bisa kerja sama dengan fintech. Tetapi fintech pun punya syarat sendiri.

Berbicara mengenai digitalisasi UMKM juga memberikan pelajaran bahwa banyak UMKM yang harus bertahan hidup dan tidak punya energi untuk belajar hal baru atau belajar berkolaborasi dengan perusahaan digital. Maka, harus ada semacam inkubator. Atau pemerintah membuat program yang memberikan dampak langsung untuk transaksi. Jadi, begitu ada digitalisasi, langsung ada transaksi yang naik. ■



Bisnis sekecil apa pun yang dilakukan UMKM harus berpedoman pada lima prinsip dasar bisnis. Yang paling diperlukan dalam bisnis ialah ide, tim, model bisnis, dana, dan *timing*.”

Tri Mumpuni

Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (Ibeka)

5 Manajemen Profesional

TIDAK bisa dimungkiri, salah satu sektor paling terdampak akibat pandemi covid 19 ialah pariwisata. Pelaku UMKM di bidang pariwisata yang *booming* sebelum 2020, tiba-tiba seperti dihajar gelombang tsunami, porak-poranda dan babak belur.

Donny Kris Puriyono, Presiden Komunitas Tangan di Atas (TDA) 2019-2021, *owner* Malang Strudel, mengaku sangat merasakan dampak pandemi covid 19. Sebagai pelaku UMKM di bidang pariwisata, kata Donny, sebelum pandemi covid-19, industri pariwisata khususnya UMKM mengalami *peak season* dua kali dalam satu tahun. Yang pertama di masa Lebaran dan kedua saat akhir tahun. Pada *peak season* itu omzet bisa berlipat 3-5 kali jika

dibandingkan dengan biasanya.

Pada Maret 2020 pandemi mulai masuk ke Indonesia. Padahal Lebaran jatuh pada Mei 2020. Biasanya dua bulan sebelum Lebaran, pelaku UMKM sudah mulai memproduksi besar-besaran. Ada yang 3 sampai 5 kali lipat rata-rata, yang kemudian disetorkan ke toko-toko. Akan tetapi, karena covid-19 mulai menyerang, pemerintah membuat kebijakan membatasi kegiatan Lebaran.

Akibatnya barang-barang yang sudah diproduksi para pelaku UMKM sebagian besar tidak bisa terjual. Hal itu diperparah lantaran banyak produksi UMKM itu *expired* karena masa kedaluwarsanya tidak terlalu lama. Ini merupakan kebangkrutan pertama UMKM yang bergerak di bidang pariwisata.

Setelah itu, situasi sempat membaik pada Oktober-November 2020. Walaupun belum normal, melihat kondisi itu, para pelaku UMKM hendak sedikit balas dendam karena Lebaran sebelumnya tidak bisa panen. Mereka berharap bisa panen di akhir tahun 2020. Karena data covid-19 pada November 2020 itu bagus, di awal Desember mereka sudah mulai memproduksi lagi. Produk-produknya lumayan banyak meskipun tidak sebanyak di Lebaran 2020. Ternyata minggu ketiga Desember 2020 pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan di berbagai daerah. Nah, ini merupakan kebangkrutan kedua bagi pelaku UMKM.

Lebaran 2021 sekali lagi dibatasi pemerintah. Pengalaman dua kali bangkrut memberikan pelajaran bagi pelaku UMKM di bidang pariwisata sehingga tidak memproduksi sebanyak tahun

sebelumnya. Pelaku UMKM sudah mulai melakukan *pivot* bisnisnya, melirik digital. Namun, ternyata tidak semudah itu mengubah *mindset*-nya UMKM, apalagi mereka juga mungkin tidak mempunyai banyak *resources* untuk beralih ke digital.

Selama perjalanan tahun 2021 sebenarnya omzet yang paling drop itu terjadi pada Juli sampai Agustus di saat muncul varian delta. Efeknya sangat luar bisa ketimbang di awal-awal covid. Selama Juli sampai Agustus bahkan September itu benar-benar drop dan banyak UMKM gulung tikar.

Pada Desember 2021, omzet sudah mulai membaik kembali. UMKM juga sudah mulai mempelajari pola-pola pandemi. Jadi tidak memproduksi barang sebanyak-banyaknya seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan produksi seadanya, kita melewati Desember 2021 dengan baik-baik saja. Pemerintah juga tidak melakukan banyak pembatasan. Tetapi, sayangnya, *traffic* wisatawan yang sedemikian besar tidak bisa dimanfaatkan pelaku UMKM karena produksinya sudah terbatas.

Pada Januari 2022 juga masih bagus. Tetapi pada Februari jatuh lagi karena omicron. Meskipun pemerintah tidak melakukan pembatasan, wisatawan masih jarang melakukan perjalanan. Ini memengaruhi omzet pelaku UMKM di bidang oleh-oleh.

Pelaku UMKM berharap Lebaran 2022 bisa menjadi 'pesta omzet' setelah dua kali Lebaran masyarakat tidak mudik. Tapi pengalaman Malang Strudel, kata Donny, masalahnya ternyata dari sekitar 2.000 UMKM yang bergabung, sebanyak 45%-nya su-



MIBARY FATHAHILLAH

Pekerja membuat kue kering pesanan konsumen di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat, Selasa (5/5/2020). Kue kering yang dijual dari harga Rp60.000 hingga Rp115.000 per toples tersebut pada bulan Ramadan mengalami penurunan penjualan akibat pandemi covid-19. Biasanya dua bulan sebelum Lebaran, pelaku UMKM sudah mulai memproduksi besar-besaran. Akan tetapi, karena covid-19 mulai menyerang, barang-barang yang sudah diproduksi para pelaku UMKM sebagian besar tidak bisa terjual.

dah tidak bisa memasok lagi produk-produk mereka karena sudah kolaps, kemudian menjual aset produksinya.

“Jadi di saat kami mungkin bisa membantu mereka secara finansial dengan membeli barang di awal, ternyata mereka sudah tidak bisa memproduksi barang karena alat-alat produksi sudah dijual,” kata Donny.

Problem terbesar UMKM saat ini memang rentan sehingga mereka sulit mendapatkan akses ke perbankan. Bahkan bantuan langsung pemerintah pun ternyata susah mereka dapatkan.

Menurut Donny, masa pandemi mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam berbisnis termasuk UMKM dibutuhkan manajemen yang sangat profesional karena kita makin tahu bahwasanya krisis apa pun bisa datang kapan pun tanpa diduga-duga.

Pelajaran lainnya ialah mengelola usaha memang harus dengan prinsip menghasilkan, bisnis yang benar-benar *sustainable* dan bisa *scalable*. *Sustainable* dan *scalable* itu mungkin bisa terjadi bila kita ikut membangun ekosistem dalam bisnis yang kita jalani.

“Malang Strudel tidak hanya membangun toko oleh-oleh, tapi kita juga membangun ekosistem pariwisata di Malang. Kami membangun media, kami membangun bisnis-bisnis lain selain oleh-oleh seperti destinasi wisata dan lain-lain,” kata Donny lagi.

Ekosistem itu bisa dibangun lewat kolaborasi dengan banyak pihak. Menurut Donny, Malang Strudel membuat program desa berdaya, membikin inkubator kecil-kecilan untuk para pemuda

desa, melatih konsep bisnis, pemahaman bisnis, model bisnis, dan mempertemukan mereka dengan para investor lokal maupun nasional, menjoinkan mereka kepada beberapa fintech semacam *funding*. Harapannya mereka bisa memberdayakan desanya lebih baik lagi. Karena Malang Strudel bergerak di bidang pariwisata, maka yang dilakukan ialah membangun banyak destinasi wisata baru yang disesuaikan dengan kondisi *new normal*.

Bisnis sekecil apa pun yang dilakukan UMKM harus berpedoman pada lima prinsip dasar bisnis. Menurut Tri Mumpuni dari Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (Ibeka) dalam Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 23 Maret 2022, yang paling diperlukan dalam bisnis ialah ide, tim, *business model*, dana, dan *timing*. Tetapi kalau ditanya dari kelima aspek itu apa yang paling diperlukan, jawabannya selalu dana. “Itu salah besar,” kata Tri.

Ternyata, imbuh Tri, keberhasilan bisnis itu ditentukan *timing*. Jadi seseorang harus membuat tokoh fiktif sebagai pembeli untuk melihat pembeli itu seperti apa. Urutan berikutnya ialah tim. Tim itu penting karena dia harus mendapatkan orang yang *qualified*. Lalu ide harus divalidasi dengan *feasibility study*.

Selanjutnya *business model* dan terakhir barulah pendanaan. *Business model* itu untuk tahu siapa kompetitor, apa keunikan produk kita, dan lain-lain. Strateginya harus benar. *Funding* harus didukung oleh empat pilar itu sehingga dana tersebut bisa dijalankan secara benar. Untuk itu, semua harus ada pelatihan demi memberi kesempatan *sharing knowledge*.

Bagaimana bisnis dengan masyarakat yang bisa memberikan profit sekaligus *benefit*? Orang memulai usaha di awal-awal ada yang namanya *survival zone* yakni harus mencari *optimum income for sustainability*.

Menurut Tri, jurang kematian dari pebisnis, yang pertama ialah memakai uang sendiri. Kedua, dibantu oleh saudara. Ketika usaha mulai kelihatan berkembang, barulah mendapatkan *support* dari *angel investor*. Tapi hati-hati ada *inflection point*, di mana kalau gagal dan tidak bisa bangkit, ya *wassalam*. ■



Pemerintah perlu sensitif memilah kebijakan yang tepat di masa normal dengan kebijakan di masa pandemi. Kebijakan *BI checking* bermanfaat di masa normal, tetapi memberatkan di masa pandemi.”

Radityo Fajar Arianto
Direktur Sparklabs Incubation
Universitas Pelita Harapan

6 Pembangunan SDM Digital

PEMERINTAH membuat kebijakan di masa pandemi covid-19 untuk menyelamatkan dan membangkitkan UMKM karena yakin UMKM dapat menjadi motor dan lokomotif pemulihan ekonomi nasional setelah terpuruk akibat pandemi covid-19.

Namun, menurut Dianta Sebayang, Ketua Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis LPPM, Universitas Negeri Jakarta, banyak kebijakan yang tepat, tetapi tidak tepat sasaran. Belum lagi kebijakan yang tidak tepat dan menghambat pertumbuhan UMKM.

Salah satu yang selalu dianjurkan ialah soal digitalisasi usaha oleh UMKM. Memang para pelaku UMKM yang beralih ke digital mengalami peningkatan transaksi sebesar 20%. Bagi yang tidak

melakukan transformasi digital, hambatannya itu pada konsumen, karena banyak konsumen sudah menjadi konsumen digital, tapi *supplier*-nya UMKM belum beralih ke digital.

Jumlah pelaku UMKM memang banyak. Tetapi tingkat pendidikan mereka juga banyak yang masih rendah, tidak lulus SD atau lulus SD, bukan sarjana. Ini juga menjadi tantangan tersendiri.

Pandemi menyadarkan kita bahwa lompatan-lompatan digitalisasi menjadi penting agar bisa bertahan dalam menghadapi bukan hanya cobaan pandemi, tetapi membuat kita pun akhirnya kuat di masa mendatang.

Menurut Dianta, kunci memasuki digitalisasi usaha ialah sumber daya manusia (SDM). Presiden Joko Widodo menyatakan ingin menonjolkan pembangunan SDM dan infrastruktur. Tetapi, menurut Dianta, harus ada elaborasi yang lebih spesifik yakni pembangunan SDM digital dan infrastruktur digital karena jaringan kita tidak begitu stabil.

Pemerintah perlu sensitif memilah kebijakan yang tepat di masa normal dengan kebijakan di masa pandemi. Kebijakan *BI checking*, misalnya, kata Radityo Fajar Arianto, Direktur Sparklabs Incubation Universitas Pelita Harapan yang juga pemerhati UMKM, bermanfaat di masa normal, tetapi memberatkan di masa pandemi. Kebijakan perbankan memang harus *prudent* karena masyarakat percaya menitipkan dananya di perbankan untuk disalurkan. Makanya perlu mitigasi risiko kredit melalui perangkatnya, yakni *BI checking*.

Namun, di masa pandemi ini, mungkin perlu kebijakan membantu UMKM dengan cara misalnya moratorium *BI checking*. Jangan dilihat dulu kredit usaha yang macet lebih dari 180 hari untuk jumlah misalnya di bawah Rp10 juta atau di bawah Rp20 juta. Itu nanti bisa dihitung sebenarnya berapa kalau diputihkan.

Akan tetapi, kata Raditya, bukan dalam arti utangnya diputihkan, tetapi kliring. Mungkin ini usulan kontroversial. Tetapi dengan melakukan itu sebenarnya pemerintah tidak *spending money* satu rupiah pun karena hanya menghapus *record* atau menghentikan *record checking*-nya. Biarlah UMKM mengakses dulu dana agar bisa tumbuh sehingga *recovery* lebih cepat.

BI checking seperti lingkaran setan. Pelaku UMKM di Indonesia berjumlah 64 juta. Itu sama dengan 99,99% dari pelaku usaha di Tanah Air. Kalau melihat itu, kita tidak bisa menganggap enteng peran UMKM. Tetapi pandemi ini melumpuhkan UMKM sehingga banyak UMKM mengalami kredit macet. Jadi ketika mereka mau *recover*, barang modal dijual, tetapi belum bisa menutup utangnya. Ketika mau pinjam lagi untuk *recover* tidak bisa karena ada *BI checking*.

Jika melihat pertumbuhan kredit, mencapai puncak minus itu pada Maret 2021, sebesar -25%. Sekarang pertumbuhan kredit UMKM sudah 13%-14%. Pemerintah menetapkan rasio kredit UMKM di tahun 2024 sebesar 30%. Artinya 30% untuk UMKM dan 70% untuk usaha yang bukan UMKM. Dengan alokasi kredit perbankan 30% untuk UMKM, diperkirakan sekitar 77,6% atau

setara dengan 46 juta pelaku UMKM, belum mendapat akses pembiayaan.

Sekali lagi, 99,99% pelaku usaha di Indonesia ialah UMKM. Bahkan 97% tenaga kerja Indonesia itu ada di sektor UMKM. Jumlah UMKM sebanyak 64 juta. Kalau mereka punya anak, istri, maka sekitar 190 juta orang dari 270 juta penduduk Indonesia bergantung pada UMKM. Jadi masalah UMKM ialah masalah perekonomian terbesar di Indonesia.

“Kalau kita bisa menyelesaikan masalah UMKM, berarti kita bisa menyelesaikan masalah 99,99% pelaku usaha di Indonesia. Kita bisa menyelesaikan 97% masalah tenaga kerja di Indonesia,” kata Raditya lagi.

Saat menutup diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat mengatakan di masa pandemi pertumbuhan bank pemerintah tambah hebat. Profit BRI naik 66,5%. Keuntungan Bank Mandiri naik 66,8%. Pertumbuhan profit bank yang tinggi itu membuat kita harus mengatakan bahwa kebijakan pemerintah tidak perlu pada unit usaha UMKM ini.

Menurut Saur, perlu membandingkan antara BI *checking* dan ‘tantiem *checking*’. Di masa pandemi, BI *checking* dirasa menghambat karena pelaku UMKM kesulitan mendapatkan kredit lagi setelah adanya kredit macet. Sebaliknya perbankan memberikan ‘tantiem’ sebagai penghargaan kepada direksi dan komisaris bank pemerintah karena mendapatkan profit yang besar.

Sebagai gambaran, kata Saur, 12 direksi BRI rata-rata mem-

peroleh tantiem sebesar Rp28,3 miliar per orang per tahun. Jadi, kalau bank menyalurkan 30% kredit kepada UMKM yang menyerap tenaga kerja 97% berbanding dengan 70% kredit untuk non-UMKM yang menyerap tenaga kerja sangat kecil, kiranya jawaban itu bisa didapat pada adanya ‘tantiem *checking*’ tersebut.

Di mana-mana pandemi menyebabkan bisnis kecil mengalami krisis yang sangat serius menyangkut likuiditas. Karena itu, Amerika Serikat mengambil langkah yang lebih luas dengan memberikan suntikan likuiditas. Pertanyaannya, berapa banyak orang Indonesia yang memiliki cadangan hidup untuk tiga bulan? Berapa banyak bisnis kecil yang memiliki cadangan likuiditas untuk tiga bulan? Apalagi dua tahun pandemi? Mereka tidak hanya memerlukan infus, tapi juga ventilator. Bisakah pemerintah mengurangi tensi para pelaku UMKM itu? ■

The background features a dark blue batik pattern with intricate geometric and floral motifs. A diagonal yellow bar and several thin white lines cross the upper left portion of the image. In the top right corner, the letters 'VI' are displayed in a large, bold, blue sans-serif font.

VI

**Membumikan Bangga
Produk Indonesia**

1 Latar Belakang: Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

PRESIDEN Joko Widodo pada 25 Maret 2022 mendorong semua elemen masyarakat agar menggunakan produk dalam negeri dan mengurangi penggunaan produk-produk impor. Presiden meminta agar kebiasaan menggunakan dan mengutamakan produk impor tidak diteruskan.

Kebijakan substitusi impor dengan produk dalam negeri harus segera dilakukan. Tentu banyak tantangan yang dihadapi, misalnya kualitas produk dalam negeri yang belum merata dan kapasitas produksi yang belum mampu memenuhi peningkatan permintaan masyarakat.

Tantangan tersebut harus menjadi pemantik semangat semua pihak terkait untuk terus berupaya meningkatkan kualitas dan

kuantitas produk dalam negeri, bukan malah mengandalkan produk-produk impor sebagai jalan keluarnya.

Menurut Direktur Center of Economics and Law Studies (Celsius) Bhima Yudhistira, sejak dulu memang belum ada perbaikan yang signifikan tentang pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga pemerintah. Mereka kerap berdalih produk UMKM tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Padahal mereka sesungguhnya lebih pro terhadap produk-produk dari luar negeri.

Pemerintah pusat dan daerah didorong untuk mengoptimalkan belanja barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri. Belanja pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri tahun 2022 ditargetkan mencapai Rp400 triliun melalui katalog elektronik atau *e-catalog* dan toko daring.

Kewajiban menggunakan produk dalam negeri oleh pemerintah pusat dan daerah telah diatur dalam sejumlah regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Selain itu, pada 8 September 2021 dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, yang diketuai Menko Kemaritiman dan Investasi. Target utamanya ialah menjadikan produk lokal sebagai tuan rumah di negeri sendiri.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jika seluruh anggaran

dan belanja pemerintah dibelanjakan untuk produk dalam negeri dan tidak membeli produk impor, ekonomi nasional berpotensi meningkat sebesar 3,79%. Selanjutnya bila belanja pemerintah pusat dan daerah dialokasikan sebesar 40%-50% untuk produk dalam negeri dan UMKM, ekonomi nasional dapat meningkat 1,5% pada 2022.

Situasi di atas menjadi tantangan besar yang harus dijawab bersama demi mengembalikan perhatian publik nasional mengenai kerja besar yang masih belum selesai dan membutuhkan prioritas tinggi. Kerja besar dan kerja sama itu mutlak diperlukan agar seruan cinta produksi dalam negeri atau bangga pada produk dalam negeri tak berhenti hanya sebagai jargon. ■



Perubahan investasi dan infrastruktur serta penelitian dan pengembangan pendidikan kita sudah sangat dinamis. Oleh karena itu, para pemangku kebijakan mesti melihat dan menyelaraskannya dengan perkembangan kekinian.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 **Bangga Buatan Indonesia Wujud Kedaulatan Bangsa**

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi bertajuk Membumikan Bangga Produk Indonesia yang berlangsung pada Rabu, 30 Maret 2022, menyatakan topik tersebut akhir-akhir ini menjadi pembahasan, baik di kalangan pemangku kepentingan maupun masyarakat luas. Terlebih setelah Presiden Joko Widodo pada 25 Maret 2022 menyampaikan kekusarannya karena data menunjukkan ketergantungan kita terhadap produk impor sangat tinggi. “Temuan menunjukkan belanja institusi pemerintah ternyata lebih banyak menggunakan produk-produk impor,” ungkap politikus Partai NasDem yang akrab disapa Rerie itu.

Salah satu catatan yang dikeluarkan oleh Center of Economic

and Law Studies (Celios) menyatakan, berdasarkan hasil penelitian mereka, sejak dulu memang tidak ada perbaikan yang signifikan dari pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga. Salah satu alasan yang sering disampaikan ialah barang-barang yang disediakan oleh para produsen lokal tidak memenuhi standar yang ditentukan.

Ada gap antara *requirement* dan barang yang dihasilkan. Padahal kita tahu persis, dengan berkembangnya ekonomi digital, banyak sekali perubahan perilaku terhadap konsumen, dan itu dibarengi berubahnya pola persediaan barang di pasaran.

Tentu tidak mungkin bisa menutup begitu saja masuknya barang-barang impor, apalagi dengan harga yang sangat bersaing dan sangat mudah didapat. Oleh karena itu, para produsen dalam negeri perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan sebagaimana yang diharapkan konsumen.

“Perubahan investasi dan infrastruktur serta penelitian dan pengembangan pendidikan kita sudah sangat dinamis. Oleh karena itu, para pemangku kebijakan mesti melihat dan menyelaraskannya dengan perkembangan kekinian,” kata Rerie.

Pertanyaannya, bagaimana kita memberikan arti atau makna sebuah frasa yang dari dulu sudah kita kenal? Ia mencontohkan dulu ada lagu *Bangga Buatan Indonesia*, bahkan ada kementerian khusus yang menangani produk-produk dalam negeri.

Sebetulnya frasa ‘bangga buatan Indonesia’ sudah sejak lama digaungkan. Namun, yang harus dilakukan sekarang ialah

bagaimana agar frasa itu tidak hanya berhenti pada slogan, tapi harus benar-benar diaplikasikan melalui langkah dan tindakan konkret.

Bangga buatan Indonesia, menurut Rerie, tidak hanya urusan pasar, tapi juga terkait dengan kedaulatan negara. “Di sini kita bicara ketahanan sebagai suatu bangsa, di sini juga kita bicara masalah harga diri sebagai sebuah bangsa, karena bangsa akan buatan Indonesia adalah wujud kedaulatan kita sebagai bangsa,” tegas legislator NasDem itu.

Itu barangkali yang mendasari diskusi kali ini dan bagaimana bangsa buatan Indonesia bisa menjadi sebuah frasa yang betul-betul terlihat di dalam keseharian kita dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. ■



Tata kelola kebijakan pangan nasional meliputi pengelolaan cadangan pangan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Juga pengadaan dan penyiapan pasokan pangan untuk stabilisasi pasokan serta stabilisasi harga pangan.”

Sarwo Edhy

Plt Sekretaris Utama Kepala Badan Pangan Nasional

3 Merumuskan Kebijakan Ekspor-Import

SALAH satu masalah besar yang menyangkut produksi dalam negeri ialah swasembada pangan. Pada dasarnya kita masih bergantung pada impor beras, terutama mengingat strategisnya pengamanan stok nasional yang berkaitan dengan stabilitas politik. Perut rakyat yang lapar rawan dieksploitasi.

Untuk mengamankan kedaulatan pangan, pemerintah memandang sangat penting membentuk lembaga baru bernama Badan Pangan Nasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Kepala Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, menjelaskan mengenai landasan hukum serta tugas dan tanggung jawab Badan Pangan Nasional.

Menurutnya, Badan Pangan Nasional berdiri berdasarkan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021. Jenis pangan yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional ada sembilan, yaitu beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang merah, bawang putih, telur, daging, dan cabai.

Dalam Pasal 28 perpres tersebut terdapat pendelegasian wewenang kepada Badan Pangan Nasional dari Kementerian Perdagangan untuk merumuskan kebijakan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga, distribusi, perumusan kebijakan, serta penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan.

Juga ada pendelegasian dari Kementerian Pertanian untuk merumuskan kebijakan dan penetapan besaran jumlah cadangan pangan pemerintah yang akan dikelola oleh badan usaha milik negara di bidang pangan serta perumusan kebijakan dan penetapan harga pembelian pemerintah.

Ada pula pendelegasian wewenang dari Kementerian BUMN kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk memutuskan penugasan Perusahaan Umum Bulog dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangannasional.

Dalam perkembangannya, jelas Sarwo, tata kelola kebijakan pangan nasional meliputi pengelolaan cadangan pangan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Juga pengadaan dan penyiapan pasokan pangan untuk stabilisasi pasokan serta stabilisasi harga pangan.

Selain itu, melakukan pengawasan mutu gizi dan keamanan pangan serta pengentasan kerawanan pangan. “Ini merupakan

kebijakan-kebijakan yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, Badan Pangan Nasional menetapkan rencana kebutuhan pangan melalui sistem yang dikelola oleh Menteri Perekonomian serta kementerian/lembaga teknis untuk rekomendasi teknis, seperti Kementerian Perdagangan untuk perizinan importasi. Penugasan kepada Bulog untuk mengatur sembilan jenis komoditas melalui mekanisme stabilisasi cadangan dan harga pangan serta penugasan nonkomersial kepada badan usaha milik negara. ■



Perlu dibangun strategi baru untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan holistik. Pembangunan di bidang apa pun, dasarnya ialah pembangunan masyarakat menuju keadilan sosial.”

Muhammad Fadhil Nurdin
Guru Besar Sosiologi Pembangunan
Universitas Padjadjaran

4 Modal Sosial untuk Membangun Partisipasi Baru

MUHAMMAD Fadhil Nurdin, Guru Besar Sosiologi Pembangunan Universitas Padjadjaran, mengawali paparannya dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan membumikan bangga buatan Indonesia?

“Saya melihat itu sebagai ranah aplikasi *social science* dalam dimensi praktik pembangunan masyarakat berasaskan pada filsafat nilai-nilai dan pengetahuan yang dikonstruksikan banyak negara di dunia. Ini menjadi dasar utama dalam aplikasi sosiologi pembangunan,” jelasnya dalam diskusi yang dipandu Luthfi Asyaukanie, tenaga ahli Wakil Ketua MPR RI, Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah.

Selanjutnya, menurut Fadhil, bila dikatakan sebagai gerakan



Pengunjung melihat berbagai macam produk kopi pada Livin' Jakarta Coffee Week (Jacoweek) 2021 di Mal of Indonesia, Kelapa Gading, Jumat (26/11/2021). Jacoweek merupakan perhelatan tahunan yang mempertemukan para penggemar kopi dengan puluhan gerai kopi populer, yang dimeriahkan dengan kompetisi *manual brew*. Jacoweek menjadi rangkaian dari program Bangga Buatan Indonesia.

nasional maka upaya tersebut merupakan suatu realitas. Realitas tersebut menjadi modal sosial untuk memberi kontribusi membangun gerakan partisipatori baru. Gerakan nasional bangga dengan buatan Indonesia harus dikonstruksikan sebagai gerakan baru.

Bagaimana menggerakkan dan menguatkan para aktor pembangunan untuk masuk dalam gerakan tersebut, menurutnya, yang terpenting ialah menjadikan gerakan itu sebagai agenda politik yang dapat menggerakkan semua elemen masyarakat untuk menyukceskannya.

Ia menjelaskan sosiologi pembangunan bergerak dari paradigma *realism to constructivism* yang fokus pada *action model* dengan metode berpikir filosofis maupun teori-teori sosiologi untuk pembangunan. “Ini memerlukan pemikiran transformatif dan kolaboratif melalui riset-riset. Kata kuncinya ialah riset untuk menghasilkan pemikiran filosofis dan konstruktif,” papar Fadhil.

Inti dari gerakan nasional secara filosofis ontologis disebutnya terdapat makna dan isu, yaitu harus jelas dan harus dicari, dibentuk, dibangun melalui saintisasi-*rediscovery* dan perjuangan aktor. Gerakan nasional harus dikonstruksikan ada perjuangan aktor.

Karena itu, katanya, perlu ada *agenda setting* yang dikonstruksikan dan agenda politik yang menjadi pedoman konvergensi menuju perubahan. Untuk mencapai perubahan yang kita tuju harus dimulai dengan perubahan kelembagaan dan perubahan sikap.



MISUSANTO

Perajin menunjukkan produk-produk buatannya dalam pembukaan pameran NasDem UMKM Trade Show (NUTS) di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022). Para pelaku UMKM harus terus meningkatkan kualitas produk mereka. Hal itu penting karena tanpa adanya kualitas yang memadai, kita tidak dapat memaksa masyarakat menggunakan produk dalam negeri.

Untuk itu, menurut Fadhil, perlu dibangun strategi baru untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan holistik. Pembangunan di bidang apa pun, dasarnya ialah pembangunan masyarakat menuju keadilan sosial. “Pendekatannya harus menggunakan filsafat universalisme, selektivisme, dan campuran.”

Model pembangunan masyarakat semacam itu sederhana.

Ada peran pemerintah menegaskan tentang fungsi kekuasaan, partisipasi masyarakat, dan sasaran yang mau dibangun. “*Evaluation strategic* intinya ialah *evaluation based on social realities*, jadi masalahnya ada pada realitas sosial,” ucap Fadhil.

Gerakan nasional, imbuhnya, perlu mengintegrasikan seluruh kelembagaan yang ada karena kata kunci dari setiap gerakan ialah pelembagaan terhadap gerakan tersebut. Untuk mendukungnya, pemerintah dan swasta harus bersama mengembangkan strategi kolaborasi baru berasaskan riset dan kajian yang mendalam.

Pada sisi lain, lanjut Fadhil, secara akademik perlunya saintisasi. Tidak hanya aplikasi untuk kepentingan birokrasi dan organisasi, tapi juga saintisasi. Perlu ada sinergi, baik politik, agama, spiritual, sosial, maupun ekonomi melalui pelatihan dan kolaborasi yang fokus pada peningkatan kemampuan di antara para agen perubahan pembangunan. ■



Produsen harus meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Hal itu penting karena tanpa adanya kualitas yang memadai, kita tidak dapat ‘memaksa’ masyarakat menggunakan produk dalam negeri.”

IGK Astawa

Sesditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI

5 Menjadi Gerakan Bersama yang Utuh

NARASUMBER lainnya, IGK Astawa, Sesditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI, mengungkapkan bahwa bangga buatan Indonesia sebenarnya sudah ada sejak pemerintahan masa lalu yang dikenal dengan istilah Bangga Buatan Indonesia atau Aku Cinta Indonesia. Itu merupakan upaya untuk meningkatkan kecintaan terhadap produk-produk dalam negeri.

Presiden Jokowi pada 14 Mei 2020 meluncurkan Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Peluncuran gerakan itu bersifat kolaboratif, tidak hanya di sektor pertanian, tapi juga untuk semua sektor dengan melibatkan seluruh *stakeholder* sebagai satu kesatuan yang utuh.

Di sisi lain, menurut Astawa, ada perkembangan budaya baru di bidang perdagangan yang menjadi *trigger* bagi kita semua, yakni maraknya perdagangan secara elektronik atau perdagangan *online* yang mengalami perkembangan sangat pesat.

Fenomena baru itu menjadi peluang di kala pandemi sehingga kegiatan perdagangan *online* mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Itu jadi peluang bagi produk-produk dalam negeri untuk berkontribusi dalam mengembangkan perekonomian nasional.

Apa yang menjadi dasar bagi Kementerian Perdagangan dalam meningkatkan minat penggunaan produk dalam negeri? Dasar hukumnya ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta sejumlah aturan pelaksana lainnya seperti Permendag Nomor 72 Tahun 2013 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor Nonfarmasi dan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. “Ini landasan hukum bagi Kementerian Perdagangan dalam meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri,” jelas Astawa.

Strategi apa yang disiapkan oleh Kementerian Perdagangan? Yang pertama ialah peningkatan proporsi produk dalam negeri yang diperdagangkan di pasar domestik. Kebijakan yang diterapkan antara lain mewajibkan minimarket dan supermarket mengutamakan penjualan produk dalam negeri.

Kedua, peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri. Ini menjadi poin penting karena harus ada kesadaran yang masif. “Tidak bisa kita hanya menem-



MI/RAWDANI

Warga menerima barang yang dibeli secara daring dari petugas jasa pengiriman barang di Perumahan Bambu, Kreo, Tangerang, Banten, Kamis (2/4/2020). Melalui transformasi digital, masyarakat bisa membeli produk UMKM secara daring. Pemerintah mendorong UMKM untuk mengembangkan usaha menggunakan platform-platform digital. Tujuannya ialah mempercepat kelangsungan usaha dan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM.

patkan atau memaksa orang berjualan produk dalam negeri tanpa ada kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk tersebut,” tegasnya.

Ketiga, peningkatan kesadaran produsen untuk menggunakan kandungan lokal yang lebih tinggi. “Tiga strategi tersebut diharapkan dapat membangkitkan semangat, kesadaran, dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri,” kata Astawa.



MIRAMIDANI

Pengunjung melihat dan membeli produk hasil kerajinan pada pameran Jakarta International Handicraft Trade Fair (Inacraft) 2023 di JCC, Jakarta, Rabu (1/3/2023). Pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara ini digelar berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai ikon utama. Mengangkat tema *From Smart Village to Global Market*, pameran yang berlangsung pada 1-5 Maret 2023 ini diikuti 1.118 UKM.

Produsen, imbuhnya, harus meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Hal itu penting karena tanpa adanya kualitas yang memadai, kita tidak dapat 'memaksa' masyarakat menggunakan produk dalam negeri. Semua aspek penting yang menjadi dasar peningkatan kualitas produk menjadi satu kesatuan yang harus dilaksanakan secara bersama dan kolaboratif.

Setelah diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada 14 Mei 2020 maka semua pihak terkait bertanggung jawab untuk mengakselerasi Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia, di antaranya melalui transformasi digital dan mendorong UMKM untuk mengembangkan usaha menggunakan platform-platform digital. Tujuannya ialah mempercepat kelangsungan usaha dan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM.

Selama 2021, ia mencatat terdapat 17,2 juta UMKM yang sudah *onboarding* di platform digital, seperti platform *marketplace*, dan perkembangan itu akan terus dipantau. Pada 2021 sebanyak 11 kementerian secara kolaboratif melaksanakan kegiatan Gernas Bangga Buatan Indonesia secara tematik di setiap provinsi sehingga mendorong UMKM untuk aktif memperkenalkan produk-produk yang mereka hasilkan. ■



Pembajakan merupakan musuh nomor satu dari usaha untuk menggiatkan konten-konten orisinal dalam negeri.”

Tina Arwin

Chief Content Officer Vidio.com

6 Memberdayakan Industri Kreatif

TINA Arwin, Chief Content Officer Vidio.com, menyatakan hampir 90% konten yang mereka miliki ialah konten Indonesia, baik yang diproduksi sendiri maupun konten-konten yang didapatkan dari luar. Hingga Februari 2022, masih menunjukkan performa yang sangat baik dalam artian masih mendapat *ranking* satu di android maupun di iOS App Store.

“Kita masih menduduki *ranking* satu pada layanan media yang ditawarkan langsung kepada penonton melalui internet atau *over the top* (OTT) dengan pengguna aktif bulanan terbanyak. Juga mendapatkan jumlah menit *streaming* terbanyak dari merek-merek OTT yang ada di Indonesia. Hal itu menunjukkan animo pada konten lokal masih menjadi suguhan utama yang dicari oleh

penonton *streaming service* maupun *broadcast* di Indonesia,” jelas Tina.

Ia mengungkapkan bahwa *Vidio.com* dibangun dengan strategi mengusung sajian konten lokal terlengkap. “Kami ini satu-satunya OTT di Indonesia yang fokus utamanya ialah olahraga lokal dan produksi serial video sendiri. Untuk mendukung konten-konten tersebut tentunya kami bekerja sama dengan banyak rumah produksi di Indonesia dan bekerja sama juga dengan berbagai sumber daya dan *talent-talent* lokal,” ungkap Tina.

Konten utama yang mereka hasilkan antara lain memublikasikan olahraga dalam negeri yang terbaik seperti Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Selain itu, beberapa cabang olahraga lain, tidak hanya sepak bola, tapi juga seperti Proliga voli dan Indonesia Basketball League (IBL), serta sepak bola perempuan.

“Jadi dari sisi konten olahraga pun kami berusaha mengentengahkan olahraga dalam negeri yang terbaik dengan peminat yang sangat-sangat tinggi,” urainya.

Adapun untuk konten non-sport atau konten hiburan, menurut Tina, pihaknya memiliki lebih dari 300 film Indonesia. Jumlah itu belum terlalu besar sehingga pihaknya terus menambahkan dan membeli film-film terbaik Indonesia sebagai salah satu suguhan *entertainment* yang ditampilkan di *Vidio.com*.

Kenapa kita terus menambahkan konten-konten film Indonesia? Ia menjelaskan, karena secara *performance*, minat terhadap konten Indonesia tidak pernah berkurang atau tidak pernah hi-

lang sehingga perlu menghadirkan film-film Indonesia terbaik.

Itu salah satu usaha yang mereka lakukan dalam menggenjot industri kreatif di Tanah Air lewat produksi konten yang disebut sebagai serial video orisinal. Serial orisinal berbeda dengan sinetron karena sifat produksinya lebih mengutamakan kualitas dengan durasi yang lebih banyak dan episode yang lebih sedikit.

Tujuan menciptakan serial-serial seperti itu ialah untuk mengangkat kualitas konten-konten Indonesia, yang dalam prosesnya bekerja sama dengan lebih dari 15 rumah produksi lokal. Seiring berjalannya waktu, pihaknya akan terus memperluas kerja sama dengan rumah-rumah produksi yang ada.

“Kita pun merilis dalam volume yang sangat agresif mulai 2018 dengan empat *title*, 2019 meningkat mencapai 20 *title*, sampai akhirnya merilis lebih dari 35 *original series* pada 2021,” ungkap Tina.

Pada 2022, sambungnya, upaya kian agresif memasuki *market* dengan menghadirkan 30 judul lebih *original series* yang totalnya mencapai sekitar 350 episode baru setiap hari. Dengan volume yang sangat besar itu, tidak bisa dimungkiri bahwa harus mendapatkan talenta-talenta terbaik serta cerita dan *support system* yang mumpuni karena setiap *original series* harus dijaga kualitas dan *performance*-nya.

Tina menjelaskan, penonton *streaming* aplikasi sudah pandai dan cukup tereduksi sehingga mereka bisa memilah konten mana yang cocok untuk penonton digital. “Untuk mencapai level

tersebut kami bekerja sama dengan talenta-talenta atau artis-artis papan atas di Indonesia,” tukasnya.

Namun, tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan *talent-talent* muda berbakat yang merupakan tunas-tunas baru di dunia kreatif untuk produksi konten berkualitas.

Hal lain yang tak kalah penting ialah kerja sama dengan para kreator seperti penulis, sutradara, produser, dan semua talenta yang kiranya menjadi sumber atau motor penggerak industri kreatif di Indonesia.

“Saat ini kita bekerja sama dengan beberapa nama besar, seperti Timo Tjahjanto, Hanung Bramantyo, Monty Tiwa, Gina S. Nur, dan Tommi Dewo, yang mempunyai *achievement* di bidangnya masing-masing dan mempunyai konten-konten atau judul-judul film yang berkualitas dan terkenal,” sebut Tina.

Bersama dengan para kreator tersebut, pihaknya merumuskan dan bersama-sama menghadirkan konten Indonesia dengan kualitas terbaik yang bisa ditampilkan untuk penonton dalam negeri. Animo atau *interest* penonton terhadap konten Indonesia sangat tinggi, seperti terhadap tiga serial yang dirilis awal tahun 2022, yang dapat menggaet penonton dalam jumlah sangat signifikan.

“Contohnya dua *title* pertama, *Married With Senior* dan *My Neird Girl*, menjadi *trending series* di bulan Februari dengan 10 juta kali ditonton. Begitu juga dengan *Geez & Ann* yang bergenre roman remaja atau roman drama.”

Semua upaya ke arah itu, menurut Tina, merupakan suatu *challenge* yang dihadapi dalam menjaga kebanggaan terhadap buatan Indonesia, terutama karena dalam pengalaman selama ini kita sering menemukan adanya produk-produk bajakan, baik terhadap konten produksi dalam negeri maupun konten yang berasal dari luar negeri.

Produk-produk bajakan meraih keuntungan luar biasa karena tidak memerlukan investasi konten sedikit pun. Padahal, konten seperti video memerlukan investasi yang cukup serius, khususnya untuk produksi-produksi serial orisinal seperti yang dijelaskan di atas. “Pembajakan merupakan musuh nomor satu dari usaha untuk menggiatkan konten-konten orisinal dalam negeri,” tegasnya.

Oleh karena itu, perlu upaya dan solusi yang komprehensif untuk melawan aksi pemalsuan produk yang dilakukan oleh para pembajak, misalnya dengan meng-*create* domain baru, membuat akun baru, atau meng-*upload* ulang aplikasi dengan nama yang berbeda.

“Upaya untuk membasmi pembajakan hendaknya berjalan seiring dengan gerakan cinta produk dalam negeri yang dicanangkan oleh pemerintah,” tandas Tina. ■



Sekarang adalah waktu yang tepat bagi kita untuk menduniakan produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri karena generasi muda sangat akrab dengan teknologi digital sehingga memudahkan proses *branding* dan pengenalan produk ke pasar global.”

Raja Suhud

Wartawan Media Indonesia

7 Sentilan dari Kepala Negara

DALAM menanggapi uraian para narasumber dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Denpasar 12 itu, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Nas-Dem, Ratih Megasari Singkarru, menilai pernyataan Presiden Jokowi pada 25 Maret 2022 merupakan sebuah sentilan kepada berbagai pihak atas kebiasaan impor yang masih melekat, baik yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun masyarakat sebagai konsumen.

Ia yakin diskusi kali ini sepakat dan mendukung adanya peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, pengurangan impor, dan terus menggaungkan rasa bangga terhadap produk buatan Indonesia. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi baik

nasional maupun daerah bisa terpacu menjadi lebih baik lagi.

Pada prinsipnya, Ratih percaya bahwa Indonesia memiliki talenta-talenta SDM yang mumpuni untuk memproduksi produk-produk dengan kualitas yang baik. Misalnya, seperti yang dipaparkan oleh Tina Arwin bahwa banyak konten film lokal yang kualitasnya tidak kalah dengan drama-drama Korea yang sekarang sedang *booming*.

Ratih berharap, melalui industri perfilman, terutama melalui konten-konten orisinal menjadi perpanjangan tangan atau wadah untuk mempromosikan daerah-daerah destinasi wisata dalam negeri yang dikemas sebagai latar belakang film-film yang diproduksi.

“Ada anekdot yang sering kita dengar dari wisatawan Indonesia yang *travelling* ke luar negeri dan membeli barang-barang di sana, ternyata itu buatan Indonesia. Saya kira sebenarnya kita tidak kekurangan *talent* untuk memproduksi barang dan jasa yang berkualitas tinggi, setidaknya di beberapa industri yang ada,” tukasnya.

Namun, harus diakui juga bahwa masih ada *mindset* atau perilaku yang lebih memihak produk-produk buatan luar negeri dan tidak percaya pada kualitas produk lokal. Itu sering kita temukan pada tingkat konsumen atau masyarakat sehingga para pelaku usaha lokal berinisiasi dan berkreasi dengan cara mereka sendiri untuk menciptakan *brand image* atas produk-produk mereka yang sebenarnya asli produk Indonesia seolah-olah menjadi produk



MI/RAWDANI

Ribuan perempuan berkebaya mengikuti gerak jalan sehat dari Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menuju Bundaran HI pada hari bebas kendaraan bermotor (*car free day/CFD*) di Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (19/6/2022). Kegiatan itu dilaksanakan dalam mendukung rencana pendaftaran kebaya sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia ke UNESCO. Mengenakan kebaya juga menjadi bagian dari gerakan Bangga Buatan Indonesia.

dari luar negeri.

Misalnya, nama ataupun *brand*-nya dibuat dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Lalu model atau peraganya menggunakan orang kulit putih, orang-orang asing. “Nah, itu masih banyak ditemukan di berbagai produk dalam negeri,” ungkap Ratih.

Gerakan Bangga Buatan Indonesia, menurut politikus muda

Partai NasDem itu, perlu ditopang dengan aturan perundangan yang memadai serta pengawasan yang ketat atau bila perlu ‘dipaksakan’ agar setiap kementerian/lembaga menggunakan produk dalam negeri. “Ya, kayak kawin paksa *gitu* lah,” cetusnya.

Kendati demikian, menurut Ratih, di tingkat masyarakat rasa bangga tersebut harus tumbuh secara alamiah. Oleh karena itu, aspek-aspek yang mendorong munculnya rasa bangga itu harus sungguh-sungguh diperhatikan dalam setiap produk yang dihasilkan.

Di sisi lain, lanjutnya, tak bisa kita mungkiri bahwa beberapa produk memang tidak diproduksi di Indonesia sehingga baik pemerintah maupun masyarakat mau tidak mau harus menggunakan produk impor. “Menurut saya ini wajar karena setiap negara pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.”

Rasa bangga kepada buatan Indonesia atau bangga akan produk Indonesia yang sedang digaungkan sekencang-kencangnya oleh pemerintah, menurutnya, merupakan salah satu kepingan *puzzle* dari sebuah gagasan besar, yakni bangga akan Indonesia. Hal itu akan menjadi efek bola salju yang sangat besar lantaran rasa bangga itu terjadi karena memiliki SDM yang mumpuni, juga kualitas produk yang kompetitif, yang pada akhirnya mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat.

Penanggap lainnya, wartawan *Media Indonesia* Raja Suhud, menyatakan bahwa berbicara tentang bangga buatan Indonesia sesungguhnya bukan hal baru. Kebijakan pemerintah serta

dorongan ke arah itu sudah ada sejak zaman pemerintahan Presiden Soeharto hingga pemerintah Jokowi saat ini.

Meskipun demikian, imbuhnya, harus kita akui bahwa kebijakan tentang bangga akan produksi dalam negeri masih terbatas pada semangat yang besar, tapi tidak ditopang dengan langkah dan tindakan nyata yang besar pula. “Belum terlihat ada kegigihan besar mengapa kita harus menggunakan produk dalam negeri,” kata jurnalis yang akrab disapa Raja itu.

Menurut Raja, peran pemerintah sangat penting dalam menggaungkan gerakan cinta produk dalam negeri. Pemerintah dalam hal ini tidak hanya pemerintah pusat, tetapi harus berlangsung secara simultan bersama dengan pemerintah daerah.

Namun, yang lebih penting lagi ialah sambutan dari masyarakat karena masyarakat adalah konsumen yang menjadi tujuan pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan. “Masyarakat adalah pasar dari barang-barang yang diproduksi oleh anak-anak bangsa sendiri,” ujar Raja.

Bila dicermati, kata dia, sekarang adalah waktu yang tepat bagi kita untuk menduniakan produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri karena generasi muda sangat akrab dengan teknologi digital sehingga memudahkan proses *branding* dan pengenalan produk ke pasar global. “Semua potensi yang kita miliki harus diberdayakan secara optimal dalam mendukung gerakan cinta produk dalam negeri,” ucapnya.

Ia mencontohkan Presiden Jokowi yang selalu menggunakan



123RF

Seorang perajin sedang membuat batik tulis di Yogyakarta, beberapa waktu lalu. Rasa bangga kepada buatan Indonesia atau bangga akan produk Indonesia yang sedang digaungkan sekencang-kencangnya oleh pemerintah merupakan salah satu kepingan *puzzle* dari sebuah gagasan besar, yakni bangga akan Indonesia.

produk dalam negeri pada berbagai kegiatannya, termasuk saat kunjungan kerja ke daerah-daerah. “Ini sebuah kebiasaan baik yang patut ditiru oleh jajaran kementerian dan lembaga negara yang lain agar gerakan cinta produk dalam negeri tidak hanya sebatas wacana belaka,” tegas Raja.

Wartawan senior Saur Hutabarat, di penghujung diskusi,

mengungkapkan bahwa gerakan mendukung produk dalam negeri sudah berusia cukup panjang karena Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, yakni Ginandjar Kartasasmita, diangkat oleh Pak Harto pada 1983. Namanya begitu gamblang, Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri.

Perjalanan waktu selama 39 tahun telah berlalu, tetapi kita masih punya persoalan yang sama sehingga timbul pertanyaan, urusan kita terletak pada dimensi *what*, yakni pada apa yang diproduksi, atau dimensi *who*, siapa kita? “Maksud saya, tidakkah yang menjadi masalah serius adalah tentang kecil atau besarnya patriotisme?”

Lebih lanjut ia mengatakan kita mampu memproduksi, kita juga punya bahannya, tapi kenapa kita punya masalah tentang bangga terhadap produk dalam negeri? Tidakkah masalahnya bukan pada apanya, tetapi pada siapanya? “Di balik kebanggaan produk dalam negeri ada masalah patriotisme,” Saur mengingatkan. ■



Catatan Moderator

Menatap Ekonomi Indonesia 2022

Oleh: **Radityo Fajar Arianto**

TAHUN 2021 telah berakhir dengan berbagai tantangan dan gejolak. Memasuki 2022, masalah terbesar bangsa Indonesia masih sama yakni bagaimana mengatasi dampak pandemi covid-19 dari sisi kesehatan dan yang tidak kalah penting dari sisi ekonomi.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki menjelaskan bahwa 2022 adalah tahun pemulihan transformatif. Pada fase itu UMKM dan koperasi disiapkan dalam menghadapi tantangan 2022 untuk berjuang dari keterpurukan dunia usaha khususnya UMKM akibat pandemi covid-19.

Ekonom Dr. Chatib Basri, S.E., M.Ec. berbicara tentang perekonomian Indonesia secara makro. Menurut Chatib, berdasarkan indikator-indikator makroekonomi, Indonesia mengalami tekanan ekonomi akibat dampak covid-19 ditambah dengan berbagai gejolak global. Untuk menggerakkan perekonomian maka *government spending* menjadi pilihan yang masuk akal karena yang terkena dampak ekonomi bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia. Dengan demikian, perdagangan internasional, ekspor dan impor, juga mengalami penurunan.

Hal itu dapat memperbesar defisit perekonomian yang di-

alami Indonesia. Chatib menjelaskan defisit yang terjadi dalam ekonomi dapat ditutup dengan 1) meningkatkan pendapatan pajak, 2) meningkatkan kualitas belanja pemerintah, 3) adanya stimulus fiskal hijau, 4) menerbitkan obligasi lokal dan global, 5) *burden sharing* dengan Bank Indonesia melalui *money finance*, dan 6) kesinambungan fiskal.

Dari sisi kesehatan, munculnya varian baru dapat menjadi beban ekonomi yang harus ditanggung pemerintah. Namun, secara umum, kondisi perekonomian Indonesia dalam menghadapi covid-19 masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Founder dan Senior Economist CORE Indonesia, Dr. Hendri Saparini, mengatakan kebijakan yang akan diambil di 2022 akan memberikan dampak yang harus diantisipasi. Rencana konsolidasi fiskal berpotensi menekan belanja pemerintah. Selanjutnya perubahan kebijakan ekonomi juga akan memberikan dampak inflasi terutama kenaikan harga pada barang yang harganya diatur oleh pemerintah (*administered price*). Karena itu, perlu kehati-hatian pemerintah dalam melaksanakan, juga berani melakukan evaluasi dan koreksi sesuai dengan situasi yang terjadi.

Pengurangan subsidi, khususnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah, harus dilakukan secara ekstra hati-hati. Penerimaan pajak akan meningkat dari banyak perusahaan tambang karena kenaikan harga komoditas. Penerimaan itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa poin dalam Undang-Undang Harmoni-

sasi Peraturan Perpajakan yang mulai diberlakukan.

David Sumual, Kepala Ekonom PT. Bank Central Asia, menjelaskan tentang hambatan ekonomi akibat pandemi, strategi, dan peluang digitalisasi. Dengan diberlakukannya pembatasan mobilitas, maka gelombang digitalisasi di dunia usaha makin besar. Hal itu menuntut kecepatan dunia usaha untuk mengadopsi teknologi digital melalui inovasi dan investasi yang sangat besar. Kondisi itu dapat menciptakan disparitas antara dunia usaha yang memiliki modal besar dan pemain kecil yang telah terpuruk akibat dampak pandemi. Setiap pelaku ekonomi, baik besar maupun kecil, harus memiliki kemampuan adaptif dalam memanfaatkan perkembangan teknologi digital pada usahanya.

Dr. Karuniana Dianta Sebayang menyoroti perekonomian syariah dan zakat yang tumbuh cukup tinggi selama pandemi. Perekonomian syariah menurutnya memiliki potensi untuk membantu memperkuat perekonomian rakyat yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi krisis ekonomi.

Kesimpulan dari diskusi FDD12 ini bahwa ancaman ekonomi akibat covid-19 masih tinggi. Dampak dari pandemi sangat menyulitkan dunia usaha, khususnya UMKM dan koperasi. Ramuan kebijakan pemerintah untuk menanggulangi ancaman covid-19 dan menjaga kesehatan perekonomian harus dilakukan secara hati-hati. Pelaksanaan pengurangan subsidi yang sangat diperlukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah di tengah badai ekonomi akibat pandemi covid-19 harus dimonitor secara ekstra hati-hati.

Ekonomi digital dapat menjadi jalan keluar. Namun, diperlukan adaptasi, sumber daya, dan investasi yang cukup besar. Potensi ekonomi syariah untuk memperkuat dan melindungi UMKM juga cukup besar. ■



Biodata Tim Ahli



Arief Adi Wibowo, S.Si., M.T. lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Memegang gelar master teknik dan manajemen industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, sebelumnya lulus sebagai sarjana sains bidang fisika teoretis dari Universitas Airlangga. Sebagai aktivis, Arief aktif sebagai Wakil Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dan Ketua PP Ikatan Alumni Universitas Airlangga. Memiliki rekam kerja di banyak perusahaan media nasional seperti *TV One*, *Trans TV/7*, *CNN Indonesia*, dan *Metro TV*. Saat ini menjabat staf khusus di Chairman Office Media Group. ■



Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum. lahir di Wonosobo, 10 Juli 1975. Ia merupakan dosen Fakultas Hukum di Universitas Pasundan Bandung, Universitas Parahyangan (2000-2007), dan Dewan Penasihat DPD Kongres Advokat Indonesia Jawa Barat. Bidang kajiannya ialah hukum tata negara. Meraih gelar S-3 ilmu hukum di Universitas Padjadjaran pada 2011 dan mengenyam sejumlah pendidikan keterampilan seperti bidang jurnalistik dan pelatihan *public learning services* (PLS) di Payap University Chiang May, Thailand. Atang juga menjadi dosen luar biasa di Unikom (2003), Universitas Maranata (2010), Staf Ahli DPR RI 2009-2019, Staf Ahli DPD RI 2009-2019, dan staf khusus pimpinan MPR RI (2019-sekarang). ■



Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si. lahir di Masamba, 1 September 1956. Pendidikan terakhir S-2 administrasi negara. Pengalaman kerjanya dari Camat Wotu, Kabupaten Luwu (1986-1989), dosen IIP/IPDN (1989-2014), Bupati Luwu Utara (1999-2009), Staf Khusus Wakil Presiden RI (2009-2014), anggota DPR RI (2014-2019), Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang), serta anggota TGUPP Provinsi Sulawesi Selatan (2021-sekarang). Luthfi mendapat tanda penghargaan Bintang Jasa Utama pada 1999, tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun (2005), dan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun (2008). ■



Arimbi Heroepoetri lahir di Jakarta, 19 September 1966. Perempuan ini meraih gelar LL.M. dengan *major* lingkungan hidup di Dalhousie Law School, Halifax, Kanada, 1992. Gelar S.H. juga dalam *major* lingkungan hidup diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Dia mengikuti berbagai pendalaman, antara lain pendalaman mengenai transisi menuju demokrasi (Jerman, 1994), hak asasi perempuan (Bangladesh; Sao Paulo, Brasil; dan Tanzania, 2003), transisi keadilan (New York, 2007), dan kepemimpinan inovatif untuk berkelanjutan (IDEAS Indonesia 5.0, Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management, 2015). Arimbi juga merupakan aktivis Walhi, menjadi salah satu komisioner Komnas Perempuan (2007–2014), dan masuk Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Luthfi Assyaukanie, Ph.D. adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). Ia juga seorang peneliti dan dosen di Universitas Paramadina, Jakarta. Meraih gelar Ph.D. di Universitas Melbourne, Australia, dalam bidang sejarah politik. Ia pernah bekerja sebagai peneliti di Singapura, Belanda, dan Amerika Serikat. Luthfi sudah menulis sejumlah buku dan puluhan artikel yang diterbitkan di media dalam dan luar negeri. Salah satu bukunya, *Islam and the Secular State*, diterbitkan oleh ISEAS, Singapura (2009). Dia pernah menjabat Direktur Freedom Institute dan peneliti di SMRC, Jakarta. ■



Sadyo Kristiarto, S.P. lahir di Jakarta pada 25 Juni 1968, merupakan alumnus Jurusan Agronomi IPB Bogor. Sejak 1996 hingga 2014 menjadi wartawan di *HU Media Indonesia* antara lain menangani Desk Polhukam, Ekonomi, Metropolitan, dan Suplemen. Pada 2014 selama kurang lebih setahun bertugas sebagai Pemimpin Redaksi *Borneo News* di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sebelum menjadi jurnalis sempat berkarier sebagai asisten kepala divisi di perkebunan kelapa sawit PT Tania Selatan, Palembang, Sumatra Selatan, dan sebagai supervisor data di PT Pillar, kantor konsultan teknik. Saat ini tergabung dalam Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Anggiasari Puji Aryatie, S.S. merupakan sosok yang sangat berpengalaman dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan kesetaraan gender serta upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Perempuan kelahiran Jakarta itu juga memiliki keahlian dalam pelatihan dan berbicara di depan umum. Keterampilan kepemimpinannya ditopang bakat dalam menganalisis masalah masyarakat, meninjau kebijakan publik, mengembangkan dan menyederhanakan prosedur, serta menemukan solusi yang inovatif.

Sarjana sastra Inggris dari Sekolah Bahasa Asing LIA, Yogyakarta, 2007, itu pada Januari 2016 hingga Oktober 2016 menjadi Koordinator Komunikasi Indonesia dan Filipina untuk Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), salah satu organisasi tertua di Jerman yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Selain itu, sejak September 2019 sampai sekarang ia menjadi konsultan bidang penelitian dan pengumpulan data pandemi yang bekerja sama dengan Asia University, Jepang. Kini, menjadi Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Dr. Irwansyah, S.Sos., M.A. memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos.) dari Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) 1991-1994; *master of arts* (M.A.) dari School of Communication, College of Social Science, University of Hawaii at Manoa (UHM) Honolulu, Amerika Serikat (2003-2004); dan doktor (Dr.) dari Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) 2007-2010 (*cum laude*).

Pada 2021 menjadi staf pengajar Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI dan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan, anggota Senat Antar-fakultas FISIP UI, asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan Ketua Bidang Keilmuan ISKI Pusat, Ketua Litbang *Media Indonesia*, dan Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Dr. Radityo Fajar Arianto, S.E., M.B.A. lahir di Surabaya pada 4 Juni 1975. Memperoleh gelar sarjana dari Universitas Airlangga Surabaya di bidang manajemen dan menamatkan pendidikan MBA dari University of Hertfordshire Inggris. Radityo aktif mengajar sebagai dosen di Universitas Pelita Harapan (UPH) sejak 2008 dan mendapatkan gelar doktor dari UPH pada 2021, pernah menjabat Direktur Inkubator Bisnis UPH Sparklabs. Saat ini Radityo juga aktif dalam kegiatan FDD12 sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI. ■

**MEDIA
INDONESIA
PUBLISHING**

ISBN 978-623-6165-18-8

